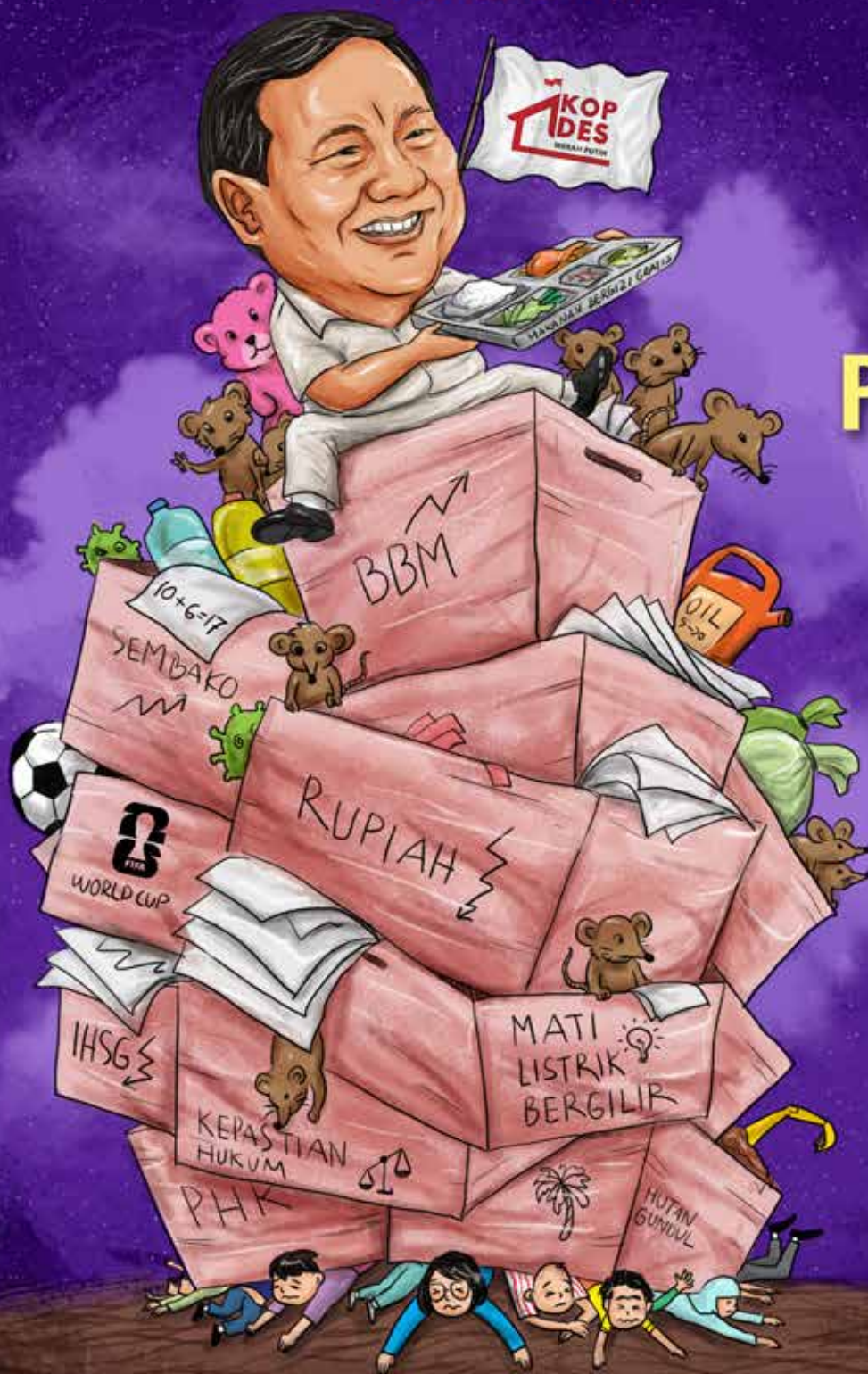


CARA PANDANG

Inspirasi Terkini!

Edisi Juni 2026

EKONOMI MEROSOT, DUNIA BERGETAR, HARAPAN PENDIDIKAN BANGKIT



CATATAN 6 JANJI
PRABOWO PADA BURUH
DI "MAY DAY" 2026

PIDATO PRABOWO,
IHSG MEMERAH DAN
KANDASNYA RUPIAH

PROGRAM REVITALISASI:
KONSOLIDASI
INFRASTRUKTUR DAN
KUALITAS
PEMBELAJARAN



Periode 1 Juni - 31 Desember 2025

Pindah Payroll ke BNI Dapatkan Berbagai Benefit

Reward Cashback hingga
Rp500 Ribu

Special Rate
Fasilitas Pinjaman

Bonus hingga
100 Kupon Undian
rejek*i* **wondr** BNI

Cash Reward **1%**
untuk Perusahaan



Dapatkan
kesempatan mengikuti
rejek*i* wondr BNI

Informasi Selengkapnya
bni.id/payroll

DAFTAR ISI

<u>TAJUK</u>	5
SEMESTER PERTAMA 2026: POLEMIK MBG, BAYANG EBOLA, JANJI BURUH PRABOWO, DAN UJIAN INTEGRITAS KPK	
<u>EKONOMI</u>	
BUKAN UNTUK DIKENANG, TAPI DITEPATI	12
<u>POLITIK</u>	
ALERGI KRITIK: DEMOKRASI RASA OTORITARIANISME	22
MEMBACA SAFARI POLITIK JOKOWI: EFEKTIFKAH DONGRAK ELEKTABILITAS GIBRAN DAN PSI?	28
<u>HUKUM</u>	
BUBARNYA REZIM DADAN HINDAYANA DI BADAN GIZI NASIONAL	34
KPK DI SEMESTER PERTAMA 2026: TITIK TERANG DARI ENAM SKANDAL	40
<u>EDUKASI</u>	
SE MENDIKDASMEN NOMOR 7 2026: ARAH BARU PEMBINAAN GURU	46
PROGRAM REVITALISASI: KONSOLIDASI INFRASTRUKTUR DAN KUALITAS PEMBELAJARAN	52
MEMBANGUN PENDIDIKAN INKLUSIF: MUTU, KEADILAN, DAN HARAPAN DI SEMESTER PERTAMA 2026	56



EKONOMI

PIDATO PRABOWO, IHSG MEMERAH DAN KANDASNYA RUPIAH

6

Layar-layar di lantai bursa masih belum berhenti berkedip merah. Para pialang saham di Jakarta tampak lebih banyak menekuri telepon seluler daripada bicara satu sama lain. Di ruang perdagangan valas, tak terdengar tawa. Yang ada hanya desisan napas berat setiap kali angka di monitor menunjukkan tiga digit nol yang bergerak ke kiri, lalu ke kanan, lalu jatuh lagi.

<u>INTERNASIONAL</u>	
PIALA DUNIA 2026: GEMERLAP TIGA NEGARA, BAYANG-BAYANG KONTROVERSI	60
EBOLA: LUKA LAMA, UJIAN BARU BAGI AFRIKA DAN DUNIA	64
<u>HUMANIORA</u>	
PIALA WAKIL WALIKOTA, AJANG BERGENGSI BEKASI MENUJU KOTA SPORT CITY	66

<u>OPINI</u>	
GURU HONORER MASIH DIBUTUHKAN	68
BADAI SEMPURNA EKONOMI INDONESIA	72
<u>FILM</u>	
JANGAN BUANG IBU: CINTA YANG TAK PERNAH USAI	78

MBG Jangan Jadi Ladang Bancakan Baru

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini berada di bawah bayang-bayang pesimisme publik. Bagaimana tidak, dengan anggaran yang fantastis, risiko kebocoran melalui praktik korupsi sangatlah nyata. Kami sudah terlalu sering melihat program kerakyatan berakhir menjadi “bancakan” oknum di rantai distribusi.

Pemerintah jangan hanya sibuk memamerkan seremonial menu makanan. Saya menuntut transparansi total dan mekanisme pengawasan yang independen. Jika pemerintah gagal menjamin bahwa setiap butir nasi dan lauk sampai ke tangan siswa tanpa dipotong “biaya siluman”, maka program ini hanyalah proyek pemborosan uang negara yang melukai rakyat.

Hormat saya,
Budi Santoso, Surabaya

Statistik Ekonomi Tidak Bisa Dimakan

Pemerintah terus membanggakan angka pertumbuhan ekonomi yang diklaim stabil. Namun, kenyataan di pasar jauh lebih kejam. Daya beli masyarakat kelas menengah-bawah benar-benar merosot tajam. Harga pangan melonjak, sementara penghasilan stagnan.

Membanggakan statistik di saat rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok adalah bentuk

ketidakepekaan penguasa. Kami tidak bisa memakan grafik pertumbuhan ekonomi. Mohon berhenti bersembunyi di balik data makro yang indah dan segera lakukan intervensi harga serta penciptaan lapangan kerja yang riil. Jika ekonomi terus dibiarkan seperti ini, jangan salahkan jika kesenjangan sosial akan meledak dalam waktu dekat.

Hormat saya,
Darmawan, Medan

Pidato Prabowo di Hari Buruh Hanya Pemanis Lidah

Janji-janji Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh beberapa waktu lalu kini terasa hambar. Pidato yang sempat membakar semangat para pekerja tersebut terbukti hanya menjadi pemanis lidah sementara. Faktanya, nasib buruh masih terkatung-katung dengan kebijakan upah yang tidak berpihak dan ancaman PHK yang terus mengintai.

Jika Bapak Presiden memang berpihak pada rakyat kecil, buktikan dengan aksi nyata, bukan sekadar retorika podium. Cabut aturan-aturan yang menyengsarakan pekerja dan segera benahi sistem pengupahan yang timpang. Buruh sudah lelah dengan janji; mereka butuh bukti yang bisa dirasakan di dompet dan meja makan.

Hormat saya,
Siti Aminah, Tangerang



Majalah Cara Pandang

Dewan Pembina: Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed., Faozan Amar, S.Ag, M.M., Jalu Dwi Putranto S.IP

Pemimpin Umum: Zulfikar Rachman **Ombudsman:** Mahmud Marhaba (Ahli Pers Dewan Pers) **Direktur:** Michael Malik

Pimpinan Redaksi dan Penanggung Jawab: Habibi **Wakil Pimred:** Amir Fiqi, Mujamin Jassin **Koordinator Daerah:** Nafik Muthohirin (Jawa Timur), Wiwin Alfianti (Riau), Hamid Toliu (Gorontalo), Linda Sari (Sumatera Barat) **Redaktur Pelaksana:** Amir Fiqi, Edo Soeryadi **Redaktur:** Rais Syauqi, Jirga R. Azka, Amira Izzati, Wiwin Alfianti, Zoel Rachman, Haedar Zafran **IT Support:** Zulfikar Iskandar, Dede Hidayatullah **Kreatif:** Robby Firmansyah, Hengki **Media Sosial:** Obie **Sirkulasi:** Syifa Chairul Hidayah

Alamat Redaksi Pusat

Jalan Pulo Ribung Rukan Rose Garden Boulevard No. 85-87 Kota Bekasi 17147 Telp: (021) 82760392 dan (021) 21383521
Email: redaksi@carapandang.com

Majalah Cara Pandang menerima kiriman artikel opini dan rubrik-rubrik lainnya, tak terkecuali rubrik bahasa. Panjang tulisan mencapai 1.000-1.200 kata, spasi satu, times new roman, disertai pas foto terbaru, nama lembaga/institusi, alamat email, kontak person dan nomor rekening. Artikel dapat dikirim melalui alamat redaksi



SEMESTER PERTAMA 2026: **POLEMIK MBG, BAYANG EBOLA, JANJI BURUH PRABOWO, DAN UJIAN INTEGRITAS KPK**

Semester pertama 2026 membuka lembaran penuh dinamika: dari meja makan anak sekolah hingga ruang sidang lembaga antikorupsi, dari janji politik di hadapan buruh hingga ancaman virus mematikan di benua lain. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai simbol keberpihakan negara, justru memantik perdebatan sengit soal anggaran dan efektivitas. Di sisi lain, dunia kembali diguncang oleh kabar virus Ebola yang merebak di Afrika, mengingatkan kita bahwa krisis kesehatan global tidak pernah mengenal batas negara.

Di dalam negeri, sorotan publik tertuju pada Prabowo yang menegaskan komitmen kepada buruh, sebuah janji yang menjadi

ujian nyata di tengah ketegangan ekonomi dan tuntutan kesejahteraan. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi semester penuh ujian integritas, dengan publik menanti apakah lembaga ini masih mampu berdiri tegak melawan kasus besar yang terus bergulir.

Majalah ini hadir untuk menyingkap lapisan demi lapisan: bagaimana MBG diperdebatkan di ruang kebijakan, bagaimana suara buruh bergema di jalanan, bagaimana dunia menanggapi ancaman Ebola, dan bagaimana KPK berjuang mempertahankan kepercayaan. Semua berpadu dalam satu bingkai: semester pertama 2026 sebagai cermin perjalanan bangsa dan dunia, penuh janji, ancaman, dan pertarungan integritas.

PIDATO PRABOWO, IHSG MEMERAH DAN KANDASNYA RUPIAH

Layar-layar di lantai bursa masih belum berhenti berkedip merah. Para pialang saham di Jakarta tampak lebih banyak menekuri telepon seluler daripada bicara satu sama lain. Di ruang perdagangan valas, tak terdengar tawa. Yang ada hanya desisan napas berat setiap kali angka di monitor menunjukkan tiga digit nol yang bergerak ke kiri, lalu ke kanan, lalu jatuh lagi.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus merayap turun. Pada Kamis pagi (11/6/2026), IHSG sempat menyentuh level 5.560-an, sebelum sedikit pulih ke 5.612 pada sesi kedua. Namun, secara tahunan, IHSG telah kehilangan lebih dari 35 person. Itu membuat bursa saham Indonesia menjadi yang terburuk di Asia, menurut data Bloomberg yang dirilis Rabu kemarin.

Angka itu bukan sekadar statistik. Itu adalah pukulan telak bagi kelas menengah yang mulai kembali menyimpan dana di pasar modal setelah pandemi.

Sementara itu, dolar Amerika Serikat terus menguat seperti monster yang tak bisa dijinakkan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS nyaris tak

kuasa menahan tekanan. Sepanjang pekan lalu, rupiah sempat menyentuh level psikologis yang paling ditakuti: Rp18.058 per dolar AS. Itu adalah level terburuk sejak krisis moneter 1998, kecuali masa pandemi yang sempat menyentuh angka serupa. Namun kali ini, strukturnya berbeda. Pandemi sudah berlalu. Yang tersisa sekarang adalah krisis kepercayaan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa harus bekerja ekstrakeras. Di satu sisi, ia harus meyakinkan investor asing bahwa Indonesia tetap aman. Di sisi lain, ia harus mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tekanan subsidi energi yang membengkak lantaran harga minyak dunia masih merangkak naik.

Dan di tengah semua itu, Presiden Prabowo Subianto justru berbicara tentang nasionalisme, mobil buatan anak bangsa, dan swasembada energi di hadapan pengusaha muda di Lampung pada Rabu (10/6) kemarin.

Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Indonesia sedang berada di ambang krisis ekonomi besar? Atau hanya sedang mengalami “demam” akibat pergantian rezim kebijakan?

Untuk memahami situasi ini, kita harus membedah tiga lapisan: tekanan eksternal, kebijakan domestik, dan sentimen politik.

Lapisan pertama adalah global. Konflik di Timur Tengah yang tak kunjung mereda telah mendorong harga minyak mentah dunia naik sekitar satu persen dalam sepekan terakhir. Bagi Indonesia yang masih menjadi net importir minyak, ini adalah mimpi buruk. Impor minyak membengkak, defisit transaksi berjalan melebar, dan cadangan devisa terus tergerus untuk membiayai kebutuhan energi.

Itulah sebabnya Pertamina Patra Niaga akhirnya mengambil langkah yang tidak populer. Mulai Rabu (10/6) kemarin, harga bahan bakar minyak nonsubsidi Pertamina (RON 92) resmi naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamina Green 95 melonjak menjadi Rp17.000 per liter. Di wilayah Riau dan Kalimantan Utara, harga Pertamina bahkan menyentuh Rp17.000 per liter.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan dengan nada datar namun tegas.



“Penyesuaian harga Pertamina dan Pertamina Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Ini konsekuensi dari membengkaknya harga minyak dunia akibat geopolitik Timur Tengah,” ujar Roberth dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6).

Kenaikan itu tidak serta-merta membuat rakyat marah. Yang membuat resah adalah ketiadaan paket kompensasi yang jelas. Di masa lalu, kenaikan harga BBM selalu dibarengi dengan bantuan langsung tunai atau subsidi silang. Kali ini,

masyarakat hanya diberi tahu bahwa “ini konsekuensi global”. Sementara sektor riil masih merangkak naik pasca-pandemi.

Namun, tekanan eksternal hanya sebagian cerita. Lapisan kedua adalah kebijakandomestikyangdinilaiinvestor semakin nasionalis dan intervensionis. Sejak menjabat, Presiden Prabowo memang mengusung agenda hilirisasi total, ambil alih aset strategis, dan program makan siang gratis yang membutuhkan biaya tidak sedikit.

Para ekonom asing mulai angkat suara. Jason Tuvey, Deputy Chief

Emerging Markets Economist di Capital Economics, London, mengatakan bahwa para investor benar-benar khawatir.

“Investors are ‘concerned about the direction of policymaking in Indonesia,’ especially so, after widespread protests in the middle of last year led to the sacking of respected finance minister Sri Mulyani Indrawati. Since then, the government has adopted increasingly populist and interventionist policies,” kata Tuvey dalam analisisnya yang dikutip Bloomberg pekan lalu.

Terjemahan bebasnya: investor



Purbaya Yudhi Sadewa

khawatir dengan arah kebijakan di Indonesia, terutama setelah pemecatan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sejak saat itu, pemerintahan mengadopsi kebijakan yang semakin populis dan intervensionis.

Kehilangan figur Sri Mulyani yang dihormati pasar memang menciptakan lubang kredibilitas yang sulit ditambah. Penerusnya, Purbaya Yudhi Sadewa, adalah sosok teknokrat yang cakap. Ia mantan deputy gubernur Bank Indonesia dan pernah menjabat Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Namun, di mata investor, Purbaya belum memiliki “otonomi politik” seperti pendahulunya.

Isu Purbaya Resign: Fakta atau Gangguan Pasar?

Di tengah kepanikan, pada Jumat pekan lalu (5/6), sebuah isu meledak di kalangan pelaku pasar global: Menteri Keuangan Purbaya dikabarkan akan mengundurkan diri.

Alasannya, menurut desas-desus yang beredar di grup WhatsApp dan Telegram para analis, karena Purbaya

tidak sepekat dengan kebijakan fiskal Presiden Prabowo yang dianggap terlalu ekspansif. Program Makan Siang Gratis yang menyedot Rp400 triliun lebih per tahun dinilai akan menggerus defisit dan menyebabkan utang membengkak.

Situasi semakin panas ketika beberapa media asing menurunkan berita “mengutip sumber istana” bahwa Presiden sudah menerima surat pengunduran diri. Namun, setelah dikonfirmasi lebih lanjut, isu itu tidak memiliki dasar yang kuat.

Purbaya sendiri langsung buka suara. Dalam konferensi pers APBN yang digelar di Jakarta, Jumat sore, ia membantah keras kabar tersebut.

“I’m not the type to quit. Saya bukan tipe orang yang mundur. Saya ditugaskan Presiden untuk menjaga keuangan negara, dan itu akan saya jalankan selama beliau percaya,” ujar Purbaya dengan nada tegas namun tetap tenang.

Ia juga membela kebijakan Presiden Prabowo. Menurut Purbaya, semua program unggulan pemerintahan baru

itu telah dihitung secara akurat dan rinci dalam APBN Perubahan 2026.

“Tidak ada kebijakan populis yang tidak dihitung dampak fiskalnya. Presiden sangat memperhatikan sustainability,” katanya.

Meskipun sudah dibantah, isu semacam ini biasanya menjadi “tanda bahaya awal” dalam ekonomi. Isu itu menunjukkan bahwa pasar kehilangan koordinasi dan komunikasi dari tim ekonomi. Ini juga menunjukkan bahwa kepercayaan investor sangat rapuh. Hanya sedikit pemicu, pasar bisa panik.

Peter Mumford, Kepala Praktik Asia Tenggara di Eurasia Group, menilai bahwa kebijakan baru justru menciptakan lebih banyak ketidakpastian ketimbang kepastian.

“Ketika seorang presiden terus berbicara tentang nasionalisme ekonomi, investor asing justru mendengar ‘kami tidak membutuhkan Anda lagi’. Itu tidak baik di saat defisit transaksi berjalan masih ada,” kata Mumford dalam wawancara dengan CNBC Indonesia pekan lalu.

Pidato Prabowo: Antara Semangat dan Realitas

Di tengah krisis keyakinan ini, pada Rabu (10/6) kemarin, Presiden Prabowo justru tampil di hadapan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Bandar Lampung. Alih-alih menggelar konferensi pers darurat ekonomi, ia menyampaikan pidato panjang tentang nasionalisme dan swasembada.

“Pertumbuhan distimulasi dan dipertahankan oleh nasionalisme,” ujar Presiden mengutip teori Profesor Liah Greenfeld.

Prabowo menegaskan bahwa ekonomi tidak akan berkembang dengan sendirinya tanpa semangat

kebangsaan. Ia mencontohkan Jepang dan China sebagai negara yang berhasil karena mengutamakan kepentingan nasional di atas segalanya. Ia juga mendorong agar keuntungan perusahaan disimpan di dalam negeri, tidak kabur ke luar lewat rekening asing.

Selain itu, Presiden kembali mengkampanyekan hilirisasi total dan swasembada energi.

“Perhitungan kita tiga tahun lagi kita benar-benar sangat kuat di bidang energi. Kita tidak akan tergantung pada siapa pun,” tegasnya, seraya menyebut bahwa Presiden sekarang menggunakan mobil buatan Indonesia sendiri.

Di atas kertas, pidato itu inspiratif. Di ruang-ruang terbatas, para pengusaha muda mungkin bertepuk tangan. Namun, bagi para investor asing yang memegang 38 persen kepemilikan saham di bursa Indonesia, pidato itu justru terdengar sebagai alarm.

Mengapa? Karena di saat yang sama, data resmi menunjukkan bahwa foreign outflow (arus modal asing keluar) dari pasar obligasi dan saham Indonesia telah mencapai Rp86 triliun sejak awal tahun 2026. Mereka kabur karena takut dengan intervensi negara yang berlebihan.

Ironinya, Prabowo sendiri adalah mantan pebisnis yang paham betul bagaimana pasar bekerja. Namun, sebagai kepala negara, ia kini harus menyeimbangkan retorika politik populis dengan kebutuhan riil menjaga iklim investasi.

Siasat Menahan Badai: Pekerjaan Rumah Purbaya, Perry, dan Mahendra

Meskipun komunikasi politik sedang “nyeleneh” di mata pasar, jajaran teknis di Bank Indonesia (BI)



Perry Warjiyo

dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bergerak cepat. Mereka memainkan peran sebagai tameng, mencoba mencegah kehancuran total.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, resmi menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) menjadi 5,50 persen pada Selasa (9/6). Ini adalah langkah yang disebutnya sebagai “front-loaded” untuk meningkatkan imbal hasil (yield) obligasi Indonesia agar menarik minat investor asing yang kabur.

Kenaikan suku bunga adalah obat pahit. Suku bunga naik berarti biaya kredit naik, yang akhirnya akan membebani dunia usaha dan konsumen rumah tangga. Tapi bagi Perry Warjiyo, tidak ada pilihan lain.

“Kami akan terus mengoptimalkan semua instrumen untuk stabilisasi nilai tukar. Intervensi di pasar valas terus dilakukan, baik melalui transaksi spot maupun Domestic Non Deliverable Forward (DNDF),” kata Perry dalam konferensi pers usai RDG BI.

BI juga memberikan insentif hedging berupa penurunan tingkat swap lindung nilai sebesar 10 persen

bagi investor asing. Tujuannya supaya biaya masuk ke pasar keuangan Indonesia menjadi lebih murah.

Selain itu, BI membuka kembali lelang repurchase agreement (repo) untuk menjaga likuiditas perbankan. Ini adalah jurus darurat yang biasanya hanya digunakan saat krisis likuiditas.

Di sisi lain, Dana Pengelolaan Investasi Danantara (yang dulu bernama Indonesia Investment Authority) juga berjanji tidak akan mengambil margin keuntungan dari ekspor komoditas untuk sementara waktu. Langkah itu diambil agar eksportir tidak menyimpan dolar di luar negeri, tetapi segera merepatriasi dan menjualnya ke dalam negeri.

Namun, semua upaya itu seperti menambal kapal yang bocor. Karena sumber kebocoran utamanya bukan hanya global, melainkan sentimen domestik.

Ancaman di Balik Utang Valas

Satu hal yang jarang dibahas di media arus utama, tetapi sangat nyata mengancam, adalah jatuh tempo utang



valas Indonesia dalam waktu dekat.

Data Bloomberg yang dirilis awal Juni menunjukkan bahwa pemerintah dan perusahaan di Indonesia memiliki utang obligasi dalam dolar AS sebesar USD12,6 miliar yang jatuh tempo di tahun 2027. Dan setidaknya USD11,3 miliar hingga USD16,3 miliar setiap tahun setelahnya.

Dengan kurs rupiah yang kini di kisaran Rp18.000 per dolar AS, beban utang ini membengkak secara otomatis. Setiap kenaikan Rp100 pada kurs berarti tambahan triliunan rupiah yang harus dibayar oleh APBN atau neraca perusahaan.

Inilah yang membuat para analis khawatir. Jika rupiah terus tertekan dan tidak kunjung pulih ke level Rp17.000 dalam enam bulan ke depan, maka risiko gagal bayar (default) utang korporasi akan meningkat. Beberapa perusahaan dengan pendapatan dalam rupiah tetapi utang dalam dolar akan tercekik.

Menteri Purbaya Sadewa sebenarnya sudah menyadari hal ini. Dalam

rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/6) sore, ia mengakui bahwa pemerintah sedang menyiapkan skema pembiayaan ulang (refinancing) untuk utang-utang yang jatuh tempo.

“Kami akan memprioritaskan penerbitan obligasi ritel dalam rupiah untuk masyarakat, bukan obligasi valas. Kita tidak ingin menambah beban utang valas di tengah situasi seperti ini,” kata Purbaya di hadapan anggota dewan.

Namun, pertanyaannya: Apakah pasar dalam negeri cukup likuid untuk menyerap obligasi ritel dalam jumlah besar? Dan apakah masyarakat masih percaya membeli Surat Berharga Negara di saat rupiah terpuruk?

Suara dari Lantai Bursa dan Pasar

Di luar gedung megah bank sentral dan kementerian keuangan, di lantai bursa dan pasar-pasar tradisional, ceritanya berbeda. Kami berbincang dengan beberapa pelaku pasar untuk mengetahui bagaimana dampak riilnya.

M. Reza, seorang pialang saham di perusahaan sekuritas terbesar di Jakarta, mengatakan bahwa klien-klien ritelnya mulai panik.

“Sejak pekan lalu, hampir setiap hari ada order jual bersih. Mereka takut IHSG turun lebih dalam. Padahal saya bilang, ini mungkin titik terendah, tapi mereka tetap jual. Psikologisnya sudah hancur,” ujar Reza saat ditemui di kawasan Sudirman, Rabu sore.

Di sisi lain, pengusaha kecil seperti Slamet Riyadi, pemilik bengkel di Tangerang, mengaku sudah merasakan dampak kenaikan BBM.

“Ini bengkel, om. Kami pakai Pertamina untuk mesin yang diservis. Sekarang harga naik sampai Rp16.000. Kami terpaksa menaikkan biaya jasa servis 10 persen. Pelanggan komplain, tapi apa boleh buat,” kata Slamet dengan nada pasrah.

Ekonom senior Faisal Basri, dalam diskusi di salah satu stasiun televisi swasta, Rabu malam, menyebut bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami “krisis persepsi” yang bisa berubah menjadi krisis riil jika tidak segera ditangani.

“Ini bukan krisis fundamental. Fundamental kita masih baik. Tapi ketika investor dan masyarakat kehilangan kepercayaan, maka mereka akan menarik uangnya. Itulah yang terjadi sekarang. Presiden harus segera memanggil semua menteri ekonomi dan mengumumkan paket kebijakan yang jelas, bukan pidato nasionalisme,” ujar Faisal.

Sementara itu, pengamat pasar uang, Ariston Tjendra, mengatakan bahwa level psikologis berikutnya adalah Rp18.500.

“Jika rupiah menembus 18.500, maka kita bisa bicara tentang krisis. Karena itu akan memicu capital outflow lebih besar lagi. Tapi selama masih



di kisaran 18.000, sebenarnya masih dalam batas kewajaran untuk negara berkembang yang terkena guncangan eksternal,” kata Ariston.

Antara Harapan dan Ancaman

Jadi, apakah Indonesia sedang menuju krisis? Jawabannya: belum. Namun, tanda-tandanya sudah ada di depan mata.

Dari sisi fundamental, data IMF dalam World Economic Outlook edisi Januari 2026 masih memproyeksikan pertumbuhan Indonesia di angka 5,1 persen untuk tahun ini. Itu masih lebih baik dibandingkan rata-rata dunia yang hanya 3,2 persen. Bank Dunia juga masih memberi Indonesia status “upper middle income country” yang stabil.

Dari sisi fiskal, defisit APBN 2026 masih di bawah 3 persen terhadap

PDB. Rasio utang terhadap PDB masih sekitar 39 persen, jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara G20 lainnya.

Kepanikan itu terjadi karena pasar tidak yakin bahwa pemerintahan Prabowo-Purbaya mampu menjaga disiplin fiskal di tengah gempuran program-program populis. Investor asing melihat ada risiko bahwa Indonesia akan kembali ke era 1960-an ketika nasionalisme berlebihan mengusir modal asing dan menyebabkan stagflasi.

Selain itu, kasus korupsi yang melibatkan Dadan Hindayana, mantan kepala Badan Gizi Nasional yang mengelola program Makan Siang Gratis, semakin menambah sentimen negatif. Investor jadi bertanya: jika program unggulan yang baru berjalan setahun saja sudah tersangkut korupsi,

bagaimana dengan tata kelola utang dan komoditas?

Presiden Prabowo berusaha menepis isu korupsi ini sebagai bukti bahwa ia berkomitmen memberantas korupsi. “My eyes and ears are everywhere. Siapa pun yang korupsi, akan saya tindak,” ancam Presiden dalam pidato di Lampung kemarin.

Namun, bagi para pemilik dana di Wall Street dan Sydney, kata-kata itu tidak cukup menggantikan kepastian hukum yang stabil. Yang mereka butuhkan adalah revisi aturan investasi yang jelas, paket stimulus untuk pasar modal, dan sinyal kuat bahwa Menteri Keuangan Purbaya diberi kewenangan penuh untuk mengambil kebijakan yang tidak populer, termasuk jika harus memangkas subsidi atau menaikkan pajak.



BUKAN UNTUK DIKENANG, TAPI DITEPATI

CATATAN 6 JANJI PRABOWO PADA BURUH DI “MAY DAY” 2026

Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Jumat (1/5/2026). Dalam pidatonya di hadapan ratusan ribu buruh yang memenuhi kawasan Medan Merdeka, Presiden mengumumkan serangkaian kebijakan strategis, mencakup pengaturan pembagian pendapatan pengemudi ojek online hingga pembentukan satuan tugas mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Presiden Prabowo Subianto tiba di lokasi peringatan Hari Buruh pada pukul 09.15 WIB. Ia didampingi oleh sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Kehadirannya disambut dengan gemuruh yel-yel dan kibaran bendera serikat pekerja dari berbagai konfederasi yang memadati kawasan Silang Monas sejak pagi.

Tahun 2026 menjadi tahun kedua berturut-turut Presiden Prabowo menghadiri langsung peringatan May Day sejak menjabat. Pidatonya kali ini dinanti dengan antisipasi tinggi oleh

kalangan buruh, mengingat kondisi ekonomi yang dihadapi sepanjang 2025 hingga awal 2026 menunjukkan tantangan serius, terutama gelombang PHK di sektor manufaktur dan perlambatan daya beli.

Setelah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu “Internationale” yang dikenal sebagai lagu perjuangan buruh sedunia, Presiden Prabowo naik ke panggung utama. Ia sempat mengepalkan tangan dan mengikuti lirik lagu tersebut, disambut sorak-sorai massa yang hadir.



“Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Hari ini adalah hari perjuangan kaum buruh. Saya ucapkan terima kasih atas undangan kepada saya untuk hadir hari ini bersama kalian. Ini kehormatan bagi saya,” ujar Prabowo memulai pidatonya di hadapan puluhan ribu buruh yang memadati kawasan Monas.

Presiden mengakui secara blak-blakan dukungan kaum buruh terhadap dirinya.

“Saya merasa jadi presiden karena dukungan kaum buruh, kaum tani, kaum nelayan, kaum pekerja seluruh Indonesia. Terima kasih,” ucapnya disambut tepuk tangan meriah dari massa yang hadir.

Sejak masa kampanye, Prabowo

memang telah membangun narasi sebagai pemimpin yang dekat dengan kelas pekerja. Namun, pidato May Day 2026 terasa berbeda; ia tidak hanya menyapa, tetapi menjabarkan poin-poin konkret yang dijanjikan akan segera terealisasi.

Mulai dari angka pembagian untuk pengemudi online (ojol) hingga pembentukan “Satgas” untuk mengatasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Akan tetapi, dibalik euforia slogan dan yel-yel penyambutan, gelombang pertanyaan besar mengemuka: Apakah janji-janji ini sekadar “gula-gula” politik musiman, ataukah sebuah peta jalan nyata yang telah disiapkan fondasi hukum dan fiskalnya?

Di panggung utama, Presiden Prabowo Subianto tampil berbeda. Tidak ada pidato formal yang kaku, ia hadir dengan kemeja putih lengan panjang yang digulung hingga siku. Momen ini bukan sekadar seremonial tahunan. Ia adalah titik kulminasi dari hubungan simbolik antara Prabowo dan kelas pekerja—sebuah hubungan yang ia klaim telah terjalin lama.

Kedatangan Prabowo di Monas bukan tanpa konteks. Data yang dihimpun dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per Agustus 2025 menunjukkan adanya tren peningkatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mengkhawatirkan.

Sepanjang semester I-2025, tercatat



sekitar 42.385 pekerja terkena PHK. Angka ini meningkat 32,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 32.064 orang. Sektor pengolahan menjadi yang paling terpeleceh dengan catatan 22.671 orang, diikuti oleh perdagangan ritel dan hotel.

Kondisi ini memicu demonstrasi besar-besaran pada 28 Agustus 2025. Saat itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal bahkan menyampaikan enam tuntutan keras di depan Gedung DPR, termasuk penolakan upah murah dan penghapusan outsourcing. Ia menyindir adanya rencana kenaikan upah hanya 3% yang dinilai tidak realistis.

Maka, ketika Presiden Prabowo naik ke panggung Monas delapan bulan kemudian, ia seolah memberikan “jawaban” atas tuntutan tersebut. Pasalnya, euforia politik di atas panggung harus dihadapkan pada realitas di lantai pabrik, ruang kemudi ojek online, dan dapur rumah tangga

nelayan.

Di tengah ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menganga dan biaya hidup yang terus merangkak, Presiden menggelontorkan setidaknya enam paket janji besar. Berikut adalah komitmen tersebut, berdasarkan dokumen resmi dan fakta di lapangan.

Banting Stir Paling Radikal, dari Omnibus Law ke RUU Ketenagakerjaan Protektif

Janji paling fundamental yang dilontarkan Prabowo adalah perintah percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Presiden secara gamblang menginstruksikan Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Hukum untuk menggenjot pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan menargetkan pengesahan tahun ini juga.

Ini adalah sinyal perubahan paradigma yang paling radikal. Selama

beberapa tahun terakhir, kebijakan ketenagakerjaan Indonesia didominasi oleh logika kemudahan berusaha (“ease of doing business”). Beralihnya narasi menjadi “berpihak pada buruh” tentu menggembirakan.

“Saya juga memberi instruksi ke Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Hukum untuk segera nanti bersama DPR RI selesaikan rancangan ketenagakerjaan. Kalau bisa tahun ini juga harus selesai,” ujar Prabowo dengan nada tegas.

Lebih lanjut, Presiden menekankan arah kebijakan dari undang-undang yang akan disusun.

“Undang-undang itu harus berpihak pada kaum buruh. Kita berharap undang-undang kita menjamin keadilan seluruh rakyat Indonesia,” imbuhnya.

Namun, “berpihak” adalah kata kerja yang ambigu. Serikat buruh akan mengawal apakah definisi “berpihak” ini mencakup pengembalian pesangon ke tingkat UU lama, penghapusan



sistem upah harian lepas, atau pembatasan ketat kerja kontrak.

RUU Ketenagakerjaan menjadi penting karena merupakan konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk merevisi atau membuat undang-undang ketenagakerjaan baru yang lebih berpihak pada pekerja.

Tantangan terbesar adalah lobi kuat asosiasi pengusaha yang pasti akan menolak keras jika hak-hak buruh direstorasi secara penuh. Apakah pemerintah memiliki nyali politik untuk menahan gejolak pasar modal akibat revisi radikal ini?

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyampaikan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang telah lama diperjuangkan.

“Kalau tidak salah ini adalah perjuangan lama, perjuangan 22

tahun bahkan selama republik berdiri belum pernah ada Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga,” ujarnya.

Presiden menyoroti kondisi pekerja rumah tangga yang selama ini tidak memiliki kepastian upah dan perlindungan hukum.

“Selama ini pekerja-pekerja rumah tangga entah dibayar upah berapa, tidak jelas. Sekarang pertama kali dalam sejarah NKRI kita sahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga,” tegas Prabowo.

Revolusi Kesejahteraan Ojol: Potongan Hanya 8 Persen, BPJS Menanti

Sektorekonomi informal, khususnya pengemudi ojek online (ojol), selama ini menjadi “anak tiri” dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Di Monas, Prabowo memberikan kado spesial dengan meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Peraturan ini menjadi landasan hukum baru bagi pengemudi ojek online (ojol) dan kurir yang selama ini berstatus mitra.

“Saudara-saudara sekalian, kita juga mengatur, saya telah tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online,” kata Prabowo di hadapan massa yang bersorak.

Isi Perpres ini mengejutkan banyak pihak karena berani “menggusur” skema bagi hasil yang lama. Prabowo memastikan bahwa potongan tarif yang selama ini dikelola oleh perusahaan aplikasi tidak boleh melebihi ambang batas tertentu.

“Dari 80 persen untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi,” ujar Prabowo, bahkan diselingi candaan bahwa



Hans Patuwo

ia tidak setuju dengan potongan 10 persen dan menginginkannya di bawah angka tersebut.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menekankan bahwa para pengemudi transportasi online wajib mendapatkan perlindungan jaminan sosial dari perusahaan aplikasi.

“Harus diberi jaminan kecelakaan kerja, akan diberikan BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Presiden juga menyebutkan adanya kebijakan bonus hari raya bagi para pengemudi dan kurir sebagai bentuk perhatian tambahan kepada para pekerja di sektor ekonomi digital tersebut.

Selang beberapa pekan setelah pidato tersebut, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk secara resmi menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden. Direktur Utama GoTo Hans Patuwo menyampaikan bahwa perseroan siap beradaptasi dengan aturan baru meskipun kebijakan ini berdampak pada pendapatan perusahaan.

“Kekuatan ekosistem ini memberikan fondasi yang kuat bagi Gojek untuk terus bertumbuh. Sekaligus, menjaga keunggulan layanan melalui kekuatan ekosistem dan inovasi yang berkelanjutan,” kata



Hans dalam keterangan resminya pada 20 Mei 2026.

GoTo juga mengumumkan empat langkah strategis sebagai bentuk implementasi kebijakan baru, termasuk penghapusan program langganan GoRide untuk mitra pengemudi yang sebelumnya diuji coba sejak November 2025.

Dari segi angka, janji peningkatan pendapatan menjadi 92 persen adalah “game changer” jika direalisasikan. Selama ini salah satu pemicu demonstrasi ojol adalah tekanan parsial yang terus membesar di tengah kenaikan harga bahan bakar.

Namun, pertanyaan besarnya adalah: Siapa yang membayar jaminan sosial itu? Jika beban BPJS dibebankan sepenuhnya kepada pengemudi (melalui pemotongan lebih lanjut), maka manfaat bersihnya akan berkurang drastis.

Pemerintah harus transparan dalam menunjuk mekanisme pembiayaan—apakah melalui skema subsidi silang

dari aplikator atau APBN. Tanpa mekanisme yang jelas, ini hanya akan menjadi beban administratif baru bagi pengemudi.

Satgas Mitigasi PHK: Tameng atau Sekadar Plakat?

Janji lain yang diumumkan Presiden Prabowo adalah pengesahan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kebijakan ini merupakan respons pemerintah atas meningkatnya gelombang PHK yang melanda berbagai sektor industri dalam setahun terakhir.

“Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh. Yang diancam PHK, kita akan membela dan kita akan melindungi saudara-saudara sekalian,” tegas Presiden dalam pidatonya di Monas, Jumat (1/5/2026).

Kepala Negara menekankan bahwa pemerintah akan selalu memastikan para pekerja tetap terlindungi dalam

kondisi apa pun. Ia menyebut negara akan terus hadir untuk menjamin kesejahteraan mereka, bahkan ketika perusahaan mengalami kesulitan.

“Kalau ada pengusaha yang menyerah, jangan khawatir, negara kita kuat. Negara kita akan mengambil alih, negara kita akan membela rakyat Indonesia, jangan khawatir,” tuturnya dengan nada tegas yang disambut tepuk tangan panjang dari massa.

Sebagai bagian dari kebijakan perlindungan sosial yang lebih luas, Presiden juga mengumumkan alokasi jaring pengaman sosial yang sangat besar.

“Kita juga memberi perlindungan sosial yang sangat besar. Tahun ini kita memberi perlindungan untuk rakyat yang berpenghasilan rendah sebesar Rp500 triliun,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajarannya.

“Saudara-saudara para menteri, kalau ambil kebijakan, kalau menyusun



kebijakan, berpikir, bertanya apakah ini menguntungkan rakyat kecil atau tidak. Kalau menguntungkan rakyat kecil, laksanakan, itu sudah benar, tidak usah ragu-ragu,” tegasnya.

Pembentukan Satgas Mitigasi PHK di momen Hari Buruh Internasional ini dinilai para pengamat sebagai simbol komitmen pemerintah untuk hadir tidak hanya saat ekonomi tumbuh, tetapi juga ketika rakyat menghadapi tekanan akibat pemutusan hubungan kerja.

Sekretaris Kabinet, dalam keterangan terpisah, menjelaskan bahwa satgas ini akan beranggotakan kementerian terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, dan

Kementerian BUMN.

Satgas akan bertugas melakukan intervensi dini terhadap perusahaan yang terancam melakukan PHK massal, memediasi antara pengusaha dan pekerja, serta menyiapkan program pelatihan ulang bagi pekerja yang terkena PHK.

Satgas PHK memang diperlukan sebagai “early warning system”, menengahi hak pesangon, dan memberikan pelatihan ulang (reskilling). Namun, jika orientasinya adalah “pengambilalihan”, maka investor akan berpikir ulang untuk ekspansi di Indonesia.

Satgas ini akan efektif jika fokus pada fungsi mediasi dan penempatan kerja baru, bukan pada retorika

nasionalisasi yang berisiko menggerus iklim investasi.

Daycare di Kawasan Industri untuk Pekerja Perempuan

Janji yang cukup menghebohkan kaum perempuan yang disampaikan Presiden adalah terkait penyediaan fasilitas penitipan anak (daycare) di kawasan-kawasan industri. Aspirasi ini disampaikan langsung oleh perwakilan serikat buruh yang duduk di belakang Presiden saat acara berlangsung.

“Tadi disampaikan bahwa buruh perlu tempat penitipan anak, daycare. Ini saran yang baik, ini akan kita perjuangkan. Ini akan kita laksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya saudara-saudara sekalian,”



kata Prabowo menanggapi aspirasi yang disampaikan kepadanya.

Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah yang hadir dalam acara tersebut sebelumnya menyampaikan langsung usulan ini kepada Presiden. Para pekerja perempuan yang bekerja di pabrik-pabrik kawasan industri seringkali kesulitan mencari tempat penitipan anak yang terjangkau dan terpercaya selama mereka bekerja.

Dalam pidatonya, Prabowo menyebutkan bahwa penyediaan daycare ini akan menjadi bagian dari paket pembangunan kota-kota baru yang direncanakan pemerintah di sekitar kawasan industri. Fasilitas ini akan melengkapi kebutuhan dasar para pekerja yang tinggal di sekitar lokasi kerja mereka.

1 Juta Rumah Subsidi di Dekat Kawasan Industri

Masih terkait dengan kebutuhan dasar pekerja, Presiden Prabowo juga mengumumkan target ambisius pembangunan satu juta rumah subsidi

untuk buruh pada tahun 2026. Rumah-rumah ini akan dibangun dalam klaster-klaster yang berlokasi dekat dengan kawasan industri dan tempat bekerja.

“Tadi juga disampaikan bahwa buruh sangat memerlukan rumah, rumah yang terjangkau. Kita sudah membangun cukup banyak tahun ini, sudah sampai 350 ribu rumah, tapi sasaran kita adalah minimal 1 juta rumah. Kita akan mulai tahun ini juga 1 juta rumah,” katanya.

Prabowo menjelaskan bahwa capaian pembangunan rumah subsidi sebesar 350 ribu unit merupakan hasil kerja pemerintah dalam satu tahun terakhir. Namun, target satu juta rumah menunjukkan percepatan signifikan yang akan dilakukan ke depan.

Yang menarik dari rencana ini adalah konsep pembangunan kota-kota baru yang terintegrasi. Presiden memaparkan visinya tentang hunian pekerja yang tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga berbagai fasilitas pendukung.

“Kita akan bikin kota-kota baru.

Setiap kota mungkin terdiri dari 100 ribu rumah susun. Saya perintahkan harus ada sekolah, harus ada fasilitas olahraga, harus ada daycare, harus ada rumah sakit, dan yang paling penting harus ada transportasi, entah kereta ringan, bus, supaya pekerja bisa masuk ke pekerjaan dengan lancar dan baik,” jelas Prabowo di hadapan massa.

Terkait skema pembiayaan, Presiden juga menyampaikan kebijakan perpanjangan tenor cicilan kepemilikan rumah bagi buruh. Menurutnya, selama ini sekitar 30 persen penghasilan pekerja terkuras untuk biaya kontrak atau sewa tempat tinggal. Ke depan, porsi tersebut akan diarahkan untuk cicilan rumah sendiri.

“Cicilannya bisa 20 tahun. Kalau belum memungkinkan, 25 tahun, 30 tahun, bahkan sampai 40 tahun,” kata Prabowo menjelaskan fleksibilitas jangka waktu cicilan yang akan ditawarkan.

Untuk mendukung mobilitas pekerja dari rumah ke tempat kerja, pemerintah juga akan menyediakan kartu khusus bagi buruh yang memberikan akses transportasi umum dengan harga yang sangat ringan. Mengenai kemungkinan transportasi gratis, Prabowo sempat berkelakar menanggapi tuntutan buruh.

“Dan saudara-saudara, kita akan coba bahwa nanti buruh yang diberi kartu bisa naik transport dengan harganya sangat ringan, maunya gratis semua itu. Ini lo punya pemimpin di belakang gue itu maunya gratis semua,” ujar Prabowo sambil tertawa, disambut gelak tawa massa yang hadir.

Ratifikasi ILO 188 untuk Nelayan

Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus kepada kaum nelayan yang hadir dalam perayaan May Day. Ia mengumumkan telah menandatangani Peraturan Presiden

Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan.

“Saudara-saudara sekalian, ada satu lagi hadiah untuk buruh. Saya juga baru saja tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi konvensi International Labour Organization Nomor 188 untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan,” kata Prabowo.

Selain ratifikasi konvensi internasional, pemerintah juga akan meresmikan 1.386 kampung nelayan pada tahun ini. Program ini akan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya dengan target tambahan 1.500 kampung nelayan setiap tahunnya.

“Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia nelayan diurus. Tahun depan kita akan buka 1.500 kampung nelayan, tahun depannya lagi 1.500, tahun depannya lagi 1.500,” ujar Prabowo.

Presiden menjelaskan program bantuan konkret yang akan diberikan, termasuk pembangunan pabrik es di setiap kampung nelayan untuk membantu pengawetan hasil tangkapan ikan, serta bantuan kapal-kapal untuk nelayan. Total nelayan yang akan mendapat perbaikan hidup diperkirakan mencapai 6 juta orang, yang jika ditambah dengan anggota keluarga mencapai lebih dari 20 juta jiwa.

“Selama ini mereka susah, mereka melaut tanpa es. Sekarang kita bikin pabrik es di tiap kampung nelayan. Kita juga akan bantu kapal-kapal untuk mereka,” jelas Prabowo disambut tepuk tangan dari massa buruh dan nelayan yang hadir.

Nama Marsinah Digaungkan di Monas

Didepan para buruh, Presiden Prabowo mengumumkan akan segera meresmikan Museum Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

“Kita telah mengangkat Ibu Marsinah sebagai pahlawan nasional. Bulan ini juga saya akan berangkat ke Desa Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur, untuk meresmikan perjuangan buruh yang diberi nama Museum Marsinah,” kata Prabowo dalam pidatonya.

Marsinah adalah seorang aktivis buruh PT Catur Putra Surya (CPS) Sidoarjo yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan pada masa Orde Baru tahun 1993. Ia berjuang menuntut kenaikan upah bagi pekerja pabrik tempatnya bekerja.

Pengangkatannya sebagai pahlawan nasional dan pembangunan museum untuk mengenangnya merupakan pengakuan negara terhadap perjuangan buruh selama ini.

Klaim Prabowo

Pidato Presiden Prabowo yang sarat dengan janji-janji kebijakan mendapat sambutan antusias dari para pemimpin serikat buruh yang hadir. Di belakang panggung, para petinggi konfederasi buruh seperti Elly Rosita Silaban (Presiden KSBSI), Said Iqbal (Presiden KSPI), dan Andi Gani Nena Wea (Presiden KSPSI) terlihat tersenyum dan bertepuk tangan saat mendengar pengumuman demi pengumuman dari Presiden.

Menteri Lingkungan Hidup Juhar Hidayat, yang juga merupakan aktivis buruh senior, juga turut hadir di panggung kehormatan. Kehadiran tokoh-tokoh buruh di kabinet dan dalam acara resmi kenegaraan ini menunjukkan perubahan signifikan dalam hubungan antara pemerintah dan gerakan buruh di Indonesia.

Perayaan May Day 2026 berlangsung relatif tertib dan lancar. Ratusan ribu buruh yang datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa mulai memenuhi kawasan Monas sejak pukul 06.00 WIB. Mereka datang menggunakan ratusan bus yang telah disiapkan oleh masing-masing serikat pekerja.

Sepanjang acara berlangsung, tampak spanduk dan atribut dari berbagai serikat pekerja dan konfederasi, mulai dari KSPI, KSPSI, KSBSI, hingga federasi-federasi sektoral seperti Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FSP TSK) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

“Saya kira dalam satu tahun ini saudara-saudara bisa menilai kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah yang saya pimpin adalah kebijakan-kebijakan yang membela seluruh rakyat Indonesia, terutama kaum buruh,” ucap Prabowo di akhir pidatonya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Presiden kembali menyampaikan terima kasih atas undangan untuk hadir dalam acara buruh.

“Saya ucapkan terima kasih atas undangan kepada saya untuk hadir hari ini bersama kalian. Ini kehormatan bagi saya,” tutupnya disambut tepuk tangan meriah dari ratusan ribu buruh yang memenuhi kawasan Monas.

Pidato Presiden yang berlangsung sekitar 45 menit itu diakhiri dengan yel-yel “Hidup Buruh Indonesia” yang dipimpin langsung oleh Prabowo dari atas panggung. Massa membalas dengan semangat, mengakhiri peringatan Hari Buruh tahun 2026 yang akan dikenang sebagai salah satu yang paling bersejarah dalam gerakan buruh Indonesia.

6 JANJI HARI BURUH PRABOWO

- 1 Janji Mitra Ojol Dapat Fee 92%
- 2 Janji Bentuk Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh
- 3 Rumah Subsidi bagi Buruh dengan Kawasan Industri
- 4 Kredit Rakyat Bunga 5%
- 5 Nelayan Sejahtera
- 6 RUU Ketenagakerjaan Rampung Tahun Ini





24 Jam Siap Melayani, Setor Tarik Nyaman Setiap Hari

Transaksi di Mandiri ATM
Kapan pun & di Mana pun Pakai Kartu atau Livin'

Info: bmri.id/ATMSetorTarik

 Livin' Call by Mandiri |  mandiri call 14000 |  MITA 081 1841 4000 | bankmandiri.co.id

Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS

ALERGI KRITIK:

DEMOKRASI RASA OTORITARIANISME

Kritik terhadap pemerintah dianggap ancaman. Presiden Prabowo pun mengejek pihak yang mengkritisi pemerintah dengan kata “Nyinyir” dan disebut sebagai antek-antek asing.

Situasi politik nasional di masa rezim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memanas. Pemerintah yang lahir dari hasil pemilu yang masih dipersoalkan karena diduga terjadi pelanggaran konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden terus menuai kontroversi. Sehingga sepanjang jalannya pemerintahan Prabowo Subianto kritik terus membanjiri baik di ruang digital maupun di ruang nyata.

Masyarakat, mahasiswa, akademisi dan sejumlah elemen masyarakat berbicara lantang mengkritisi jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran yang mereka nilai sudah salah jalan. Kritik yang mereka sampaikan bukan datang dari ruang aspirasi yang kosong; namun berdasar dari berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sejalan dengan kehendak rakyat, misalnya program Makan Bergizi Gratis dan program Koperasi Merah Putih yang dinilai sebagai program yang bermasalah dan rentan dengan



praktik korupsi. Dan kekhawatiran publik pun langsung terbukti dengan ditangkapnya sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) yang diduga melakukan praktik korupsi pada program tersebut.

Selain itu, Revisi UU Polri yang dinilai bermasalah karena akan menjadi ancaman terhadap supremasi sipil, hingga potensi tumpang tindih kewenangan dengan instansi penegak hukum lainnya. Revisi Undang-Undang TNI juga dipersolkan oleh masyarakat

sipil sebab hadirnya UU tersebut memicu kekhawatiran kembalinya dwifungsi militer dan pelemahan supremasi sipil, dan dalam proses pembahasannya juga dinilai minim partisipasi publik.

Program-program ambius pemerintah seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih pun dinilai sebagai pemicu lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang tembus hingga Rp.18.000/dolar AS. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik, pemerintah



pun memutuskan menaikkan harga BBM non subsidi seperti jenis Pertamina hingga Rp.16.250 per liter.

Merespon kebijakan tersebut, mahasiswa di sejumlah daerah menggelar aksi unjuk rasa dengan menyampaikan sejumlah tuntutan diantaranya penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penghentian pemborosan APBN, serta stabilisasi ekonomi dan nilai tukar rupiah.

Mahasiswa juga mendesak evaluasi menteri ekonomi dan menuntut penolakan terhadap gelombang PHK serta kenaikan harga kebutuhan pokok.

Respons Prabowo terhadap kritik

Secara tegas Presiden Prabowo

menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokratis, sehingga pemerintahannya sangat terbuka terhadap kritik. Dan dirinya akan menelaah kritik tersebut dengan seksama demi perbaikan bangsa.

“Izinkan saya menyatakan dengan jelas: Indonesia adalah negara demokrasi, dan akan tetap menjadi demokrasi. Saya dipilih oleh lebih dari 90 juta rakyat Indonesia dalam pemilu yang bebas dan adil,” kata Prabowo dalam pernyataannya di Majalah The Economist, dikutip keterangan Badan Komunikasi Pemerintah, Jumat (12/6/2026).

Namun, Prabowo mengingatkan dalam menjalankan demokrasi perlu disesuaikan dengan budaya di

Indonesia. Dalam budaya Indonesia, kerja sama lebih diutamakan daripada fragmentasi politik, kerendahan hati lebih dihargai daripada permusuhan politik. “Kami percaya demokrasi harus menghasilkan stabilitas, dan kemajuan, bukan kelumpuhan,” ujarnya menambahkan.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya akan menjawab kritik dengan hasil nyata, bukan dengan retorika.

Meski menyatakan bahwa dirinya terbuka terhadap kritik. Namun, diberbagai kesempatan Prabowo menunjukkan sikap yang alergi terhadap kritik. Misalnya pada acara Penen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat



pada Rabu 7 Januari 2026, Presiden Prabowo merasa kesal terhadap pihak yang suka melontarkan kritik terhadap pemerintahannya.

Prabowo menyebut mereka kelompok Nyinyir yang hanya melihat keburukan pemerintah. Prabowo merasa heran kepada kelompok tersebut yang kepintarannya hanya digunakan untuk menjelek-jelekan pemerintah. Bahkan dia menduga kelompok yang kritis terhadap pemerintahannya mendapatkan bayaran.

“Selalu ngenyek, ini aneh ya, aneh ini kesehatan jiwa mereka mereka itu agak aneh. Saya sendiri bingung tapi biarlah, enggak ada urusan, saya kira sedikit mereka itu. Mereka pintar hanya di sosmed, enggak jelas juga itu, jangan -jangan mereka dibayar,” ujar Prabowo.

Dan Prabowo mengajak seluruh jajaran di pemerintahannya tidak perlu

pusing terhadap kelompok nyinyir itu. Lebih baik, fokus bekerja untuk rakyat.

Sikap alergi terhadap kritik juga kembali disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia menuding kelompok yang kritis terhadap pemerintahannya adalah antek-antek asing. Dia juga menyebut kelompok tersebut berkeinginan untuk terus menciptakan demo atau unjuk rasa di tanah air. Akan tetapi, menurut Prabowo, tujuan utamanya bukanlah demo melainkan kerusakan yang terjadi setelahnya.

“Demo boleh, tapi dia tidak berharap demo, dia berharap kerusakan. Kerusakan itu mencelakakan bangsa dan negara,”katanya saat Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

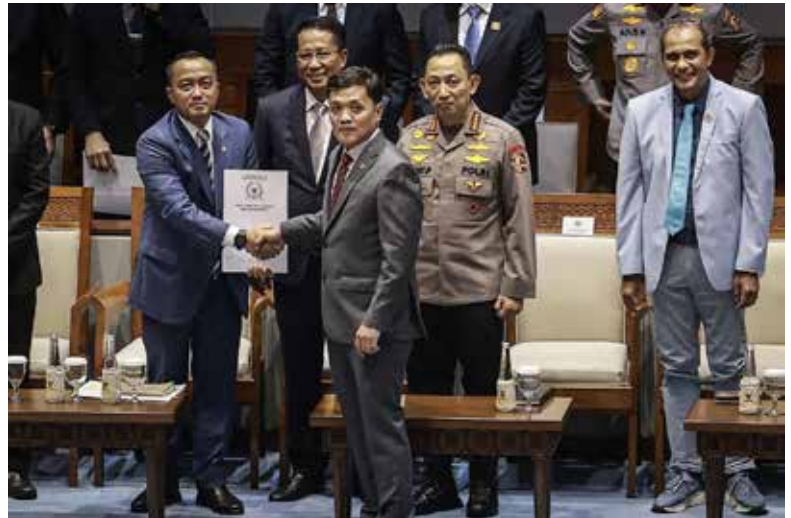
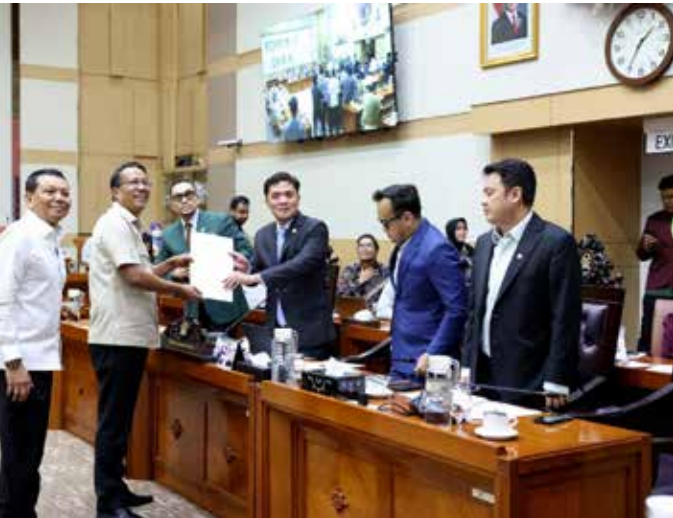
Meski tidak menyebutkan detail, Prabowo mengklaim kelompok-kelompok itu sedari awal sudah

mengetahui jika mereka dibantu atau didukung oleh kekuatan asing untuk membuat kekacauan di Indonesia.

Oleh sebab itu, ia mengimbau agar seluruh upaya memecah belah bangsa dapat dihentikan karena masyarakat yang justru menjadi korban akibat aksi tersebut.

“Jadi kelompok-kelompok ini, sadar atau tidak sadar, saya yakin mereka dikendalikan oleh kekuatan asing. Yakin saya, yakin saya, dan saya punya bukti,” klaimnya.

Respon pemerintah yang alergi terhadap kritik juga nampak saat penanganan aksi demonstrasi mahasiswa baru-baru ini, yakni dengan menerjunkan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengamankan demonstrasi yang digelar oleh ratusan mahasiswa di kawasan Sudirman, Jakarta. Mereka bergabung bersama kepolisian untuk menghadang laju massa aksi. Personel



TNI berada di lapis kedua pengamanan demonstrasi.

Para prajurit tersebut juga sempat terlibat aksi saling dorong dengan massa aksi yang mencoba menerobos barikade. Para prajurit TNI juga terlihat mencoba memukul balik massa yang menuju kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) untuk mundur kembali ke arah Semanggi.

Kehadiran pasukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dalam unjuk rasa mahasiswa di sekitar Bundaran HI, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat memicu sejumlah pertanyaan. Massa mengaku

kaget saat mendapati ada banyak tentara yang ikut berjaga di titik aksi, Jumat (12/6/2026) sore.

Salah satu peserta aksi, Gifar (20), mengaku baru kali ini melihat adanya banyak personel TNI AD yang ikut berjaga. Menurutnya kehadiran personel militer dalam aksi unjuk rasa merupakan kejanggalan yang patut dipertanyakan.

Pasalnya, menurutnya tidak ada regulasi yang menjelaskan bahwa tugas pokok TNI adalah menjaga demonstrasi masyarakat sipil.

“Kalau kita lihat bahkan dari RUU TNI sendiri setahu saya tidak ada tupoksi mereka itu jagain demo. Mereka itu fungsinya pertahanan, bukan keamanan,” ucapnya seperti dikutip *Kompas.com*.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik pengerahan TNI dalam mengawal demonstrasi mahasiswa di sejumlah titik di Jakarta pada Jumat, 12 Juni 2026. Mereka menilai langkah tersebut keliru, tidak sesuai prinsip demokrasi, dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

Koalisi ini terdiri dari sejumlah

organisasi, di antaranya Imparsial, Amnesty International Indonesia, Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, KontraS, Dejure, Indonesia Risk Center, serta berbagai organisasi masyarakat lainnya.

Koalisi menyebut penanganan unjuk rasa merupakan ranah aparat keamanan sipil, terutama Kepolisian Republik Indonesia.

“Mobilisasi militer seharusnya hanya menjadi opsi terakhir ketika seluruh aparat sipil sudah tidak mampu mengendalikan situasi yang ada,” demikian bunyi pernyataan bersama.

Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Piga menilai bahwa pelibatan TNI dalam pengamanan aksi demonstrasi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Termasuk, menurut dia, tindakan pengadangan massa aksi yang dilakukan aparat keamanan bersama aparat pertahanan negara itu.

Dia menjelaskan, pengadangan yang dilakukan agar mahasiswa tidak melakukan demonstrasi di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia sejalan dengan Peraturan Gubernur



Natalius Piga



Jakarta Nomor 232 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka.

“Soal demonstrasi di area bisnis dan lalu lintas itu ada aturannya. Tidak ada yang dilanggar oleh aparat terkait pengadangan,” kata Pigai dikutip *Tempo.co*.

Dia menyatakan mendukung tindakan mahasiswa yang melakukan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Namun, dalam kegiatan tersebut penting juga untuk diketahui, ihwal diperbolehkannya aparat melakukan tindakan pembatasan.

Menurut Pigai, dalam konteks HAM, terdapat Prinsip Sirakusa yang memberikan aparat wewenang untuk melakukan pembatasan dengan

pertimbangan tertentu, misalnya, Kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang merupakan epicentrum bisnis dan lalu lintas.

Dalam prinsip tersebut, kata dia, baik demonstran maupun aparat yang bertugas memiliki masing-masing tanggung jawab untuk saling menghormati hak sipil lainnya, salah satunya ketertiban umum.

“Jadi, sudah sesuai dengan prinsip HAM Sirakusa, bahwa tidak bisa demonstrasi di titik ini, hanya bisa di titik lain dengan pertimbangan kemacetan lalu lintas atau strategis lainnya. Tapi, saya mengapresiasi mahasiswa karena terus menyuarakan hak masyarakat,” ujar mantan Komisioner Komnas HAM ini.

Menekan suara kritis

Narasi-narasi yang disampaikan Presiden Prabowo dalam merespon pihak yang mengkritisi pemerintahannya memperlihatkan pemerintah saat ini alergi terhadap kritik. Pernyataan Presiden Prabowo yang terbuka terhadap kritik hanya gimik untuk menutupi sikap otoriter dari pemerintah itu sendiri.

Seperti yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid Prabowo memiliki sikap yang cenderung memusuhi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), demokrasi, dan kebebasan pers. Tudingan Presiden Prabowo terhadap kelompok yang kritis sebagai antek-antek asing merupakan strategi dia untuk menekan suara kritis



yang disampaikan oleh masyarakat.

Menurutnya, sikap pemerintah yang sering kali memojokkan pengamat, aktivis, hingga akademisi merupakan sinyal kuat bahwa penguasa tidak memiliki komitmen yang kuat dalam merawat nilai-nilai kebebasan berpendapat. Padahal, nilai inilah yang menjadi roh dalam sistem demokrasi.

“Saya kira sejak dari awal Prabowo menjadi presiden, sikap-sikapnya jelas cenderung memusuhi hak asasi manusia, demokrasi, dan kebebasan pers. Tiga bidang itulah yang secara eksplisit kerap ia keluhkan dan kerap ia tuding sebagai agenda yang kental dengan kepentingan asing,” ujar Usman seperti dikutip *MediaIndonesia.com*, (21/4/2026).

Dia menilai tuduhan-tuduhan Presiden Prabowo tersebut merupakan sebuah pola yang sistematis. Ia mencatat Presiden Prabowo melontarkan pernyataan berulang soal meragukan integritas suara kritis dari aktivis atau pengamat.

“Ia menuding kembali bahwa suara-suara kritis itu, pengamat, aktivis, akademisi tidak memiliki motif yang murni, melainkan motif yang dikendalikan oleh motif-motif



Usman Hamid Prabowo

finansial, oleh kepentingan asing, dan seterusnya,” ungkap Usman.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pola pernyataan ini menjadi landasan bagi unsur negara di tingkat bawah untuk bertindak represif terhadap mereka yang kritis. Usman mengaitkan hal ini dengan sejumlah serangan terhadap jurnalis, aktivis, dan pegiat lingkungan yang dianggap sebagai kelanjutan dari kebijakan verbal pemerintah.

“Dengan kata lain, memang ada serangan-serangan predatoris di tingkat bawah yang merupakan kelanjutan dari kebijakan yang ditempuh melalui pernyataan-

pernyataan yang berulang. Jadi policy itu menjadi semacam unsur sistematis dari sebuah pelanggaran hak asasi manusia ketika ia datang dari praktik yang berulang, pernyataan yang berulang,” tegasnya.

Salah satu poin krusial yang disorot Usman adalah potensi pembenaran atas penyerangan air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus. Dengan label antek asing terhadap aktivis, pihak yang melakukan serangan kepada Andrie Yunus merasa sedang menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara.

“Bisa saja serangan terhadap Andrie itu dibenarkan sebenarnya, karena Andrie dianggap sebagai antek asing yang mengkhianati kedaulatan Indonesia, mengkhianati Indonesia, sehingga yang menyerang Andry adalah penjaga kedaulatan Indonesia, dalam hal ini tentara, khususnya Badan Intelijen Strategis,” ujarnya.

Pola yang dilakukan Presiden Prabowo juga pernah dilakukan pada masa Orde Baru. Presiden Suharto kerap menuduh mahasiswa, aktivis buruh, hingga kelompok masyarakat sipil sebagai alat kekuatan asing yang ingin “mengganggu stabilitas nasional”. Tujuannya adalah menekan oposisi serta mencegah munculnya perlawanan terhadap pemerintah.

Di Papua, protes menuntut keadilan sosial juga sering disamakan dengan “agenda asing” atau campur tangan LSM internasional. Bahkan sampai dituduh makar dan pemberontakan.

LSM pro- lingkungan kerap dilabeli “antek asing”. Protes buruh dianggap didukung “kekuatan asing”, seperti yang terjadi saat demo UU Cipta Kerja tahun 2020. Intinya, siapa pun yang menggugat kebijakan negara mudah sekali diseret oleh pemerintah dalam tuduhan konspirasi global.



MEMBACA SAFARI POLITIK JOKOWI:

EFEKTIFKAH DONGRAK ELEKTABILITAS GIBRAN DAN PSI?

Ruang politik di Indonesia hingga saat ini tidak bisa terlepas dari pengaruh Presiden RI ke-7 Joko Widodo/ Jokowi. Meski, dia tidak lagi menjabat, namun setiap langkah-langkahnya selalu diperhitungkan baik oleh lawan maupun kawan.

Sikap Jokowi yang terlihat sangat aktif dalam urusan politik kekuasaan di negeri ini tidak bisa terlepas dari upaya dirinya untuk membangun dinasti keluarganya. Jokowi berupaya memastikan anak-anaknya tetap masuk dalam lingkaran kekuasaan.

Setelah berhasil menghantarkan Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo, Jokowi juga kembali ingin memastikan Gibran tetap aman Pada Pemilu 2029 baik sebagai Capres atau Cawapres. Hal yang sama juga Jokowi lakukan untuk memastikan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep berhasil memasukan wakil-wakilnya di gedung parlemen.

Langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, Jokowi bahkan menyatakan siap turun gunung dengan melakukan safari keliling Indonesia untuk menyapa masyarakat. Jokowi masih memiliki keyakinan bahwa dirinya masih memiliki pengaruh yang kuat untuk mendongkrak elektabilitas Gibran dan PSI pada Pemilu 2029 nanti.

Jokowi sangat sadar Gibran dan PSI dalam kondisi tidak aman. Jika membaca hasil survei terbaru yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia, elektabilitas PSI belum mengalami peningkatan signifikan. PSI menempati posisi ke-10 dengan elektabilitas sebesar 1,2 persen. Angka tersebut menurun dibandingkan perolehan suara PSI pada Pemilu Legislatif 2024

yang mencapai 3,5 persen.

Safari Politik Jokowi untuk Gibran atau PSI?

Keinginan melakukan safari politik jauh-jauh hari pernah Jokowi ungkapkan saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, 31 Januari 2026.

Pada kesempatan tersebut dihadapan kader PSI seluruh Indonesia, Jokowi berkomitmen akan membantu PSI hingga menjadi partai besar. Untuk mencapai tujuan tersebut ayah dari Kaesang Pangarep ini secara tegas menyatakan akan bekerja mati-matian untuk memenangkan PSI. Bahkan, jika dibutuhkan Jokowi bersedia turun gunung ke seluruh provinsi di Indonesia.

“Saya masih sanggup datang ke semua provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten/ kota. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Saudara-saudara bekerja keras untuk PSI, saya pun akan bekerja keras untuk PSI, Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI,” kata Jokowi.

Dan agenda safari keliling Indonesia akhirnya akan dilakukan oleh Jokowi pada awal Juni 2026 setelah pulih dari kesehatannya. Seperti disampaikan oleh Ketua DPP PSI Bidang Politik, Bestari Barus bahwa safari politik Jokowi akan dilamulai dengan mengunjungi tiga provinsi yakni Lampung, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Jawa Barat.

Menurutnya kunjungan tersebut disebut sebagai pembuka dari agenda yang akan berlangsung di berbagai daerah lain sepanjang Juni 2026. Dia mengatakan bahwa agenda tersebut

tidak hanya melibatkan kader PSI, tetapi juga relawan serta tokoh masyarakat yang memiliki kedekatan dengan Jokowi.

“Diutamakan PSI, tetapi ada juga relawan di daerah dan kelompok tokoh masyarakat yang memiliki akses kepada Pak Jokowi serta mengundangnya,” ujar Bestari.

Bestari membantah bahwa agenda kunjungan Jokowi ini sebagai kampanye politik. Menurutnya agenda ini murni untuk menyapa masyarakat. Hal ini wajar dilakukan karena Jokowi pernah menjabat presiden dua periode sehingga masih memiliki kedekatan dengan masyarakat.

Namun, publik membaca bahwa agenda safari Jokowi merupakan manuver politik menuju Pemilu 2029. Dan publik membaca agenda tersebut tidak sekadar murni menyapa masyarakat, namun ada agenda politik kekuasaan, yakni apakah untuk menyelamatkan Gibran atau PSI?. Bahkan juga untuk menyelamatkan keduanya.

Menurut analisis politik dari Citra Institute, Efriza langkah safari politik yang dilakukan oleh Jokowi lebih dominan untuk menyelamatkan posisi Gibran agar tetap aman. Dalam safari ini Jokowi akan membaca seberapa besar peluang yang dimiliki oleh Gibran Rakabuming Raka untuk kembali dipasangkan sebagai calon presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2029.

“Jika dicermati, Jokowi kemungkinan akan menyerap informasi dari masyarakat mengenai penilaian terhadap Prabowo sebagai presiden dan Gibran sebagai wakil presiden. Dari situ dapat terlihat apakah keduanya masih memiliki peluang untuk melanjutkan duet kepemimpinan selama dua periode,”



kata Efriza dikutip dari laman *Alinea.id*.

Dia pun menilai safari politik yang dilakukan Jokowi membuat kondisi politik semakin memanas. Sebab, manuver Jokowi ini pasti akan mendapatkan respon dari elit politik yang lain yakni mempercepat konsolidasi dan memanaskan mesin politik masing-masing.

Langkah ini penting untuk dilakukan yakni untuk menjaga soliditas internal partai sekaligus mengantisipasi pergeseran dukungan pemilih.

“Politik menuju Pemilu 2029 datang lebih awal. Kemungkinan akan muncul safari politik dari elite partai lain maupun konsolidasi ke daerah-daerah untuk memantau pergerakan politik yang dilakukan Jokowi dan PSI,”

ujarnya.

Dia mengingatkan manuver politik yang dilakukan Jokowi ini bisa merugikan pemerintahan Presiden Prabowo. Sebab, dinamika politik yang terlalu dini membuat elite politik lebih memberikan perhatian lebih bagaimana untuk mengamankan posisi masing-masing pada Pemilu 2029. Mereka akan lebih sibuk berfikir untuk Pemilu 2029 bukan malah mencurahkan perhatiannya dalam mensukseskan agenda pemerintahan.

Sebab, melihat dari gestur masing-masing partai politik mereka juga sedang berebut perhatian untuk bisa menjadi pendamping Prabowo pada Pilpres 2029. Manuver Jokowi ini membuat elit semakin hati-hati.

“Elite politik akan berusaha mencari peluang menjadi pendamping Prabowo sambil mengamati manuver Jokowi. Kondisi ini dapat membuat suasana politik nasional semakin memanas dan perang pernyataan antaraktor politik makin intens,”ujarnya.

Manuver Jokowi ini, menurutnya akan mendapat perhatian lebih dari PDI Perjuangan. Dia membaca PDI Perjuangan akan menyusun langkah untuk mengantisipasi manuver Jokowi ini. Sebab, antara kedua partai ini basis pemilihnya memiliki irisan yang cukup besar.

“Kecenderungan terbesar adalah Jokowi dan PSI memang menargetkan suara simpatisan maupun kader PDIP. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri

bagi PDIP,” ujarnya.

Sementara itu pengamat politik dari Universitas Terbuka, Insan Praditya membaca bahwa safari politik Jokowi lebih kuat diarahkan untuk memperkuat citra PSI dan Gibran sebagai kekuatan politik yang mandiri.

Insan membaca Jokowi akan memanfaatkan narasi-narasi yang menganggap bahwa Presiden Prabowo kurang cakap dalam menjalankan amanatnya sebagai kepala negara. Misalnya, dia memainkan isu tentang kondisi ekonomi yang semakin melemah.

Disaat rakyat tidak puas dengan Presiden Prabowo, Jokowi akan memanfaatkan momentum tersebut membangun narasi bahwa Gibran adalah sosok yang tepat untuk Indonesia.

Pastinya narasi yang dibangun adalah keberlanjutan dari Jokowi. Sehingga Gibran akan dipoles seindah mungkin agar masyarakat percaya. Sehingga, Gibran memiliki peluang besar untuk memenangkan Pilpres 2029 mendatang.

“Saya melihat PSI dan Jokowi dapat memanfaatkan momentum ini dengan mengangkat keberhasilan era Jokowi yang tidak dimiliki era Prabowo. Jokowi tampaknya lebih fokus memoles sosok Gibran untuk membawa narasi pembangunan dan maju sebagai calon presiden,” katanya.

Gibran dan PSI belum aman

Sementara itu Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya membaca manuver politik yang dilakukan Jokowi ini mempertegas keyakinan publik bahwa posisi Gibran dan PSI dalam kondisi tidak aman untuk bertarung di Pilpres 2029.

Yunarto membaca bahwa setiap pergerakan yang dilakukan Jokowi

pasti didasari dengan perhitungan. Berdasarkan perhitungan tersebut Jokowi memang harus turun gunung.

Menurutnya Jokowi menyadari sebuah fakta bahwa kekuatan PSI kini masih jauh lebih kecil ketimbang dirinya. PSI masih sangat bergantung pada nama besar dirinya sebagai eks Presiden RI.

Di sisi lain, Gibran Rakabuming yang kini menjadi Wakil Presiden; serta nama putra bungsungnya, Kaesang Pangarep yang kini menjadi Ketua Umum PSI, tidak cukup menjadi magnet elektoral demi mengangkat nama PSI.

“Itu yang menyebabkan uji coba sudah dilakukan dengan menjadikan Kaesang Ketua Umum, lalu kemudian juga Gibran sebagai Wakil Presiden melakukan banyak kegiatan juga di daerah, tapi ternyata tidak berkorelasi dengan peningkatan suara PSI,” kata Yunarto seperti dikutip *Kompas.com*.

Selain itu, manuver Jokowi ini mempertegas dirinya sebagai tokoh politik yang memiliki pengaruh yang besar. Dan masih ingin dianggap sebagai “king maker”.

Jokowi masih ingin seperti dahulu yang berhasil menjadi “king maker” dengan memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. *Bargaining power* ini, lanjut Yunarto, tidak lain untuk memperkuat posisi Gibran pada Pemilu 2029.

“Gibran misalnya ingin menjadi wapres kembali sebagai plan A, atau plan B andai kata Gibran tidak diangkat lagi oleh Prabowo menjadi cawapres atau wapres di periode kedua, tentu saja mereka harus punya plan B atau plan C, entah menjadikan Gibran sebagai capres atau menjadikan Gibran cawapres dari sosok yang lain,” jelasnya.

Pada titik itulah, keberadaan Jokowi harus kuat. Ketika Jokowi masih

menjadi magnet elektoral untuk banyak segmen masyarakat, posisi Gibran pun akan memiliki kekuatan untuk dapat berkoalisi dengan siapapun selain Prabowo.

“Pada titik itu keberadaan Jokowi sebagai king maker kan harus dikuatkan,” katanya.

Jokowi cari selamat

Analisis yang berbeda diungkapkan oleh pengamat politik Hendri Satrio. Menurutnya langkah Jokowi melakukan safari berkeliling ke berbagai daerah bukan semata untuk kepentingan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep. Menurutnya manuver politik yang dilakukan Jokowi merupakan bagian dari upayanya untuk mencari keselamatan dirinya serta keluarga di masa depan.

Sebab, Jokowi dan keluarga dihadapkan sejumlah kasus besar. Seperti kasus dugaan ijazah palsu dan dugaan keterlibatan Jokowi dalam sejumlah kasus-kasus korupsi selama dia menjabat sebagai Presiden.

“Jadi Jokowi itu turun gunung, bukan semata-mata mempromosikan Gibran, PSI atau Kaesang. Tapi dia sedang dalam misi mencari selamat, misi keselamatan untuk siapa? Untuk dirinya dan keluarganya,” katanya, Rabu, 3 Juni 2026.

Selain itu, Jokowi turun gunung karena faktor ketidakpastian politik pada Pemilu 2029. Sehingga dia perlu menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi ketidakpastian tersebut. Dia sangat cemas jika kepemimpinan nasional ke depan tidak sejalan dengan dirinya. Nasib dirinya dan keluarga akan dipertaruhkan.

“Dia harus jaga-jaga kalau 2029



Presidennya bukan Prabowo dan anaknya tidak berhasil menjadi Wakil Presiden Prabowo atau anaknya tidak berhasil menjadi Presiden, maka keselamatan dia dan keluarganya bisa terancam,” ujar Founder Lembaga Survei KedaiKOPI ini.

Selanjutnya dia menilai bahwa potensi tekanan politik dapat muncul apabila pemerintahan berikutnya mengambil posisi berseberangan dengan Jokowi. Bahkan, menurutnya, tidak ada jaminan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan tetap berada dalam garis politik yang sama dengan Jokowi di masa mendatang.

“Jokowi belum bisa menjamin Prabowo tidak akan menjadi oposisi dirinya nantinya di 2029,” katanya.

Dia pun melihat bahwa langkah Jokowi saat ini juga bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan pengaruh politik

sekaligus menjaga stabilitas bagi dirinya dan keluarga. Ia mencontohkan peran Jokowi dalam Pilpres 2024. Menurutnya, Jokowi berhasil mengamankan posisi politik keluarga melalui dukungannya kepada Prabowo Subianto serta mendorong putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi wakil presiden.

“Dia sudah berhasil di 2024 menyelamatkan keluarganya melalui dukungan kepada Prabowo dan mendorong Gibran sebagai wakil presiden. Tetapi 2029 bisa saja berubah, sehingga dia harus kembali mencari langkah aman,” ujarnya.

PDIP: Paling bagi-bagi sembako

Rencana Jokowi akan keliling Indonesia sekaligus mengunjungi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di sejumlah daerah pada Juni mendatang

ditanggapi dengan santai oleh PDI Perjuangan.

Menurutnya Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira safari politik Jokowi tidak akan memberikan dampak sedikit pun bagi PDI Perjuangan. Ada dan tidak adanya Jokowi, PDI Perjuangan tetap menjadi partai besar.

Bahkan, dia menyinggung polemik ijazah Jokowi yang hingga kini masih menjadi perhatian publik. Menurut Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini, sebaiknya saat safari Jokowi membawa ijazahnya dan ditunjukkan kepada masyarakat. Sebab, hingga saat ini kasus dugaan ijazah palsu masih menjadi tanda tanya.

“Baiknya Jokowi turun ke masyarakat sambil bawa ijazahnya. Karena sampai sekarang kasus ijazah ini menyita waktu dan perhatian masyarakat, tapi tidak jelas



penyelesaiannya,” ujarnya seperti dikutip Kumparan.com, Jumat (29/5).

Menurutnya, masyarakat bahkan sampai saat ini ikut mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. “Masyarakat ikut bertanya, apakah ijazah Jokowi asli atau palsu?” katanya.

Respon yang sama juga disampaikan oleh juru bicara PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli. Menurutnya agenda safari Jokowi tidak akan berdampak terhadap elektabilitas maupun kekuatan politik PDIP. Pasalnya, Jokowi sudah tidak lagi memiliki pengaruh terhadap PDIP setelah dipecat dari partai tersebut.

“Sebenarnya saya tidak etis mengomentari partai lain, tapi kalau ditanya apa Jokowi jalan-jalan itu akan pengaruh terhadap PDI Perjuangan, saya bisa jawab saya sangat yakin tidak ada pengaruh sama sekali,” kata

Guntur.

“Jokowi itu sudah dipecat dari PDI Perjuangan secara tidak terhormat. Termasuk Gibran dan Bobby. Masyarakat sudah tahu. Alasannya juga karena pelanggaran terhadap konstitusi dan pengkhianatan pada perjuangan partai,” ujarnya menambahkan.

Dia menilai bahwa safari politik Jokowi juga tidak bisa membesarkan PSI. Hal tersebut sudah terbukti saat Jokowi masih menjabat Presiden saja tidak mampu meloloskan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke parlemen. Padahal, PSI sudah habis-habisan menyatakan diri sebagai partainya Jokowi.

“Secara logika sederhana saja, waktu Jokowi jadi Presiden tidak mampu meloloskan PSI ke Parlemen, apalagi sekarang tidak jadi apa-apa,” tegasnya.

Sehingga dia membaca, agenda Jokowi keliling Indonesia tidak akan memberikan efek elektoral baik bagi PSI maupun Gibran. Menurutnya, Jokowi keliling hanya membagi-bagikan sembako saja.

“Paling dia keliling Indonesia cuma bagi-bagi sembako dan amplop saja. Buat konten di medsos dia saja itu,” tambah dia.

Secara tegas dia menyatakan bahwa PDIP tidak khawatir dengan agenda kunjungan Jokowi ke berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya agenda safari ini hanya sekadar jalan-jalan dan tidak akan memberikan dampak apapun bagi PDIP.

“Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Jokowi jalan-jalan ke seluruh pelosok Indonesia. Kita bisa menyaksikan drama sinetron sen kiri belok kanan ala Jokowi,” tegasnya.



SKANDAL DI DAPUR NEGARA: SPPG ABAL-ABAL, MARK UP, DAN RAHASIA MILIARAN RUPIAH PER HARI

BUBARNYA REZIM DADAN HINDAYANA DI BADAN GIZI NASIONAL

Kilasan borgol besi mengunci pergelangan tangan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, saat ia melangkah keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Rabu (3/6/2026) malam.

Rompi tahanan berwarna merah muda menutupi kemeja rapi yang biasa ia kenakan saat mendampingi pejabat tinggi negara. Wajahnya pucat,

berbeda jauh dengan senyum percaya diri yang sering ia pamerkan saat mempromosikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) beberapa bulan lalu.

Dalam tempo kurang dari 24 jam, langit Dadan runtuh. Ia bukan hanya kehilangan jabatan sebagai bos program unggulan Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga kehilangan kebebasannya. Kejaksanaan

Agung (Kejagung) secara resmi menetapkannya sebagai tersangka bersama dua anak buahnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.

Apa yang terjadi di balik dapur SPPG? Bagaimana program makan gratis untuk rakyat bisa berubah menjadi ladang bisnis keluarga dan

simakroni? Investigasi yang dilakukan Kejaksaan selama beberapa pekan terakhir akhirnya membuka tabir praktik nakal yang terjadi di tubuh BGN. Mulai dari penggelembungan harga motor listrik Rp 1 triliun, yayasan hantu yang terafiliasi pejabat, hingga bisnis sepatu dan televisi mewah yang tidak sesuai kebutuhan.

Guncangan Istana Kejutan Presiden Prabowo

Kabar pencopotan Dadan Hindayana datang seperti sambaran petir di siang bolong pada Selasa (2/6/2026). Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal keras pada urusan pemberantasan korupsi, mengambil keputusan tegas dengan memberhentikan Dadan dan dua wakilnya. Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, kemudian memberikan sedikit pencerahan terkait alasan di balik “angin segar” di tubuh BGN.

Dudung mengonfirmasi bahwa Presiden menerima banyak informasi yang mengganggu terkait praktik jual beli Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)—yang lebih dikenal sebagai “dapur MBG”.

“Iya, kemungkinan besar seperti



Dudung Abdurachman



itu,” ujar Dudung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sembari membenarkan bahwa isu jual beli SPPG menjadi pemicu utama pergantian pimpinan.

Meskipun baru diumumkan ke publik pada 2 Juni, sumber internal di lingkungan Kejaksaan mengungkapkan bahwa proses penyelidikan sebenarnya sudah berjalan beberapa bulan sebelumnya. Presiden Prabowo sendiri dalam berbagai kesempatan memang kerap memperingatkan para menteri dan kepala lembaga untuk tidak bermain dengan uang rakyat.

Yang mengejutkan, langkah hukum tak butuh waktu lama. Hanya sekitar 10 jam setelah pencopotan, tepatnya di dini hari Rabu (3/6/2026), tim penyidik Jampidsus bergerak cepat.

Bukan hanya satu, penyidik menggeledah enam lokasi sekaligus secara serentak.

Pengeledahan Dini Hari Dan Pengamanan Barang Bukti

Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, Mochamad Jeffry, membenarkan bahwa pengeledahan dimulai sejak dini hari hingga pagi buta. Lokasi yang menjadi sasaran adalah Kantor BGN di kawasan Jakarta Pusat, serta rumah-rumah kediaman para tersangka.

“Sesuai dengan Sprindik, penyidik pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN serta rumah-rumah para tersangka,” kata Jeffry kepada wartawan.

Dari hasil pengeledahan yang berlangsung intensif tersebut, penyidik menyita puluhan unit laptop, handphone, serta tumpukan dokumen finansial yang diduga kuat terkait dengan aliran dana SPPG.

Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa barang bukti elektronik ini



Mochamad Jeffry

sangat krusial.

“Hasil penggeledahan adalah dokumen dan barang bukti elektronik. Termasuk HP dan laptop dan lain-lain,” jelasnya dalam konferensi pers keesokan harinya .

Di saat yang sama, Dadan yang sebelumnya dimintai keterangan sebagai saksi, langsung digelandang ke ruang pemeriksaan. Setelah menjalani maraton pemeriksaan selama belasan jam, statusnya meningkat menjadi tersangka.

Modus Operandi : Praktik Yayasan Nomine Dan Kuasa Atas Dapur MBG

Dalam keterangan pers di Gedung Bundar Kejakung, Rabu malam, Syarief Sulaeman Nahdi membeberkan secara detail modus culas yang dilakukan Dadan bersama Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Modus ini bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah skema sistematis untuk mengeruk keuntungan harian dari dapur MBG.

Syarief menjelaskan bahwa aturan main program MBG sangat jelas. SPPG seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan di tingkat sekolah atau masyarakat yang benar-benar independen dan memenuhi syarat



Syarief Sulaeman Nahdi

teknis.

“Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat,” tegas Syarief.

Yayasan yang tidak layak ini tetap bisa lolos karena adanya “atensi” atau perintah langsung dari para tersangka. Mereka melakukan intervensi terhadap proses verifikasi di portal mitra BGN.

Raup Miliaran Rupiah Setiap Hari

Jika biasanya korupsi dinikmati dalam bentuk proyek bulanan atau tahunan, para tersangka di BGN ini menikmati keuntungan setiap hari. Mengapa? Karena dapur MBG beroperasi setiap hari untuk menyediakan makan siang.

“Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah tiap hari,” ungkap Syarief, membuat ruangan konferensi pers mendadak hening.

Para tersangka tidak secara terang-terangan memiliki yayasan tersebut. Mereka bermain aman dengan menggunakan orang lain (nominee). “Yayasan tersebut terafiliasi di

antaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP (Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, Lodewyk Pusung),” lanjut Syarief.

Artinya, setiap harinya, uang negara yang seharusnya untuk membeli telur, ayam, dan sayur untuk anak sekolah, bocor ke rekening yayasan milik para pejabat tinggi BGN.

Kisruh Motor Listrik dan Belanja Mewah Sepatu

Selain pengelolaan dapur, Kejakung juga menemukan praktik jahat dalam pengadaan barang dan jasa. Terdapat empat komponen pengadaan yang dinilai absurd dan tidak mendukung operasional MBG, namun menghabiskan anggaran triliunan rupiah.

1. Skandal Motor Listrik Rp 1 Triliun

Kasus ini pertama kali mencuat di publik pada April 2026, saat video viral di TikTok memperlihatkan gudang penuh berisi ribuan unit motor listrik merek tertentu yang tertutup plastik, mengendap tanpa terpakai . Rekaman itu langsung memantik pertanyaan: Apakah motor listrik relevan untuk program makan siang?

Ternyata, BGN menganggarkan pembelian 21.801 unit motor listrik dengan total nilai proyek yang sangat fantastis, sekitar Rp 1 triliun.

Tak hanya itu, pengadaan ini juga menjadi bumerang bagi Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan terpaksa mencopot dua pejabat eselon I, yaitu Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu serta Dirjen Anggaran Luky Alfirman, karena dianggap “kebobolan” menyetujui anggaran tersebut.

“Mungkin (karena kebobolan pengadaan motor SPPG). Anda tebak saja sendiri,” seloroh Purbaya saat

dikonfirmasi di Kantor Kemenkeu, Senin (1/6/2026), dikutip Media Indonesia.

Kejagung menilai pengadaan ini tidak disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Tidak masuk akal sebuah program pemberian makan bergizi membutuhkan armada motor listrik sebanyak itu.

2. Televisi 75 Inchi hingga Sepatu Futsal

Fakta lain yang membuat publik geleng-geleng kepala adalah pengadaan barang-barang konsumtif lainnya:

- Televisi 75 inci: Sebanyak 5.400 unit senilai Rp 75 miliar.
- Tablet: Lebih dari 31.000 unit.
- Sepatu: 32.000 pasang.

Langkah ini menunjukkan adanya mark up harga (penggelembungan) karena spek barang yang dibeli sangat tinggi, sementara untuk distribusi makanan, kendaraan operasional yang dibutuhkan adalah mobil berpendingin (cold storage), bukan sepatu futsal atau televisi raksasa.

Pasal Berlapis Dan Ancaman Hukuman

Setelah melakukan geledah dan pemeriksaan, Kejagung menyatakan cukup bukti untuk menahan ketiga tersangka. Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung langsung digelandang ke Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejagung untuk 20 hari ke depan.

Mereka dijerat dengan pasal berlapis yang sangat berat.

Direktur Penyidikan Syarif Sulaeman Nahdi menyebutkan bahwa para tersangka disangka melanggar Pasal 603 dan Pasal 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta ketentuan dalam



Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk diketahui, Pasal 603 dan 604 KUHP baru mengatur tentang tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Ancaman hukumannya maksimal seumur hidup atau penjara dalam waktu tertentu.

“Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara,” tegas Syarif.

Kerugian negarainikini masih dalam proses audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menentukan angka pastinya, namun dari fakta pengadaan motor dan skema yayasan saja, kerugian ini diperkirakan mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah.

Merespon kasus yang membuat malu jajarannya, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan rasa prihatin dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Pemerintah menghormati proses hukum yang sedang dijalankan

oleh aparat penegak hukum baik Kejaksaan maupun KPK. Berkenaan dengan jabatan yang melekat kepada mereka yang tengah menjalani proses hukum,” ujar Prasetyo Hadi dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).

Prasetyo juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo sudah tidak bosan-bosannya mengingatkan jajarannya untuk melawan praktik korupsi.

“Dua hari ini kita sangat prihatin, terus berulang kejadian yang tidak kita harapkan. Tidak bosan dalam berbagai kesempatan Bapak Presiden selalu mengingatkan kita semua untuk marilah membenahi diri dan melawan praktek korupsi,” katanya.

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memastikan bahwa program MBG tetap berjalan meski pimpinannya tersangkut kasus hukum.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BGN yang baru telah dilantik dan langsung melakukan evaluasi total terhadap mitra SPPG yang terindikasi fiktif.



“Kami pastikan tidak akan ada lagi yayasan ‘kanebo’ yang lolos,” ujar sumber internal BGN yang enggan disebut namanya.

Kasus Dadan Hindayana menjadi ironi pahit bagi pemerintahan Prabowo. MBG adalah program unggulan andalan yang diharapkan bisa mengentaskan stunting dan kemiskinan ekstrem. Namun, ketika program digerakkan oleh oknum yang hanya memikirkan keuntungan pribadi, maka target mulia itu bisa meleset.

Skandal ini membuat kepercayaan publik sedikit terguncang. Sebelumnya, masyarakat antusias melihat anak-anak sekolah mendapatkan makan siang gratis. Kini muncul pertanyaan: apakah kualitas makanan di lapangan sudah sesuai dengan anggaran, atau sudah dipotong untuk setoran ke yayasan bos BGN?

Kasus ini menunjukkan adanya

kelemahan dalam sistem pengawasan BGN yang saat itu terlalu terpusat. Seorang kepala BGN bisa dengan mudah menunjuk yayasan afliasinya sendiri tanpa melalui mekanisme tender dan verifikasi yang ketat.

Ke depan, pemerintah diharapkan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara langsung dalam setiap skema penyaluran dana SPPG, dan melibatkan Kejaksaan dalam pendampingan proyek strategis nasional (proyek strategis nasional) agar tidak terjadi kebocoran sejak awal.

Dadan yang dulu Bukanlah yang Sekarang

Dadan Hindayana, yang dulu duduk nyaman sebagai komandan program makan bergizi gratis, kini harus merasakan dinginnya lantai tahanan. Dari puncak kekuasaan ke dasar sel,

semuanya terjadi dalam waktu 24 jam. Skandal ini adalah pengingat bahwa uang rakyat bukanlah mainan.

Modus yayasan nomine yang meraup miliaran per hari dan pembelian motor listrik senilai Rp 1 triliun adalah dua sisi dari mata uang yang sama: keserakahan di balik program kemanusiaan.

Kini, nasib Dadan dan kolega berada di tangan majelis hakim. Namun yang lebih penting dari hukuman penjara adalah bagaimana pemerintah memastikan bahwa program MBG ke depan benar-benar bersih dari praktik-praktik “nakal” seperti yang dilakukan oleh rezim Dadan Hindayana.

Keadilan harus ditegakkan, dan program makan bergizi untuk anak Indonesia harus terus berjalan, dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

Gerak BGN Benahi Tata Kelola MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) bergerak membenahi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui serangkaian langkah guna menutup celah kebocoran anggaran sekaligus memastikan program lebih tepat sasaran.

Tujuan Pembenahan

Memastikan MBG memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Memastikan MBG lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan MBG.

Capaian MBG

Data Kementerian
Keuangan, 5 Juni 2026

Penerima
manfaat

63,13 juta



Jumlah SPPG

29.679



Realisasi anggaran

Data Kementerian
Keuangan, 5 Juni 2026

Rp88,15
triliun

(26,3% dari total
anggaran 2026
Rp268 triliun)



“ Fokus kami saat ini adalah memastikan program MBG berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Kami melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan dapat ditingkatkan.



Nanik S. Deyang
Kepala Badan Gizi
Nasional

Melakukan moratorium sementara pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Mengevaluasi penerima manfaat agar lebih terarah kepada kelompok prioritas.

Memperkuat pembinaan dan standarisasi SPPG.

Mengoptimalkan SPPG yang telah beroperasi.

Menata agar SPPG merata di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Membuka peluang kolaborasi dengan badan usaha milik negara dan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Meningkatkan sistem pengendalian internal dan integrasi data.



KPK DI SEMESTER PERTAMA 2026:

TITIK TERANG DARI ENAM SKANDAL

Dalam lima bulan pertama tahun 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkap sederet kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat publik dari berbagai tingkatan – mulai dari mantan menteri, kepala daerah, anggota DPR, hingga kepala desa. Nilai kerugian negara yang diidentifikasi mencapai ratusan miliar rupiah.

Laporan ini disusun berdasarkan informasi dari sumber-sumber terverifikasi: pernyataan resmi pimpinan KPK, konferensi pers yang terdokumentasi, serta liputan media nasional terpercaya seperti ANTARA News, Kompas.com, Kompas.tv, dan RRI. Seluruh fakta yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Redaksi menyajikan liputan mendalam atas enam kasus berikut:

1. Korupsi Kuota Haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
2. Pemerasan dana CSR oleh Wali Kota Madiun nonaktif Maidi
3. Korupsi impor barang di lingkungan Bea Cukai
4. Pengadaan jasa outsourcing bermasalah di Kabupaten Pekalongan
5. Jual-beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati
6. Korupsi dana CSR Bank Indonesia



dan OJK yang melibatkan anggota DPR

Kasus Kuota Haji: Rp622 Miliar yang Hilang di Tanah Suci

Babak baru dalam penegakan hukum kasus dugaan korupsi kuota haji terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana melakukan penahanan terhadap dua tersangka baru dalam waktu dekat.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/6/2026), mengatakan dua tersangka yang akan ditahan adalah Direktur Operasional Maktour Ismail Adham

dan mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz Taba.

“Dalam waktu dekat ya, ditunggu. Mungkin minggu ini atau minggu depan, insyaallah dilakukan penahanan,” ujar Asep, Senin (1/6/2026).

Penundaan penahanan, menurut Asep, berkaitan dengan upaya penyidik melengkapi alat bukti sebelum menerapkan upaya paksa terhadap para tersangka.

“Tentunya terkait dengan kecukupan alat buktinya, karena kami harus benar-benar mempersiapkan



Asep Guntur Rahayu

alat-alat bukti tersebut. Kalau dilakukan penahanan, itu sudah terbatas oleh waktu penahanan itu sendiri. Jadi, kami kumpulkan dulu alat-alat buktinya. Setelah nanti lengkap, baru kami lakukan upaya paksa penahanan,” jelasnya.

Kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia tahun 2023-2024 mulai disidik KPK pada 9 Agustus 2025. Setelah melalui proses pengumpulan bukti yang intensif, lembaga antirasuah menetapkan tersangka pada 9 Januari 2026.

Empat orang hingga saat ini berstatus tersangka dalam perkara ini:

1. Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama periode 2019-2024
2. Ishfah Abidal Aziz (akrab disapa Gus Alex), staf khusus Menteri Agama
3. Ismail Adham, Direktur Operasional Maktour
4. Asrul Aziz Taba, mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).

Penahanan terhadap Yaqut dilakukan pada 12 Maret 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Lima hari berselang, pada 17 Maret 2026, giliran Ishfah yang ditahan.



Sempat terjadi peralihan status penahanan Yaqut menjadi tahanan rumah pada 19 Maret 2026 atas permohonan keluarga. Namun pada 24 Maret 2026, mantan Menteri Agama tersebut kembali ditahan di rutan KPK.

Pada 30 Maret 2026, KPK menetapkan dua tersangka baru: Ismail Adham dan Asrul Aziz Taba.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diterima KPK pada 27 Februari 2026 mengungkap angka mencengangkan: kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp622 miliar.

Angka ini menjadi salah satu yang terbesar dalam catatan KPK untuk kasus yang melibatkan pejabat setingkat menteri.

Satu nama yang sempat menjadi sorotan publik adalah Fuad Hasan Masyhur, pemilik biro penyelenggara haji Maktour. Meskipun sempat dicegah bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan, hingga akhir Mei 2026 Fuad belum ditetapkan sebagai tersangka.

KPK masih terus mendalami keterlibatan berbagai pihak lain dalam perkara ini.

Dengan rencana penahanan dua tersangka baru dalam pekan ini atau pekan depan, publik memperkirakan proses persidangan akan segera bergulir setelah seluruh alat bukti dianggap cukup oleh penyidik.

Operasi Senyap Di Madiun: Ketika Dana CSR Menjadi Alat Pemerasan

Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 19 Januari 2026 di Kota Madiun membuka tabir praktik pemerasan yang menjadikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai tameng untuk memeras pihak swasta. Wali Kota Madiun nonaktif Maldi ditetapkan sebagai tersangka utama.

Berdasarkan hasil penyidikan KPK, praktik pemerasan ini bahkan terjadi sebelum proyek berjalan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan hal tersebut setelah pemeriksaan 10 saksi pada 6 Mei 2026.



“Dalam pemeriksaan para saksi tersebut, penyidik mendalami soal dugaan permintaan CSR oleh Wali Kota kepada para developer, sementara proyeknya belum jalan. Di mana jika tidak memberikan CSR, maka izinnya tidak dikeluarkan,” kata Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).

Selain Maidi, KPK juga menetapkan dua tersangka lain:

1. Rochim Ruhdiyanto, orang kepercayaan Maidi
2. Thariq Megah, Kepala Dinas PUPR Kota Madiun nonaktif

“KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan serta menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Gedung KPK Merah Putih, Selasa (20/1/2026).

KPK mengungkapkan, dugaan pemerasan yang melibatkan Maidi bermula pada Juli 2025. Maidi diduga memberikan arahan pengumpulan uang melalui dua bawahannya:

Sumarno, Kepala Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Madiun, serta Sudandi, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Madiun.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah upaya pemerasan terhadap Yayasan STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun. Yayasan tersebut saat itu sedang dalam proses alih status menjadi universitas. Maidi diduga meminta uang sebesar Rp350 juta terkait pemberian izin akses jalan, dengan dalih untuk keperluan dana CSR Kota Madiun.

Selain itu, pada Juni 2025, Maidi diduga meminta uang kepada pihak developer senilai Rp600 juta. Uang tersebut diterima oleh SK (Sri Kayatin) dari pihak developer PT HB (Hemas Buana), yang selanjutnya disalurkan kepada Maidi melalui perantara Rochim dalam dua kali transfer rekening.

Pada 11 Mei 2026, KPK memeriksa Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun Bagus Panuntun. Pemeriksaan difokuskan pada proses perencanaan dan permintaan dana CSR oleh Maidi.

“Saksi didalami pengetahuannya berkaitan dengan proses-proses perencanaan dan permintaan dana CSR yang dilakukan oleh tersangka Wali Kota Madiun kepada pihak-pihak swasta,” kata Budi Prasetyo.

Ia menyebutkan bahwa Maidi meminta dana CSR kepada pihak swasta yang berkaitan dengan pengerjaan proyek di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Bea Cukai Dalam Pusaran Suap: Sindikat Impor Barang yang Terbongkar

Sebuah operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 4 Februari

2026 mengungkap jaringan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Operasi ini berkaitan dengan impor barang tiruan atau KW.

Dari 17 orang yang diamankan, KPK menetapkan enam tersangka pada 5 Februari 2026:

1. Rizal (RZL), Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai periode 2024-Januari 2026 dan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat
2. Sisprian Subiaksono (SIS), Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai
3. Orlando Hamonangan (ORL), Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai
4. John Field (JF), pemilik Blueray Cargo
5. Andri (AND), Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo
6. Dedy Kurniawan (DK), Manajer Operasional Blueray Cargo

Pada 26 Februari 2026, KPK kembali menetapkan tersangka baru: Budiman Bayu Prasajo (BBP), Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai.

Dalam penggeledahan, KPK menyita uang tunai Rp5,19 miliar yang disimpan dalam lima koper dari sebuah rumah aman di Ciputat, Tangerang Selatan. Uang tersebut diduga terkait dengan perkara korupsi.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan bahwa KPK telah memeriksa sekitar 20 perusahaan forwarder (penyedia jasa pengiriman barang impor) di seluruh Indonesia.

“Ada sekitar 20-an lebih lah forwarder itu di seluruh Indonesia, yakni di setiap pelabuhan. Itu juga sedang kami minta keterangan. Beberapa petinggi dari forwarder lain



itu sudah kami minta keterangan,” ujar Asep, Senin (1/6/2026).

Pada 6 Mei 2026, tiga terdakwa dari pihak swasta – John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan – menjalani sidang perdana. Dalam dakwaan, nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama muncul.

Pada 20 Mei 2026, Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut bahwa Djaka Budi Utama diduga menerima uang suap hingga 213.600 dolar Singapura atau sekitar Rp2,97 miliar.

Dalam dakwaan tersebut, Djaka Budi bersama Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan disebut bertemu dengan pengusaha-pengusaha kargo di salah satu hotel di Jakarta pada Juli 2025. Salah satu pengusaha yang hadir adalah John Field.

Outsourcing Dan Kepentingan Keluarga, Skandal Pengadaan di Kabupaten Pekalongan

Sebuah kasus korupsi dengan modus nepotisme yang terstruktur terbongkar di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Bupati nonaktif Fadia

Arafiq menjadi pusat penyelidikan KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing.

Yang membuat kasus ini unik adalah keterlibatan keluarga inti bupati serta praktik mobilisasi pekerja untuk kepentingan politik.

Berdasarkan hasil penyidikan KPK, suami Fadia, Mukhtaruddin Ashraff Abu, menjabat sebagai komisaris PT Raja Nusantara Berjaya (RNB). Sementara putra mereka, Muhammad Sabiq Ashraff, menjadi direktur di perusahaan tersebut.

KPK menduga Fadia sebagai pihak yang menerima manfaat utama (*beneficial ownership*) dari perusahaan tersebut. Sepanjang periode 2023-2026, KPK mencatat aliran dana sekitar Rp46 miliar ke PT RNB yang bersumber dari kontrak dengan sejumlah perangkat daerah di Pemkab Pekalongan.

Pada Mei 2026, KPK mendalami peran dua orang dekat Fadia. Mereka adalah SH, Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Pekalongan sekaligus mantan ajudan Fadia, dan

AS, ajudan Bupati Pekalongan.

“Mereka didalami terkait pengoordinasian para kepala dinas agar PT RNB masuk sebagai penyedia jasa outsourcing,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

KPK menduga kedua saksi turut membantu proses penerimaan gratifikasi yang dilakukan Bupati Pekalongan.

Fakta lain yang cukup mengejutkan: sebagian pegawai PT RNB diduga merupakan tim sukses yang ditempatkan di sejumlah organisasi perangkat daerah.

Lebih jauh lagi, KPK mengungkap bahwa Fadia diduga mengancam buruh outsourcing untuk memilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024. Ancaman diberikan secara lisan, baik langsung maupun melalui orang lain.

“Jika para staf outsourcing ini tidak mau mendukung saudari FAR (Fadia Arafiq), maka akan diberhentikan atau digantikan oleh personel lainnya. Artinya, memang di sini ada dugaan mobilisasi atau pengerahan staf outsourcing dalam Pilkada di Pekalongan,” ungkap Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu merinci aliran dana dari PT RNB. Sepanjang 2023-2026, transaksi masuk ke PT RNB menembus Rp46 miliar. Namun, hanya Rp22 miliar yang dialokasikan untuk gaji pekerja. Sekitar 40 persen sisanya, atau Rp19 miliar, masuk ke kantong keluarga Fadia.

Rincian aliran dana tersebut:

- Fadia: Rp5,5 miliar
- Muhammad Sabiq Ashraff (putra): Rp4,6 miliar
- Meh Na (anak lainnya): Rp2,5 miliar
- Rul Bayatun (orang kepercayaan):



Rp2,3 miliar

- Mukhtaruddin Ashraff Abu (suami): Rp1,1 miliar

Selain itu, terdapat penarikan tunai Rp3 miliar untuk Fadia.

Asep Guntur Rahayu menilai praktik dugaan korupsi di Pemkab Pekalongan didesain dengan sangat rapi. Sepanjang 2025, PT RNB mendominasi pengadaan di 17 perangkat daerah, tiga RSUD, dan satu kecamatan.

“Apa yang terjadi di Pekalongan ini sudah bentuk korupsi yang lebih maju dibandingkan dengan suap konvensional ketika meminta sejumlah uang dari para pengusaha atau vendor yang melakukan pekerjaan,” tutur Asep.

Perusahaan tersebut awalnya didirikan pada 2022. Demi menyamarkan jejak, pada 2024, posisi direktur diserahkan kepada Rul Bayatun, orang kepercayaan Fadia.

“Orang yang tidak tahu menganggap perusahaan ini tidak ada hubungannya dengan bupati, karena tidak kelihatan

hubungan keluarganya,” jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, Fadia mengutus Sabiq untuk mengintervensi jajaran dinas agar menyerahkan rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelum tender dibuka.

Jual Beli Jabatan di Kabupaten Pati

Di antara enam kasus korupsi besar yang terungkap pada awal 2026, kasus di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mungkin yang paling menyentuh akar rumput. Ini tentang jual-beli jabatan perangkat desa – posisi yang seharusnya menjadi pintu masuk bagi warga desa untuk mengabdikan kepada komunitasnya.

Bupati Pati nonaktif Sudewo (SDW) menjadi tersangka utama dalam kasus ini. KPK menemukan bahwa praktik ini tidak hanya berhenti pada tarif awal yang ditetapkan bupati, tetapi juga di-mark up oleh tim suksesnya.

Dalam konstruksi perkara yang diungkap KPK, Sudewo menetapkan tarif awal untuk satu jabatan perangkat

desa di kisaran Rp125 juta hingga Rp150 juta.

“Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Mark Up oleh Tim Sukses

KPK menemukan bahwa tarif tersebut kemudian dinaikkan alias di-mark up oleh dua anggota tim sukses Sudewo, yakni Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Abdul Suyono (YON), serta Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken, Sumarjiono (JION).

“Berdasarkan arahan SDW, YON dan JION kemudian menetapkan tarif sebesar Rp165 juta hingga Rp225 juta untuk setiap calon perangkat desa yang mendaftar. Besaran tarif tersebut sudah di-mark up (dinaikkan) oleh YON dan JION dari sebelumnya Rp125 juta hingga Rp150 juta,” jelas Asep.

Fakta tersebut terungkap setelah

KPK menangkap Sudewo dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/1/2026).

KPK mengungkapkan bahwa hingga 18 Januari 2026, JION tercatat mengumpulkan dana kurang lebih sebesar Rp2,6 miliar yang berasal dari delapan kepala desa di Kecamatan Jaken.

Selain YON dan JION, satu tersangka lain yang turut diamankan uangnya adalah Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken, Karjan (JAN).

“Tim KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai Rp2,6 miliar yang diamankan dari penguasaan JAN, JION, YON, dan SDW,” ujar Asep.

KPK menetapkan Sudewo sebagai tersangka sehari setelah OTT, pada 20 Januari 2026. Dua anggota tim sukses yang menjadi tersangka adalah Abdul Suyono (YON) dan Sumarjiono (JION).

Enam anggota tim sukses lainnya tidak ditetapkan sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial SIS (Kepala Desa Karangowo, Kecamatan Juwana), SUD (Kepala Desa Angkatan Lor, Kecamatan Tambakromo), IM (Kepala Desa Gadu, Kecamatan Gunungwungkal), YY (Kepala Desa Tambaksari, Kecamatan Pati Kota), PRA (Kepala Desa Sumampir, Kecamatan Pati Kota), serta AG (Kepala Desa Slungkep, Kecamatan Kayen).

CSR Bank Indonesia Dan OJK: Menguk Jaringan Baru di Sektor Jasa Keuangan

Kasus keenam yang tengah diusut KPK memiliki cakupan yang berbeda dari kelima kasus sebelumnya. Ini melibatkan institusi keuangan strategis: Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Heri



Gunawan (HG) dan Satori (S), menjadi pusat penyelidikan.

Berdasarkan informasi terbaru dari KPK, lembaga antirasuah akan segera memanggil kedua tersangka tersebut dan melakukan upaya paksa jika diperlukan.

“Kami sudah komunikasi dengan penyidik. Jadi, untuk saudara HG dan S ini, mungkin dalam waktu dekat kami akan melakukan pemanggilan dan lakukan upaya paksa,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/6/2026).

Asep menegaskan bahwa tidak ada tekanan politik dalam penyidikan kasus ini.

“Tidak ada kalau terkait politik. Akan tetapi, yang jelas ini lebih kepada teknis, teknis kami dalam penyidikan, karena kami harus benar-benar mengonfirmasi setiap rupiah uang CSR itu digunakan untuk apa,” jelasnya.

KPK sedang mendalami penggunaan dana CSR tersebut.

“Karena ini tidak hanya menyangkut pembagian atau CSR-nya sendiri, tetapi

ini juga terkait dengan bagaimana penggunaan dari CSR itu sendiri, apakah memang benar-benar sesuai dengan peruntukannya atau tidak,” kata Asep.

Kronologi Kasus

Perkara ini bermula dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pengaduan masyarakat. KPK melakukan penyidikan umum sejak Desember 2024.

Penyidik KPK telah menggeledah sejumlah lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait perkara tersebut, termasuk Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, yang di-geledah pada 16 Desember 2024, dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang di-geledah pada 19 Desember 2024.

Pada 7 Agustus 2025, lembaga antirasuah menetapkan anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG) sebagai tersangka. Keduanya saat ini merupakan anggota DPR RI periode 2024-2029.



SE MENDIKDASMEN NOMOR 7 2026:

ARAH BARU PEMBINAAN GURU

Guru memiliki peran penting dalam memajukan kualitas pendidikan. Tanpa hadirinya guru dalam proses pembelajaran sangat mustahil akan melahirkan generasi hebat di masa yang akan datang.

Namun, dunia pendidikan di Indonesia sedang menghadapi tantangan yang berat. Sebab, distribusi

dan pemenuhan jumlah kebutuhan guru, khususnya di sekolah negeri belum merata. Bahkan, ada sejumlah daerah yang mengalami kekurangan guru, sehingga proses pembelajaran tidak berjalan sesuai dengan harapan.

Belum tuntas masalah tersebut, dunia pendidikan dihadapkan dengan amanat Undang-Undang ASN Nomor 20 tahun 2023 yang menyatakan bahwa

setelah Desember 2024 tidak boleh lagi ada status kepegawaian selain ASN di instansi pemerintah, termasuk di instansi pendidikan. Amanat tersebut dikuatkan lagi dengan adanya arahan agar pemerintah daerah tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk tenaga non-ASN.

Kondisi ini menciptakan kegamangan tidak hanya bagi



pemerintah daerah, namun juga dirasakan oleh para guru yang berstatus non-ASN atau guru honorer. Mereka pun sedih karena tidak lagi diberikan kesempatan untuk melanjutkan pengabdian mereka dalam mencerdaskan anak bangsa di sekolah negeri yang selama ini mereka berkarya.

Surat Edaran Mendikdasmen menjadi penyelamat

Di tengah kegamangan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berupaya menghadirkan solusi dari permasalahan tersebut. Solusi yang dihadirkan dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026.

Surat edaran tersebut menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian bagi guru non-ASN yang masih mengajar di sekolah negeri. Sebab, dengan hadirnya surat edaran ini akan menjadi rujukan



Nunuk Suryani

bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan pengajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani menyatakan bahwa diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 merupakan

upaya memberikan jalan agar guru-guru non ASN masih bisa tetap mengajar di sekolah negeri.

Langkah ini perlu dilakukan, sebab jumlah kebutuhan guru di sekolah-sekolah negeri masih mengalami kekurangan. Jika guru-guru dengan status honorer tidak lagi diberikan kesempatan mengajar maka bisa mengganggu jalannya proses pembelajaran di sekolah. Hal ini akan merugikan dunia pendidikan di Indonesia.

“Disusunnya surat edaran tersebut berangkat dari amanat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa setelah Desember 2024 tidak boleh lagi ada status kepegawaian selain ASN di instansi pemerintah, termasuk sekolah negeri. Kondisi tersebut kemudian diperkuat dengan adanya arahan agar pemerintah daerah tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk tenaga non-ASN,” jelas Nunuk pada



acara Ngopi Bareng (Ngobrol Pintar) Bu Nunuk yang disiarkan langsung melalui IG pada 8 Mei 2026.

Selanjutnya dia menjelaskan UU tersebut tidak langsung diberlakukan, namun pemerintah pusat masih memberikan masa penataan hingga Desember 2025 seiring pelaksanaan seleksi PPPK dan skema lainnya.

Dalam proses tersebut, Kemendikdasmen menemukan masih terdapat sekitar 237 ribu guru berstatus non-ASN yang tercatat di Dapodik namun belum terakomodasi dalam penataan. Melihat kondisi ini banyak daerah merasa gamang. Sebab Pemda tidak memiliki dasar yang cukup kuat untuk tetap memperpanjang penugasan maupun menggaji guru non-ASN, padahal keberadaan mereka masih sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran di sekolah.

Nunuk melanjutkan, melihat kondisi tersebut Kemendikdasmen

melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Alhasil, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah.

Dia mengatakan dengan terbitnya surat edaran tersebut maka bisa memberikan kepastian bagi guru-guru non ASN yang terdata di Dapodik agar bisa tetap mengajar di sekolah negeri sampai tahun 2026.

“Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, kepastian bagi guru non ASN yang terdata di Dapodik untuk tetap bisa mengajar dengan tenang sampai Desember 2026,” ujarnya.

Selanjutnya dia menjelaskan soal penggajian bagi guru non ASN. Nunuk mengatakan jika pemerintah daerah (Pemda) tidak memiliki alokasi

anggaran yang cukup maka guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik (Serdik) masih tetap mendapatkan tunjangan. Sementara bagi guru yang belum memiliki Serdik akan mendapatkan subsidi, misalnya dengan menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS.

“Dapat menggunakan dana BOS untuk menggaji, itu disebutkan supaya pemerintah daerah punya rujukan. Kalau tidak ada surat edaran ini mereka tidak berani,” jelasnya.

Guru non ASN masih bisa mengajar

Selanjutnya dia mengatakan meski dalam surat edaran tersebut menjelaskan hingga tahun 2026, bukan berarti guru non ASN tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut.

Nunuk menegaskan bahwa mereka masih tetap bisa mengajar. Sebab dalam UU tersebut tidak pernah mengatakan menghentikan tugas mereka sebagai pengajar.

“Yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru,” katanya.

Lantas Bagaimana nasib guru non-ASN setelah tahun 2026? Nunuk mengatakan bahwa pihaknya masih mendiskusikan dengan kementerian terkait bagaimana mekanismenya agar kebutuhan guru di sekolah negeri tetap terpenuhi.

Dia mengungkapkan bahwa dunia pendidikan saat ini dihadapkan dengan jumlah guru. Pada tahun ini Kemendikdasmen membutuhkan sebanyak 498.000 guru. Dan ditambah jumlah guru yang memasuki masa pensiun sekitar sekitar 60-70 ribu guru.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tidak mungkin menggunakan



Firman Oktora

mekanisme guru non-ASN. Sebab, ini sudah menjadi amanat Undang-undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang tidak boleh adanya status non ASN di instansi pemerintah, termasuk instansi pendidikan.

“Bukan gurunya yang tidak boleh mengajar, tapi status non ASN yang tidak boleh lagi ada. Tapi kita juga membutuhkan keberadaan guru karena setiap tahun sebanyak 60 hingga 70 ribu guru yang pensiun. Terkait dengan hal tersebut, kami

sekarang sudah mendiskusikan kira-kira mekanisme seleksi seperti apa yang bisa diterapkan agar kebutuhan guru bisa terpenuhi,” jelasnya.

Kepada guru yang masih berstatus non-ASN dia berpesan agar tetap semangat dalam mengajar. Kedepan silahkan mengikuti seleksi untuk mengisi formasi-formasi yang dibutuhkan.

“Terhadap guru-gurunya semua, ke depan mengikuti pola seleksi yang akan di rumuskan untuk bisa mengisi formasi-formasi kosong, skemanya seperti apa? tentu itu bukan kewenangan kami karena untuk jadi ASN seleksinya sudah ada mekanismenya dan tes perekrutannya karena database-nya bukan di Kemendikdasmen,” ujarnya.

Dan dia pun menegaskan bahwa Kemendikdasmen selalu proaktif dan berjuang untuk memastikan nasib guru-guru di Indonesia tetap terjamin. “Kemendikdasmen sebagai instansi pembina. Tapi Kami terus proaktif untuk memastikan nasib guru-guru ini



Abdul Waris

tetap terjamin,” katanya.

Pemda masih butuh guru honorer

Kekurangan guru untuk mengajar di sekolah negeri menjadi tantangan di masing-masing daerah. Dengan adanya amanat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 membuat pemerintah daerah mengalami kegamangan. Apakah guru dengan status non ASN masih diperbolehkan mengajar di sekolah negeri.

Dengan terbitnya surat edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 sangat membantu pemerintah daerah. Seperti dirasakan oleh Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora mengatakan terbitnya surat edaran sangat membantu.

Firman mengungkapkan, sebelum ada surat edaran ini pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit. Sebab, Pemda telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya.

“Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” ujar Firman.

Menurutnya dengan terbitnya surat edaran ini menjadi acuan informasi



bagi pemerintah daerah masih diperbolehkan untuk mengeluarkan anggaran untuk menggaji guru non ASN.

“Sebelum keluar surat edaran ini kita kebingungan, duitnya ada tapi untuk mengeluarkannya tidak bisa,” ujarnya.

Untuk ke depan, dia berharap harus ada penataan yang berbeda terkait guru non ASN. Sebab, guru adalah profesi yang sangat berbeda seperti pegawai lainnya. Sebab, profesi ini sangat spesifik.

“Guru ini tidak seperti pegawai lainnya karena memang lebih spesifik. Guru mata pelajaran tidak bisa digantikan guru mata pelajaran musik, dan guru yang lain juga seperti itu,” ujarnya.

Menurutnya kehadiran guru sangat diperlukan. Jika kebutuhan guru tidak dipenuhi maka tidak akan terjadi proses pembelajaran yang berkualitas.

Hal yang sama juga dirasakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, dengan diterbitkannya surat edaran ini menjadi jawaban atas kegamangan yang selama ini dirasakan pemerintah daerah terkait keberlanjutan guru non-ASN di sekolah negeri.

Menurutnya dengan terbitnya surat edaran ini semua guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri merasa gembira. Karena sampai 2026 mereka masih diperbolehkan mengajar dan mendapatkan gaji dari pemerintah daerah.

Dia mengatakan, meski ini hanya surat edaran, pemerintah daerah sudah memiliki kepastian hukum dalam menerapkan kebijakannya.

Namun, pemerintah daerah juga tidak gegabah dengan langsung membuat kebijakan. Tapi juga harus membuat kajian dengan kajian

melibatkan institusi pendidikan yang betul-betul paham tentang kondisi nyata tentang persoalan pendidikan di daerah.

Dia mengungkapkan bahwa pemerintahan Kota Bandung sangat konsen dengan memperhitungkan secara cermat jangan sampai ada guru yang tidak terakomodir. Menurutnya ini bisa sangat mengganggu terhadap proses pembelajaran yang ada di Kota Bandung.

Sebelum adanya surat edaran ini, pihaknya merasa gamang sebab pertanggungjawaban yang dikeluarkan dari anggaran APBD untuk pemberian honor guru non-ASN tidak semudah yang kita bayangkan. Jika kita gegabah maka akan ada konsekuensi, minimal harus mengembalikan.

Maka itu, Wali Kota Bandung mengeluarkan strategi kebijakan program untuk pemenuhan jasa layanan pendidikan di Kota Bandung. Menurutnya kebijakan ini sangat penting, sebab jumlah guru ASN di Kota Bandung terus berkurang.

“Saya setiap hari menandatangani

guru yang pensiun itu tidak lebih dari 10 orang. Iya. Ya, setiap hari ya,” ungkapnya.

Bahkan, lanjut dia pada tahun 2026 kita kekurangan guru ASN sebanyak 2.800 guru. Jika guru non ASN sebanyak 3.086 kita tidak diakomodir melalui kebijakan BOSDA ini maka proses pendidikan di Kota Bandung tidak berjalan secara baik.

Maka itu, dia meminta agar pemerintah pusat memperhatikan kondisi real di lapangan karena tidak semudah yang kita bayangkan.

“Kalau tadi ibu Direktur menyampaikan statement-statement di media sosial itu begitu tajam. Sama ke kita juga ke Pakwali juga sama. Tapi kan kita berupaya terus bisa memetakan terhadap persoalan demi persoalan yang ada di Kota Bandung terutama kaitan dengan pendidikan,” ujarnya.

Keberlangsungan proses pembelajaran tidak terganggu

Hal yang sama juga dirasakan oleh pemerintah daerah di luar pulau



Jawa. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, Abdul Waris dengan diterbitkannya surat edaran ini memberikan manfaat bagi daerahnya.

Menurutnya kebijakan relaksasi penugasan kembali guru non-ASN sangat membantu pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan.

“Melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah daerah kembali diperbolehkan menugaskan guru non-ASN pada satuan pendidikan. Kebijakan ini sangat membantu daerah dalam menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar,”katanya.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, telah menugaskan kembali sebanyak 388 guru non-ASN untuk kembali mengajar di satuan pendidikan.

Menurut Abdul Waris, keberadaan gurunon-ASNmasih sangatdibutuhkan karena Kabupaten Gorontalo masih mengalami kekurangan tenaga guru di berbagai satuan Pendidikan.

“Pada prinsipnya Kabupaten Gorontalo masih membutuhkan tambahan tenaga guru. Karena itu, kebijakan ini kami sambut dengan sangat baik demi menjaga kualitas layanan pendidikan bagi anak-anak kita,” jelasnya.

Dukungan terhadap implementasi Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 juga datang dari Provinsi Bangka Belitung yang disampaikan oleh Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, Saiful Bahri.

Saiful memberikan apresiasi atas langkah pemerintah pusat yang dinilai memberikan kepastian bagi keberlangsungan tugas guru non-ASN



Saiful Bahri

di daerah. Sebab, di daerahnya masih sangat membutuhkan kehadiran guru non-ASN.

“Terhitung sejak bulan lalu, kami telah menerima Surat Edaran Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang relaksasi penugasan kembali guru non-ASN. Ini patut kami syukuri dan kami apresiasi karena sangat membantu daerah,” ujar Saiful.

Ia menjelaskan, saat ini terdapat 51 guru non-ASN yang dibiayai melalui dana BOS di Provinsi Bangka Belitung. Selain itu, masih terdapat guru-guru lain yang selama ini pembiayaannya dibantu melalui sumbangan orang tua atau wali siswa.

“Dengan surat edaran ini, kami optimistis para guru non-ASN tetap dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Kami yakin pemerintah pusat akan terus menyiapkan langkah-langkah lanjutan untuk memastikan keberlangsungan penugasan mereka,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, Irwandi, juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah sangat terbantu dengan terbitnya surat edaran tersebut karena

memberikan dasar hukum yang jelas bagi pembiayaan guru non-ASN melalui dana BOS hingga akhir tahun 2026.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah berupaya mencari solusi atas permasalahan guru di daerah. Dengan diterbitkannya surat edaran tersebut, kami sangat terbantu karena setidaknya kami memiliki dasar kebijakan untuk melakukan pembayaran menggunakan dana BOS sampai dengan 31 Desember 2026 bagi guru yang terdaftar di Dapodik,” ujar Irwandi.

Ia juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang telah memindahkan pembiayaan PPPK paruh waktu yang sebelumnya menggunakan dana BOS ke APBD untuk hampir 80 orang sejak Januari 2026. Kemudian, ia menyampaikan jika Pemkot Pangkalpinang juga telah menginventarisasi sebanyak 15 guru SD dan 2 guru SMP yang masih dibiayai melalui dana BOS sesuai ketentuan surat edaran tersebut.

Selain itu, Irwandi menuturkan jika kebutuhan tenaga pendidik di Kota Pangkalpinang masih cukup tinggi. “Kami masih membutuhkan kurang lebih 265 guru dan tenaga kependidikan guna mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Kota Pangkalpinang,” tuturnya.

Bagi pemerintah daerah, kebijakan penugasan kembali guru non-ASN bukan sekadar solusi administratif. Kebijakan tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan ruang-ruang kelas tetap terisi guru dan layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia dapat terus berjalan dengan baik.

PROGRAM REVITALISASI:

KONSOLIDASI INFRASTRUKTUR DAN KUALITAS PEMBELAJARAN

Revitalisasi satuan pendidikan kini menjadi wajah baru yang paling nyata dari kerja Kemendikdasmen. Di banyak daerah, sekolah-sekolah yang dulu rapuh kini berdiri dengan kokoh, menghadirkan ruang belajar yang layak dan penuh harapan. Di SMP Negeri 3 Bajawa, suasana kelas yang dulu bocor kini berubah total. Seorang murid bernama Maria menuturkan dengan mata berbinar, “Dulu kami belajar sambil menahan panas dan hujan, sekarang kami bisa duduk dengan tenang. Rasanya seperti mimpi,” ujarnya.

Revitalisasi ini bukan sekadar perbaikan fisik, melainkan simbol keadilan pendidikan. Di Manado, seorang guru bernama Yulius mengungkapkan, “Dengan adanya ruang laboratorium komputer, anak-anak kami tidak lagi tertinggal. Mereka bisa belajar coding, bisa bersaing dengan anak-anak kota besar,” ujarnya. Kehadiran fasilitas baru membuat suasana belajar lebih hidup, lebih relevan dengan zaman, dan memberi rasa percaya diri bagi murid maupun guru.

Namun revitalisasi tidak berhenti pada bangunan. Ia menyentuh kesejahteraan guru sebagai pilar utama pendidikan. Program tunjangan



dan subsidi upah kini menjangkau ratusan ribu guru non-ASN. Seorang guru di Flores, bernama Agustinus, berkata dengan tegas, “Apabila guru pengetahuannya tidak memadai, jelas pendidikan tidak akan maju. Saya berharap pemerintah tetap melanjutkan program ini sampai semua guru memiliki kualifikasi S1,” ujarnya.

Digitalisasi juga menjadi bagian tak terpisahkan. Lebih dari 288 ribu sekolah kini memiliki papan interaktif. Seorang siswa di Manado, bernama Rani, mengaku, “Kami dapat

memahami pembelajaran lebih dalam lagi dan suasana belajar menjadi lebih menyenangkan,” ujarnya. Guru mereka menambahkan, “Kami tidak ketinggalan zaman lagi. Anak-anak bisa belajar dengan cara yang lebih modern,” ujarnya. Kehadiran teknologi membuat revitalisasi terasa bukan hanya pada dinding sekolah, tetapi juga pada cara berpikir dan belajar.

Dana BOSP 2026 menjadi fondasi keberlanjutan. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menegaskan dalam sebuah webinar, “Tujuan kita dalam pendidikan



Abdul Mu'ti

adalah satu: menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan bagi seluruh anak Indonesia,” ujarnya. Gogot Suharwoto menambahkan, “Dana BOSP bukan semata penyerapan anggaran, tetapi manfaat nyata bagi peserta didik,” ujarnya. Skema reguler, afirmasi, dan kinerja dirancang untuk memastikan revitalisasi tidak berhenti di tengah jalan, melainkan terus bergerak maju.

Meski capaian besar telah diraih, tantangan masih nyata. Banyak sekolah pernah tergenang banjir, lantai rusak, dan pelafon runtuh. Seorang orang tua di Kalimantan, bernama Nuraini, mengenang, “Pada zaman kami sekolah itu, kami tidak dapat ruangan yang baik dengan pelafon yang ancur. Tetapi sekarang saya bersyukur anak saya sudah belajar dengan gedung yang sangat baik,” ujarnya. Guru di daerah itu pun mengakui pengabdian mereka penuh risiko. “Kami mengajar di sini was-was, tapi karena namanya pengabdian demi mencerahkan anak, apapun risikonya kita jalani,” ujar Ahmad, seorang guru senior.

Revitalisasi juga membawa dampak nyata pada capaian literasi dan numerasi. Data menunjukkan

peningkatan signifikan: literasi naik dari 60 persen murid memenuhi kompetensi minimum pada 2022 menjadi lebih dari 70 persen pada 2025. Numerasi meningkat dari 45 persen menjadi sekitar 70 persen. Namun masih ada 30 persen anak-anak yang belum mencapai kompetensi minimum. Gogot menegaskan, “Peningkatan yang ada masih belum rata, dan kita semua masih memikul tanggung jawab untuk memastikan sekolah-sekolah di berbagai pelosok turut merasakan kemajuan itu,” ujarnya.

Revitalisasi satuan pendidikan semakin menemukan wajahnya ketika Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, turun langsung ke sekolah-sekolah. Dalam kunjungan ke SMP Negeri 1 Surabaya, ia menegaskan bahwa revitalisasi bukan sekadar memperbaiki bangunan, melainkan membangun ekosistem belajar yang sehat. “Saya melihat langsung bagaimana ruang kelas yang dulu sempit dan kurang layak kini berubah menjadi ruang yang terang, nyaman, dan mendukung pembelajaran. Revitalisasi ini bukan hanya fisik, tetapi juga semangat baru

bagi guru dan murid,” ujar Abdul Mu'ti.

Ia menambahkan bahwa revitalisasi satuan pendidikan harus dipahami sebagai bagian dari strategi besar peningkatan mutu. “Revitalisasi ini adalah instrumen penting untuk memetakan mutu pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara literasi dan numerasi, tetapi juga karakter, lingkungan belajar, dan kesejahteraan guru. Semua harus bergerak bersama,” tegasnya.

Di sela kunjungan, Abdul Mu'ti berdialog dengan seorang guru bernama Eko Widayani, Kepala SMPN 1 Surabaya. Eko menjelaskan, “Kami menyiapkan siswa dengan materi pengayaan, soal latihan, dan bimbingan intensif. Revitalisasi ruang kelas membuat anak-anak lebih fokus. Mereka merasa dihargai, karena pemerintah hadir dengan fasilitas yang nyata.” Abdul Mu'ti menanggapi dengan senyum, “Inilah yang saya maksud: revitalisasi bukan hanya bangunan, tetapi juga rasa percaya diri yang tumbuh di hati anak-anak.”

Dalam kesempatan lain, Abdul Mu'ti menekankan pentingnya kesejahteraan guru sebagai bagian dari revitalisasi. “Guru adalah jantung pendidikan. Tidak mungkin kita bicara revitalisasi sekolah tanpa memastikan



Gogot Suharwoto

guru sejahtera. Program tunjangan, pendidikan profesi, dan kualifikasi S1/D4 adalah prioritas yang harus terus kita dorong,” ujarnya. Seorang guru di Flores, Agustinus, menyambut kebijakan itu dengan penuh harapan. “Saya sudah ikut program kualifikasi S1. Rasanya berbeda sekali ketika pengetahuan kita bertambah. Anak-anak lebih percaya, dan saya pun lebih mantap mengajar,” katanya.

Revitalisasi juga menyentuh aspek digitalisasi. Abdul Mu’ti meninjau ruang laboratorium komputer di Manado dan menyapa siswa bernama Rani. “Apa yang kamu rasakan dengan adanya papan interaktif ini?” tanyanya. Rani menjawab, “Kami dapat memahami pembelajaran lebih dalam lagi dan suasana belajar menjadi lebih menyenangkan.” Abdul Mu’ti tersenyum dan berkata, “Itulah tujuan kita: menghadirkan pembelajaran yang relevan dengan zaman.”

Dana BOSP 2026 menjadi fondasi kebijakan yang ia dorong. Dalam sebuah webinar, Abdul Mu’ti menegaskan, “Dana BOSP bukan sekadar anggaran, tetapi jembatan untuk memastikan revitalisasi berjalan. Kita harus pastikan setiap rupiah benar-benar sampai ke ruang kelas, ke guru, dan ke murid.”



Meski begitu, Abdul Mu’ti tidak menutup mata terhadap tantangan. Ia mengunjungi sekolah di Kalimantan yang pernah rusak akibat banjir. Seorang guru bernama Ahmad berkata, “Kami mengajar di sini was-was, tapi karena namanya pengabdian demi mencerahkan anak, apapun risikonya kita jalani.” Abdul Mu’ti menanggapi, “Saya hormat pada pengabdian bapak dan ibu guru. Revitalisasi harus menjawab tantangan ini: bagaimana sekolah tetap kokoh meski menghadapi bencana.”

Data literasi dan numerasi menjadi indikator keberhasilan. Abdul Mu’ti menyampaikan, “Kita melihat peningkatan signifikan, tetapi masih ada 30 persen anak-anak yang belum mencapai kompetensi minimum. Ini tanggung jawab kita bersama. Revitalisasi harus memastikan tidak ada anak yang tertinggal.”

Revitalisasi satuan pendidikan, dalam pandangan Abdul Mu’ti, adalah jalan panjang menuju keadilan

pendidikan. Gedung sekolah yang lebih layak, guru yang lebih sejahtera, teknologi yang hadir di ruang kelas, dan kebijakan dana yang berkelanjutan adalah fondasi. Namun ia menekankan, “Revitalisasi bukan proyek jangka pendek. Ini adalah komitmen jangka panjang untuk memastikan setiap anak Indonesia berhak atas masa depan yang layak.”

Narasirevitalisasipendidikan ini menunjukkan bahwa perubahan bukan sekadar cat baru di dinding sekolah, melainkan transformasi menyeluruh yang menyentuh fisik, kesejahteraan, teknologi, dan kebijakan. Ia adalah cerita tentang guru yang tetap mengajar meski penuh risiko, murid yang kini belajar dengan gembira, orang tua yang bersyukur, dan pejabat yang menegaskan komitmen. Revitalisasi satuan pendidikan adalah wajah baru pendidikan Indonesia, menyulam harapan di ruang kelas, dan menegaskan bahwa setiap anak berhak atas masa depan yang layak.

4.820 Sekolah Terdampak Bencana Kembali Aktif

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat 4.820 sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara kembali aktif hingga Mei 2026 setelah perbaikan.

Kondisi sekolah di lokasi bencana

Data Kemendikdasmen, 18 Mei 2026, untuk 3 provinsi

4.922



Sekolah terdampak bencana

4.820



Sekolah kembali aktif

Keterangan

- Sekolah yang tidak direvitalisasi melakukan pemulihan pembelajaran lebih dulu.
- Siswa di 102 sekolah lainnya masih belajar di ruang kelas darurat, tenda sementara, atau menumpang di sekolah lain.

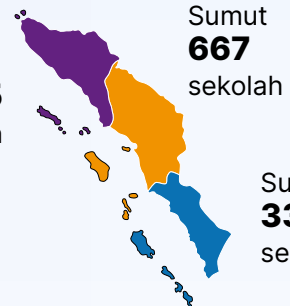
Langkah Kemendikdasmen percepat sekolah aktif

Data Kemendikdasmen



Memberikan bantuan revitalisasi total Rp2,9 triliun untuk 3.084 sekolah rusak dengan sebaran:

Aceh
2.085
sekolah



Sumut
667
sekolah

Sumbar
332
sekolah



Bekerja sama dengan TNI untuk relokasi sekolah dengan kategori rusak berat.



Menyalurkan bantuan operasional pada masa transisi darurat menuju pemulihan Rp17 miliar.



Menyalurkan bantuan khusus guru dan tenaga kependidikan di daerah terdampak kepada 53.215 orang.



Melakukan pelatihan dukungan psikososial serta monitoring kehadiran siswa-guru dan keterlaksanaan pembelajaran di 3 provinsi.

Manfaat



Mengembalikan kegiatan belajar mengajar agar siswa tidak tertinggal.



Mengembalikan motivasi belajar siswa-guru dengan ruang kelas baru dan fasilitas memadai.



“Seluruh bantuan ini bertujuan untuk mendukung keberlangsungan layanan pendidikan agar kegiatan belajar mengajar tetap dapat berjalan di tengah proses pemulihan pascabencana.”



Abdul Mu'ti
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

CARA PANDANG
Inspirasi Terkini

MEMBANGUN PENDIDIKAN INKLUSIF:

MUTU, KEADILAN, DAN HARAPAN DI SEMESTER PERTAMA 2026

Membangun pendidikan inklusif yang bermutu dan berkeadilan adalah sebuah agenda besar yang kini menjadi prioritas Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen. Di semester pertama 2026, arah kebijakan semakin jelas: inklusi bukan sekadar wacana, melainkan strategi nasional yang harus diwujudkan di ruang kelas, di desa terpencil, hingga di kota besar. Direktur Jenderal GTK, Nunuk Suryani, menegaskan dalam sebuah forum, *“Pendidikan inklusif adalah hak, bukan belas kasihan. Kita ingin setiap anak, apapun kondisinya, mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Guru harus menjadi garda terdepan, dan negara wajib hadir dengan kebijakan yang berpihak.”* Kalimat ini mencerminkan filosofi dasar bahwa inklusi adalah keadilan sosial yang diwujudkan melalui sistem pendidikan.

Di ruang kelas, praktik inklusi menghadirkan wajah nyata dari keberagaman. Seorang guru di Surabaya menceritakan bagaimana ia menyesuaikan metode pembelajaran untuk siswa tunarungu dengan menggunakan bahasa isyarat sederhana yang dipelajari secara otodidak. “Awalnya sulit, tetapi ketika saya melihat mata mereka berbinar karena memahami pelajaran, semua



Nunuk Suryani

lelah terbayar,” katanya. Di Bandung, seorang siswa tunanetra dengan penuh semangat berkata, “Saya ingin menjadi guru. Dengan adanya sekolah inklusi, saya merasa mimpi itu tidak mustahil.” Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa inklusi bukan hanya tentang kebijakan, melainkan tentang keberanian guru dan sekolah untuk membuka pintu selebar-lebarnya. Seorang kepala sekolah di Nusa Tenggara Timur menambahkan, “Kami berjuang agar anak-anak di daerah terpencil tetap mendapat hak belajar. Pendidikan inklusif berarti tidak ada anak yang tertinggal.”

Analisis kebijakan menunjukkan bahwa ada tiga pilar utama yang sedang digerakkan. Pertama, penguatan kompetensi guru melalui PPG dan pelatihan berkelanjutan.

Ditjen GTK menekankan bahwa guru harus dibekali keterampilan pedagogis untuk menghadapi kelas heterogen. Tidak cukup hanya memahami teori, guru perlu praktik nyata dengan simulasi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Nunuk Suryani menambahkan, *“Guru yang berdaya akan melahirkan murid yang percaya diri. Inklusi tidak akan berjalan jika guru tidak siap.”* Kedua, kebijakan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah didorong untuk menyediakan fasilitas ramah disabilitas, sementara komunitas orang tua dan organisasi sipil dilibatkan dalam pendampingan. Hal ini sejalan dengan arahan Ditjen GTK bahwa inklusi harus berbasis masyarakat. *“Sekolah tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan masyarakat adalah energi yang membuat inklusi hidup,”* ujar Nunuk. Ketiga, sistem evaluasi yang berkeadilan. Ditjen GTK mendorong asesmen yang menilai perkembangan anak sesuai kebutuhan masing-masing, bukan sekadar angka ujian. Seorang pengawas sekolah di Jakarta menegaskan, *“Kami ingin asesmen menjadi alat memahami anak, bukan menghukum mereka.”*

Namun, kebijakan ini tidak lepas dari tantangan. Anggaran pendidikan masih terbatas, terutama untuk fasilitas inklusi di daerah terpencil. Resistensi budaya juga muncul, di mana sebagian



masyarakat masih memandang anak berkebutuhan khusus sebagai beban. Nunuk Suryani menanggapi hal ini dengan tegas, *“Kita harus mengubah cara pandang. Anak berkebutuhan khusus bukan beban, mereka adalah aset bangsa. Pendidikan inklusif adalah investasi jangka panjang.”* Analisis lebih dalam menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan inklusi bergantung pada konsistensi implementasi di lapangan. Guru di pelosok Nusa Tenggara Timur menceritakan, *“Kami berjuang agar anak-anak di daerah terpencil tetap mendapat hak belajar. Pendidikan inklusif berarti tidak ada anak yang tertinggal.”* Kisah ini memperlihatkan bahwa kebijakan pusat harus diikuti dengan dukungan nyata di daerah.

Di sisi lain, Ditjen GTK juga menekankan kesejahteraan guru sebagai faktor penting. Dengan tunjangan profesi yang lebih teratur dan pendampingan berkelanjutan, guru diharapkan lebih fokus pada murid. Seorang guru di NTT berkata, *“Ketika tunjangan cair tepat waktu, saya bisa lebih tenang mengajar. Murid-murid pun merasakan semangat saya.”* Kebijakan yang berpihak pada guru terbukti langsung berdampak pada kualitas pembelajaran. Pendidikan inklusif yang bermutu dan berkeadilan adalah perjalanan panjang. Namun, setiap langkah membawa harapan. Seorang siswa dengan disabilitas di Makassar berkata dengan penuh keyakinan, *“Saya ingin menjadi dokter. Saya tahu itu*

sulit, tetapi saya percaya sekolah ini akan membantu saya.” Kalimat sederhana ini mencerminkan harapan besar yang lahir dari ruang kelas inklusi.

Ditjen GTK Kemendikdasmen menutup semester pertama 2026 dengan tekad kuat: membangun sistem pendidikan yang merangkul semua anak, tanpa terkecuali. Dengan guru yang berdaya, kebijakan yang berpihak, masyarakat yang mendukung, dan integritas yang dijaga, Indonesia bergerak menuju masa depan pendidikan yang benar-benar inklusif, bermutu, dan berkeadilan. Pendidikan inklusif bukan pilihan, melainkan kewajiban. Dan kewajiban itu kini sedang dijalankan dengan penuh kesungguhan, agar setiap anak



Indonesia dapat tumbuh menjadi generasi yang berani bermimpi dan mampu mewujudkannya.

Pelatihan Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan pemerintah menjamin kesempatan serta mutu pendidikan bagi seluruh anak di Indonesia. Jaka Alfiananda dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pada Webinar Sapa GTK #4 – Membangun Pendidikan Inklusif yang Bermutu dan Berkeadilan menegaskan bahwa pendidikan inklusif memerlukan perhatian khusus sebagai tanggung jawab kolektif guna menciptakan lingkungan sosial yang ramah dan mendukung tanpa hambatan bagi setiap anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Implementasi ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta

Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 yang menetapkan kewajiban negara dalam menyediakan akses pendidikan bermutu dan berkeadilan bagi peserta didik penyandang disabilitas, sekaligus bertujuan menciptakan ekosistem sekolah anti-diskriminasi dan menghapuskan pelabelan eksklusif.

Peran sekolah sangat vital sebagai “rumah kedua” bagi peserta didik, di mana pendidikan holistik dan adaptif harus diimplementasikan melalui penyesuaian kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan potensi unik masing-masing murid. Kolaborasi antara keluarga, komunitas, dan sekolah menjadi prasyarat mutlak dalam memastikan kesejahteraan murid serta membantu mereka mengembangkan kemampuan akademis, sosial-emosional, dan *life skill* untuk terjun ke masyarakat. Saat ini, jumlah murid berkebutuhan khusus di sekolah umum meningkat signifikan setiap tahunnya, yang menuntut intervensi khusus melalui

penguatan kompetensi guru melalui pelatihan berjenjang, yakni tingkat dasar, tingkat lanjut, dan tingkat mahir.

Tantangan nasional yang dihadapi meliputi defisit guru pendidikan khusus, kesenjangan geografis karena sebaran peserta didik yang merata mulai dari kabupaten hingga kelurahan, serta hambatan ekosistem terkait ketidaksiapan sosial dan emosional di sekolah, termasuk orang tua yang terkadang belum menerima kondisi anaknya. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah meluncurkan tujuh pilar kolaborasi akomodasi yang layak, yaitu identifikasi murid, pengembangan kapasitas Unit Layanan Disabilitas (ULD), pengembangan kapasitas guru, adaptasi kurikulum pembelajaran, penyediaan sarana dan prasarana (sarpras), pembiayaan program dan akselerasi, serta penguatan dukungan komunitas dan ekosistem sekolah. Saat ini, sekitar 95 persen pemerintah daerah sudah membentuk ULD,

namun mereka belum didukung oleh SDM yang merata sehingga strukturnya belum berjalan maksimal.

Dalam hal kompetensi guru, saat ini banyak pendidik masih terbatas pada teori dasar empati fisik dan kesulitan melakukan asesmen fungsional atau merancang Program Pembelajaran Individual (PPI). Pelatihan tingkat dasar bertujuan membangun paradigma baru agar guru lebih mudah merespons keberagaman sebagai kekuatan, memperkuat konsep *Universal Design for Learning* (UDL), menciptakan iklim sosial-emosional yang aman, serta meningkatkan efikasi diri guru dalam menerima murid jalur afirmasi. Pelatihan tingkat lanjut (86 JP) membimbing guru agar mampu merencanakan pembelajaran, menyusun strategi pengajaran langsung dan *prompting*,

menguasai asesmen diagnostik, serta berkolaborasi efektif dengan orang tua.

Pelatihan tingkat mahir (134 JP) menjadi kunci bagi guru non-PLB untuk bertransformasi menjadi Guru Pendidikan Khusus (GPK) melalui proses magang selama 10 hari (80 JP) di SLB atau sekolah inklusif. Lulusan tingkat mahir akan berperan sebagai jembatan antara sekolah dengan ULD, yang menyediakan tenaga pendukung seperti psikolog, terapis, dan dokter. Keistimewaan menjadi GPK mencakup jaminan pemenuhan 24 jam tatap muka untuk sertifikasi, bahkan bagi guru yang kualifikasinya tidak linier (seperti S1 Matematika), terdapat diskresi agar tetap mendapatkan sertifikasi pendidik. Mengenai beban kerja, telah disiapkan formula proporsional melalui Keputusan Dirjen, yaitu 70% untuk tingkat kesulitan ringan, 20%



Jaka Alfianda

sedang, dan 10% berat.

Terdapat pula aturan ketat dalam pelatihan: guru harus mengikuti jenjang mulai dari dasar, lanjut, hingga mahir dan tidak bisa melompati tahapan. Standar kelulusan ditetapkan sebesar 80 untuk tingkat dasar, dan 70 untuk tingkat lanjut serta mahir, dengan penilaian sikap dan perilaku yang dilakukan oleh fasilitator. Bagi peserta yang sebelumnya telah mengikuti BIMTEK Guru Pembimbing Khusus Tahap Penguasaan Keterampilan, pemerintah telah menyiapkan penyetaraan ke tingkat lanjut. Sebagai penutup, Jaka Alfianda menegaskan bahwa program ini adalah komitmen kementerian yang diluncurkan secara nasional pada 20 April 2026. Bagi sekolah yang memiliki anak berkebutuhan khusus dan guru bersertifikat pendidikan inklusif, tersedia bantuan pemerintah sebagai bentuk dukungan bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. “Ayo ikut pelatihan pendidikan inklusif, karena ini akan banyak kebermanfaatannya,” ujar Jaka, seraya mendorong guru untuk segera memanfaatkan kesempatan pelatihan di Ruang GTK karena peluang ini sangat langka dan berimplikasi langsung terhadap kualitas pelayanan pendidikan bagi murid





PIALA DUNIA 2026:

GEMERLAP TIGA NEGARA, BAYANG-BAYANG KONTROVERSI

Piala Dunia 2026 menjadi tonggak sejarah baru dalam sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diselenggarakan di tiga negara sekaligus—Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko—dengan format yang diperluas menjadi 48 tim dan total 104 pertandingan. Sejak pembukaan di Estadio Azteca, Meksiko, hingga final yang dijadwalkan berlangsung

di MetLife Stadium, New Jersey, dunia menyaksikan pesta olahraga terbesar yang pernah ada. Namun di balik gegap gempita, penyelenggaraan Piala Dunia 2026 juga diwarnai kontroversi yang tak kalah besar, menjadikannya bukan hanya ajang olahraga, tetapi juga panggung politik, ekonomi, dan sosial.

Suasana pembukaan di Estadio Azteca begitu meriah. Ribuan penonton menyaksikan parade budaya

Meksiko, konser musik lintas genre, dan pesta kembang api yang menghiasi langit malam. Presiden Meksiko saat itu menyampaikan pidato singkat, menekankan bahwa Piala Dunia adalah simbol persahabatan antarbangsa. Laga perdana mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang berakhir dengan kemenangan 2-0 bagi El Tri. “Ini bukan hanya kemenangan bagi tim kami, tetapi juga bagi rakyat



Meksiko yang bangga menjadi tuan rumah,” ujar pelatih Jaime Lozano.

Di Amerika Serikat, atmosfer berbeda terasa. Stadion-stadion raksasa seperti AT&T Stadium di Texas dan SoFi Stadium di Los Angeles dipenuhi penonton dari berbagai belahan dunia. Namun, harga tiket yang melambung tinggi menjadi sorotan. Banyak suporter mengeluh bahwa tiket pertandingan fase grup saja bisa mencapai ratusan dolar. Seorang penggemar asal Brasil, Ricardo, mengaku, “Saya harus menabung dua tahun untuk bisa datang ke sini. Harga tiket terlalu mahal, tapi saya tidak ingin melewatkan kesempatan menyaksikan Piala Dunia di Amerika.”

Kontroversi lain muncul dari kebijakan visa dan imigrasi. Sejumlah pemain, ofisial, dan jurnalis mengalami kesulitan masuk ke Amerika Serikat

karena aturan yang ketat. Kasus paling mencolok terjadi ketika tim Iran hampir gagal bertanding karena masalah dokumen perjalanan. Federasi Sepak Bola Iran menyebut, “Kami merasa diperlakukan tidak adil. Sepak bola seharusnya mempersatukan, bukan memisahkan.” Pemerintah AS membela diri dengan alasan keamanan nasional, tetapi perdebatan ini menimbulkan ketegangan diplomatik.

Ketegangan semakin meningkat setelah serangan militer AS ke Iran pada Februari 2026, yang menimbulkan kekhawatiran apakah tim Iran bisa berpartisipasi penuh. Pemain Iran bahkan mengenakan pin khusus untuk mengenang korban serangan misil di Minab, sebuah simbol politik yang masuk ke lapangan hijau. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah sepak bola benar-benar bisa

memisahkan diri dari politik?

Di Kanada, penyelenggaraan berjalan relatif lancar, meski ada kritik terkait kapasitas stadion yang lebih kecil dibandingkan di AS dan Meksiko. Namun, atmosfer di Toronto dan Vancouver tetap semarak. Perdana Menteri Kanada menekankan bahwa partisipasi negaranya adalah simbol inklusivitas. “Kami ingin menunjukkan bahwa sepak bola adalah olahraga untuk semua, tanpa memandang latar belakang,” ujarnya.

Meksiko, sebagai negara dengan sejarah panjang sepak bola, menghadapi tantangan tersendiri. Infrastruktur stadion yang berusia puluhan tahun harus direnovasi besar-besaran. Estadio Azteca, ikon sepak bola dunia, menjalani perbaikan menyeluruh agar memenuhi standar FIFA. Seorang pekerja konstruksi



bernama Luis mengungkapkan, “Kami bekerja siang dan malam. Rasanya bangga sekali bisa berkontribusi pada sejarah sepak bola dunia.”

Selain isu logistik, Piala Dunia 2026 juga diwarnai kontroversi politik domestik. Peran Presiden Donald Trump dalam seremoni penyerahan trofi menjadi bahan perdebatan. Sebagian pihak menilai kehadirannya sebagai bentuk politisasi olahraga. “Sepak bola seharusnya bebas dari

politik, tetapi kenyataannya sulit dipisahkan,” ujar seorang analis olahraga di New York Times. Namun, ada pula yang melihat hal itu sebagai simbol kekuatan Amerika di panggung dunia.

Secara finansial, Piala Dunia 2026 adalah proyek raksasa. FIFA memproyeksikan pendapatan rekor \$14 miliar, sebagian besar dari hak siar dan sponsor. Namun, di balik angka fantastis itu, muncul kritik bahwa

turnamen ini lebih menyerupai festival korporasi daripada pesta rakyat. Sponsor besar mendominasi ruang iklan, sementara harga tiket melonjak drastis. Suporter mengeluh bahwa tiket fase grup saja bisa mencapai ratusan dolar, membuat akses bagi masyarakat kelas menengah dan bawah semakin terbatas.

Biaya penyelenggaraan juga membengkak. Renovasi stadion bersejarah seperti Estadio



Azteca di Meksiko menelan dana besar, sementara pembangunan infrastruktur di AS dan Kanada memicu perdebatan soal penggunaan anggaran publik. Kritikus menilai FIFA terlalu menekankan keuntungan finansial, mengabaikan prinsip inklusivitas. “Piala Dunia kini lebih mirip festival korporasi daripada pesta rakyat,” tulis seorang pengamat olahraga.

Di lapangan, format baru dengan 48 tim memunculkan dinamika

berbeda. Banyak negara debutan seperti Panama, Maroko, dan Vietnam tampil mengejutkan. Vietnam, misalnya, berhasil menahan imbang Italia di fase grup. Pelatih mereka berkata, “Kami datang bukan hanya untuk berpartisipasi, tetapi untuk menunjukkan bahwa Asia Tenggara juga bisa bersaing.” Namun, format panjang dengan 104 pertandingan juga menuai kritik. Beberapa pemain mengeluh kelelahan, sementara klub-klub Eropa khawatir jadwal liga

terganggu.

Di balik semua kontroversi, Piala Dunia 2026 tetap menghadirkan momen magis. Gol spektakuler Lionel Messi di usia 38 tahun, kemenangan dramatis Meksiko atas Jerman, hingga kejutan Kanada yang lolos ke babak 16 besar menjadi cerita yang akan dikenang. Seorang anak kecil di Toronto berkata polos, “Saya ingin jadi pemain seperti Alphonso Davies. Piala Dunia membuat saya percaya mimpi bisa jadi nyata.”

EBOLA:

LUKA LAMA, UJIAN BARU BAGI AFRIKA DAN DUNIA

Lonjakan kasus Ebola di Republik Demokratik Kongo pada pertengahan 2026 kembali mengguncang dunia internasional. Data resmi dari Kementerian Kesehatan Kongo dan WHO mencatat lebih dari 970 kasus dengan ratusan kematian, menjadikannya salah satu wabah terbesar dalam dekade terakhir. Sebagian besar kasus terpusat di provinsi Ituri dan North Kivu, wilayah yang memang rawan konflik bersenjata. Kondisi ini membuat penanganan medis semakin sulit karena tim kesehatan harus bekerja di tengah ancaman kekerasan.

Seorang pejabat WHO di Kinshasa mengatakan, “Setiap hari kami menerima laporan kasus baru, dan setiap hari berarti dalam perlombaan melawan penyakit mematikan ini.” Kalimat itu menggambarkan urgensi yang dirasakan tenaga medis di lapangan. Dr. Jean Kaseya, Direktur Jenderal Africa CDC, menegaskan bahwa wabah ini bukan hanya masalah Kongo, melainkan ancaman bagi seluruh benua. “Ebola harus dihentikan di sumbernya melalui ilmu pengetahuan dan solidaritas,” ujarnya.

Sejak awal kemunculannya, Ebola telah menimbulkan ketakutan yang mendalam. Wabah besar di Afrika Barat pada 2014–2016 menewaskan lebih dari 11.000 orang, terutama di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. Data WHO mencatat bahwa lebih dari



28.000 kasus terkonfirmasi terjadi dalam periode tersebut. Angka ini bukan hanya statistik, melainkan kisah kehilangan keluarga, runtuhnya komunitas, dan trauma kolektif yang masih membekas hingga kini. Seorang dokter di Monrovia, Liberia, pernah berkata, “Kami tidak hanya kehilangan pasien, kami kehilangan teman, saudara, dan masa depan.”

Kini, pada 2026, kasus baru di Kongo dan Uganda kembali menimbulkan kekhawatiran. Africa CDC menekankan pentingnya menghentikan wabah di sumbernya. Pemeriksaan di bandara,

pelabuhan, dan perbatasan darat diperkuat, meski tanpa menghambat perdagangan atau perjalanan. “Afrika tidak lagi menunggu pasif. Kami sendiri sudah berkomitmen memberikan kontribusi domestik,” tegas Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Namun, tantangan besar muncul dari berkurangnya bantuan donor internasional. Bantuan asing untuk kesehatan di Afrika turun drastis dari US\$26 miliar pada 2021 menjadi US\$13 miliar pada 2025. Ghana meluncurkan “Accra Reset”, sementara Uni Afrika mengadopsi



Dr. Jean Kaseya

Africa Health Security and Sovereignty Agenda. “Setiap kali ada wabah, banyak negara meminta bantuan karena tidak ada dana dalam anggaran mereka. Itu harus berubah,” kata Kaseya.

Di Uganda, Menteri Kesehatan Jane Ruth Aceng menegaskan bahwa keterlibatan komunitas adalah kunci. “Jika masyarakat tidak percaya pada pemerintah, mereka tidak akan melaporkan kasus. Kepercayaan harus menjadi pusat respons,” ujarnya. Praktik pemakaman tradisional yang melibatkan kontak langsung dengan jenazah sering memperburuk penyebaran, sehingga komunikasi yang menghormati budaya lokal menjadi sangat penting.

Meski vaksin Ervebo sudah tersedia untuk Ebola strain Zaire, wabah terbaru melibatkan Bundibugyo virus yang belum memiliki vaksin resmi. WHO menegaskan bahwa perlombaan melawan Ebola tidak boleh berhenti. “Setiap hari sangat berarti dalam perlombaan melawan penyakit mematikan ini,” ujar Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO. WHO bersama CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) menggelontorkan dana besar untuk mempercepat uji coba tiga kandidat vaksin dari IAVI, Moderna, dan Oxford. Dr. Mike



Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus

Ryan, Direktur Eksekutif WHO untuk Program Kedaruratan Kesehatan, menambahkan, “Kita tidak bisa hanya mengandalkan vaksin. Sistem kesehatan lokal harus diperkuat, tenaga medis harus dilindungi, dan masyarakat harus dilibatkan penuh.”

Respon dunia juga datang dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan organisasi internasional lainnya. Uni Eropa mengumumkan paket bantuan darurat senilai €150 juta untuk mendukung surveilans, logistik, dan pelatihan tenaga kesehatan di Afrika. Amerika Serikat melalui USAID mengirim tim medis dan laboratorium bergerak ke Kongo dan Uganda. “Kami berdiri bersama Afrika dalam menghadapi ancaman ini,” kata Samantha Power, Administrator USAID. Sementara itu, Bank Dunia menyiapkan dana darurat US\$200 juta untuk memperkuat sistem kesehatan di negara-negara yang paling rentan. Dukungan ini menunjukkan bahwa Ebola bukan hanya masalah Afrika, melainkan ancaman global yang membutuhkan solidaritas internasional.

Di lapangan, tenaga medis menghadapi risiko besar. Seorang perawat di Kivu, bernama Aline, berkata, “Kami bekerja dengan rasa takut, tetapi juga dengan keyakinan bahwa setiap nyawa yang diselamatkan



Jane Ruth Aceng

adalah kemenangan.” Kisah-kisah seperti ini memperlihatkan bahwa Ebola bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang keberanian manusia menghadapi ancaman yang mematikan.

Ebola di Afrika kini menjadi cermin perjuangan benua itu: antara ancaman biologis yang mematikan, keterbatasan finansial, dan tekad untuk berdiri di atas kaki sendiri. Ketua Komisi Uni Afrika Mahmoud Ali Youssouf menegaskan, “Masalah Afrika membutuhkan kepemimpinan dan tanggung jawab Afrika.” Narasi ini menunjukkan bahwa Ebola adalah ujian besar bagi Afrika, tetapi juga kesempatan untuk membangun sistem kesehatan yang lebih kuat, mandiri, dan berdaulat. Wabah terbaru menjadi pengingat bahwa solidaritas, sains, dan kepemimpinan lokal adalah senjata utama dalam menghadapi ancaman yang terus berulang, dengan dukungan dunia yang kini lebih terarah pada penguatan kapasitas lokal daripada sekadar bantuan darurat. Dunia menatap Afrika bukan hanya sebagai wilayah yang membutuhkan pertolongan, tetapi sebagai mitra yang berjuang keras untuk menegakkan kedaulatan kesehatan dan melawan ancaman yang bisa mengguncang seluruh umat manusia.



PIALA WAKIL WALIKOTA, AJANG BERGENGSI BEKASI MENUJU KOTA SPORT CITY

Kemeriahan kompetisi basket di Kota Bekasi dengan tajuk Piala Wakil Wali Kota Bekasi 2026 B'yond Future Champ telah resmi berakhir. Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, dalam kesempatannya, mengungkapkan bahwa ajang ini bukan hanya sekadar pertandingan melainkan symbol arah baru kota Bekasi. Abdul Harris Bobihoe menegaskan bahwa kegiatan semacam ini adalah bagian dari visi besar menjadikan Bekasi sebagai *sport city*.

“Ini suatu hal yang sangat-sangat positif. Kami bangga, dan saya kira dengan adanya event-event seperti ini, klub-klub dari Jakarta maupun Jawa Barat ayo sama-sama ke Bekasi untuk memberikan prestasi,” ujarnya penuh semangat kepada Carapandang.com, Minggu (26/4/2026) di GOR Daddy’s Sport Corner.

Ia menekankan pentingnya pembinaan sejak usia dini untuk



Abdul Harris Bobihoe

pembinaan dan juga regenerasi atlet di Kota Bekasi.

“Kita ingin anak-anak kita, generasi muda kita ini mulai melatih diri berprestasi sejak usia 8 tahun. Mereka sudah punya pengalaman yang baik untuk ke depan. Dari sini kita harapkan lahir atlet-atlet, baik untuk Kota Bekasi maupun Jawa Barat di Pekan Olahraga Provinsi, bahkan Pekan Olahraga Nasional,” katanya.

Wawali Kota Bekasi ini juga

mengungkapkan ambisi Bekasi yang juga diarahkan ke panggung internasional. “Bukan tidak mungkin, ke depan kita ingin menjadikan Kota Bekasi sebagai tempat event-event besar seperti IBL. Makanya kami sedang membangun venue basket bertaraf internasional. Dengan begitu, Bekasi sebagai sport city akan betul-betul tampil di internasional,” jelasnya.

Selain olahraga, ia mengaitkan program ini dengan Asta Cita nomor 4 Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pendidikan nasional. “Ini perwujudan dari program Pak Prabowo Subianto, ingin mencerdaskan bangsa dan menyehatkan bangsa. Beliau sudah memberikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak. Dari situ kita harapkan anak-anak punya badan sehat, otak cerdas, dan bisa berprestasi di masa depan,” tuturnya. Ia menambahkan bahwa pendidikan harus berjalan seiring dengan



perlindungan dari ancaman narkoba dan pornografi.

Ucapan terima kasih juga ia sampaikan kepada para orang tua. “Saya mau turunkan banyak terima kasih kepada orang tua yang sudah merelakan anaknya ikut event-event olahraga. Dengan begitu kita tahu, generasi muda ini akan menjadi hebat di masa depan,” katanya.

Tak lupa juga ia memberikan pesan serta motivasi bagi anak-anak Bekasi yang menggeluti dunia olahraga tidak hanya basket tetapi juga cabang olahraga lainnya.

“Ayo kita bersama-sama berolahraga. Basket, futsal, apa saja. Olahraga menyehatkan badan, membuka kesempatan menjadi pemimpin yang cerdas. Kalian harus kami lindungi, karena kalian adalah calon pemimpin masa depan. Berjuang terus lewat olahraga. Salam olahraga,” tutupnya.



Ditya Putra

Hal senada juga disampaikan Ketua Panitia Ditya Putra. Ia menegaskan bahwa ajang ini menjadi sebuah kompetisi yang baik bagi para atlet muda basket Kota Bekasi untuk melatih mental dan pengalaman bertanding serta menjadi wadah pembinaan bagi Kota Bekasi itu sendiri.

“Tentunya ajang ini dibuat bukan hanya sekedar untuk berkompetisi. Atlet-atlet muda yang bertanding di sini juga mendapatkan pengalaman bertanding yang baik untuk

mental mereka. Mereka juga bisa menunjukkan hasil latihan mereka selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun di sini. Sisi lainnya, tentu ini menjadi wadah pembinaan bagi Kota Bekasi itu sendiri. Banyak dari para atlet ini yang berbakat yang kalau terus diasah bukan tidak mungkin akan menjadi seorang atlet yang mampu memberikan kebanggaan kepada keluarga, orang tua, Kota Bekasi bahkan nasional,” ucap Ditya.

Piala Wakil Wali Kota Bekasi 2026 B'eyond Future Champ yang digelar 03-26 April 2026 ini menjadi ajang kompetisi bagi para atlet muda tidak hanya dari dalam tetapi juga luar Kota Bekasi.

Dengan suksesnya gelaran B'eyond Future Champ 2026 ini, Kota Bekasi kembali menegaskan posisinya sebagai gudang atlet berbakat yang siap bersaing secara kompetitif dan sportif.

GURU HONORER MASIH DIBUTUHKAN

Oleh : **Amir Fiqi**, Pendidik dan Pemerhati Pendidikan
Tinggal di Kab. Tangerang, Banten

Pendidikan menjadi kunci penting dalam membangun kemajuan sebuah bangsa. Melalui pendidikan suatu bangsa akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas yang akan menjadi mesin penggerak dari pembangunan dari bangsa tersebut.

Pendiri bangsa Indonesia paham betul bahwa pendidikan merupakan roh dari eksistensi sebuah bangsa. Sehingga dalam amanat konstitusi menjelaskan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi salah tujuan republik ini didirikan.

Tentunya dalam menghadirkan proses pendidikan guru memiliki peran vital. Tanpa kehadiran guru proses pendidikan tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan, yakni mencetak sumber daya manusia yang cerdas dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga, guru harus menjadi perhatian penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia terus diiktiarkan oleh pemerintah. Namun, negeri yang terbentang luas dari Sabang sampai Marauke pasti dihadapkan banyak problem untuk memajukan pendidikan di seluruh daerah. Problem yang dihadapi tidak hanya soal infrastruktur yang memadai, tapi juga pemerataan jumlah guru di seluruh wilayah Indonesia.

Banyak daerah yang dihadapkan dengan persolan kekurangan guru. Tentunya ini menjadi persoalan yang sangat serius bagi pemerintah, sebab tanpa guru bagaimana proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan

harapan.

UU ASN No.20/2023 Menjadi problem

Dunia pendidikan Indonesia menghadapi tantangan yang berat. Di saat banyak sekolah negeri yang masih kekurangan jumlah guru, terbit Undang-Undang ASN Nomor 20 tahun 2023 menyatakan setelah Desember 2024 tidak boleh lagi ada status kepegawaian selain ASN di instansi pemerintah, termasuk di instansi pendidikan. Amanat tersebut dikuatkan lagi dengan adanya arahan agar pemerintah daerah tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk tenaga non-ASN.

Terbitnya peraturan tersebut menimbulkan kegamangan bagi pemerintah daerah, serta menjadi alarm “kematian” bagi para guru yang berstatus non-ASN atau guru honorer. Pasalnya dengan terbitnya peraturan tersebut maka mereka tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pengabdian sebagai pendidik di sekolah negeri yang selama ini mereka berkarya.

Tentunya jika peraturan tersebut dijalankan tanpa mempertimbangkan kondisi real di lapangan, maka menjadi problem yang besar bagi pendidikan di Indonesia. Sebab, pemenuhan kuota guru di seluruh sekolah negeri masih belum terpenuhi. Masih banyak sekolah negeri yang kekurangan guru pengajar.

Seperti diungkapkan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani bahwa sampai saat pemenuhan jumlah guru masih menjadi persoalan pendidikan di Indonesia. Nunuk menyebutkan bahwa pada tahun ini saja Kemendikdasmen membutuhkan



sebanyak 498.000 guru. Angka tersebut belum termasuk jumlah guru yang akan memasuki pensiun pada tahun ini yang jumlahnya sekitar 60-70 ribu guru.

Maka itu harus dicari jalan keluar, sehingga dengan adanya UU ASN No.20/2023 tidak memunculkan masalah baru bagi dunia pendidikan Indonesia. Sebab, masih banyak masalah-masalah pendidikan di negeri yang belum tuntas, dari keterbatasan infrastruktur sekolah, rendahnya literasi peserta didik, dan kualitas pendidikan Indonesia yang masih tertinggal dibanding negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

SE Mendikdasmen No.7/2026 jadi solusi sementara

Di tengah kegamangan pemerintah daerah (Pemda) dan ketidakpastian nasib guru honorer di seluruh Indonesia Kemendikdasmen memberikan

harapan dan angin segar, yakni dengan diterbitkannya surat edaran Mendikdasmen No.7 tahun 2026.

Dengan diterbitkannya surat edaran Mendikdasmen ini memberikan kepastian bagi guru honorer yang masih mengajar di sekolah negeri. Sebab, dengan hadirnya surat edaran ini akan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024.

Seperti yang disampaikan oleh Dirjen GTK, Nunuk Suryani bahwa diterbitkannya surat edaran ini memberikan jalan bagi guru honorer untuk bisa tetap mengajar di sekolah negeri. Menurut Nunuk, langkah tersebut sangat penting dilakukan, pasalnya jumlah kebutuhan guru di sekolah-sekolah negeri masih mengalami kekurangan.

Jika guru-guru dengan status honorer tidak lagi diberikan kesempatan mengajar maka bisa mengganggu jalannya proses pembelajaran di sekolah. Hal ini akan merugikan dunia pendidikan di Indonesia.

Tentunya, surat edaran tersebut tidak bisa dijadikan solusi untuk jangka panjang sebab hanya berlaku sampai akhir tahun 2026. Lantas bagaimana pada tahun selanjutnya? Tentunya jika jumlah guru di sekolah negeri tidak ditambahkan sesuai dengan kebutuhan jumlah sekolah di seluruh wilayah Indonesia permasalahan guru akan membayang-bayangi dunia pendidikan di Indonesia. Dan, yang akan dipertaruhkan adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Maka itu, yang harus dilakukan pemerintah adalah membuka formasi ASN guru sesuai dengan jumlah guru yang dibutuhkan. Tanpa adanya langkah tersebut maka UU ASN No.20/2023 benar-benar akan menjadi problem bagi dunia pendidikan.

Penulis berharap dengan adanya UU ASN No.20/2023 menjadi momentum untuk perbaikan bangsa, khususnya bidang pendidikan. Sebab, sampai saat ini pemerataan guru ASN di seluruh wilayah Indonesia masih menjadi persoalan yang tak kunjung tuntas. Padahal, kehadiran guru adalah wajib bagi proses pembelajaran di kelas. Tanpa guru mustahil proses pembelajaran akan berjalan dengan maksimal. Sebab, guru tidak hanya mendidik; namun kehadiran mereka juga memberikan inspirasi dan menanamkan nilai-nilai karakter bagi murid-muridnya.

Pemenuhan jumlah guru juga penting

Upaya pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan harus diapresiasi. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan perhatian yang besar agar pendidikan di Indonesia jauh menjadi lebih baik, melalui program-program prioritasnya yakni program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan dengan target 11.744 satuan pendidikan, program digitalisasi pembelajaran akan menysasar 288.865

satuan pendidikan melalui pendampingan pemanfaatan perangkat pembelajaran yang telah disalurkan serta penyusunan konten digital.

Selain itu, pada aspek pemerataan akses, Program Indonesia Pintar (PIP) diperluas hingga jenjang PAUD dengan sasaran 19,48 juta peserta didik dari keluarga kurang mampu, sementara penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) menysasar 191.697 anak. Pada 2026, Tes Kemampuan Akademik (TKA) juga akan dilaksanakan untuk jenjang SD dan SMP, serta peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan juga menjadi fokus utama.

Namun, program-program prioritas tersebut tidak akan berjalan sempurna jika masih banyak sekolah-sekolah, khususnya sekolah negeri masih dihadapkan dengan persoalan kekurangan guru. Pemenuhan jumlah guru penting untuk dituntaskan, jangan sampai ini menjadi persoalan yang tak kunjung terjawab. Sebab, yang pertaruhkan adalah nasib pendidikan Indonesia.

Guru adalah seseorang yang berperan penting dalam membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai moral yang akan dibutuhkan siswa untuk sebuah keberhasilan di masa depan. Pentingnya kehadiran guru ini harus diwujudkan dengan langkah nyata dari pemerintah, yakni memastikan tidak ada lagi cerita sekolah yang mengalami kekurangan guru.

Penulis berharap UU ASN No.20/2023 menjadi jawaban pada tahun 2027 nanti pemenuhan jumlah guru ASN di seluruh Indonesia terpenuhi. Bukan malah, terbitnya UU tersebut menjadi penambah masalah bagi pendidikan Indonesia. Sebab, guru non ASN /honerer tidak lagi diberikan kesempatan untuk mengajar.

Indonesia sampai saat ini masih butuh guru honorer. Kehadiran mereka sangat dibutuhkan untuk mengisi sekolah-sekolah negeri yang masih mengalami kekurangan guru ASN. Tanpa kehadiran mereka selama ini pendidikan Indonesia tidak akan baik-baik saja. Sebab, mereka selama ini yang mengisi kekosongan tersebut.

Jeehan

Langkah si kecil untuk berhijab



Pemesanan:





BADAI SEMPURNA EKONOMI INDONESIA

Di tengah guncangan geopolitik global dan pelemahan fundamental domestik, Indonesia berada di persimpangan jalan. IHSG telah kehilangan lebih dari sepertiga nilainya dalam hitungan bulan. Rupiah menyentuh level terendah sepanjang sejarah.

Di tengah kepanikan, Presiden Prabowo bicara soal nasionalisme, sementara teknokrat baru di kursi Menteri Keuangan, , dan Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengeluarkan jurus

pamungkas menaikkan suku bunga. Akankah ini cukup, atau ini hanya plester untuk luka yang menganga?

Tidak ada diksi yang lebih tepat untuk menggambarkan pekan kedua Juni 2026 selain “badai sempurna”. Dalam rentang waktu yang sangat singkat—hanya tiga hari perdagangan—masyarakat Indonesia, dari investor institusi di lantai bursa hingga pedagang tempe, disuguhi kenyataan pahit yang berlapis-lapis.

Rupiah yang merosot ke level terendah sepanjang sejarah, harga

saham yang ambruk bak permen karet direntangkan, dan bahan bakar minyak (BBM) yang kembali melambung membebani kantong. Ini bukan sekadar “gejolak biasa” yang kerap muncul dalam siklus ekonomi tahunan.

Ini adalah sebuah ujian eksistensial bagi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang baru menginjak tahun kedua pemerintahannya, serta uji nyali bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang baru beberapa bulan menduduki kursi panas di

Kementerian Keuangan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kondisi ini bukanlah kejutan yang datang tiba-tiba. Ia adalah akumulasi dari kebijakan yang tertunda, sinyal global yang diabaikan, serta kepanikan yang menjalar akibat retorika politik yang kerap kali tidak sejalan dengan kebutuhan pasar.

Untuk memahami seberapa dalam luka ekonomi ini, kita tidak bisa hanya melihat satu indikator. Seorang ahli bedah tidak akan mengoperasi hanya berdasarkan denyut nadi, melainkan harus membaca seluruh sinyal vital.

Demikian pula dengan ekonomi Indonesia saat ini: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang berdarah-darah, nilai tukar Rupiah yang terusik di level psikologis Rp 18.000, serta lonjakan harga BBM yang akan memicu inflasi gelombang kedua.

Pertanyaan besar yang menggantung di udara panas Jakarta bukan lagi *apakah* Indonesia sedang tertekan, melainkan *seberapa parah* tekanan tersebut dan *apakah* ini merupakan pengulangan dari tragedi kelam 1998 yang meluluhlantakkan sendi-sendi perekonomian nasional? Atau, bisakah kita membandingkannya dengan krisis 2008 yang meski berat, Indonesia masih mampu selamat karena fundamental yang kuat? Untuk menjawabnya, kita harus membedah data mentah dan kronologi peristiwa yang terjadi dalam 72 jam terakhir, sembari mengupas celah struktural yang telah lama diabaikan oleh para pemangku kebijakan.

Krisis Pasar Modal: Ambruknya IHSG dan Eksodus Asing

Mari kita mulai dari indikator yang paling sensitif terhadap sentimen: pasar modal. Dalam dunia keuangan, IHSG adalah cermin paling



jujur dari kepercayaan diri investor. Ketika cermin itu pecah, artinya ada yang salah secara fundamental.

Pada perdagangan Rabu, 10 Juni 2026, IHSG membuka perdagangan dengan napas tersengal. Data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dihimpun menunjukkan bahwa pada sesi pertama, IHSG sebenarnya sempat menguat secara mengejutkan. Indeks naik 2,34 persen atau 134,58 poin ke level 5.881,23 setelah dibuka pada angka 5.744,05.

Bahkan, pada puncaknya, indeks sempat menyentuh level tertinggi di angka 5.939,35. Secara sekilas, angka-angka ini menghadirkan secercah harapan—sebuah “green” di tengah lautan merah. BNI Sekuritas pun dengan cepat merilis analisis bahwa penguatan ini didorong oleh sentimen global, terutama kenaikan bursa Asia yang dipimpin oleh Kospi Korea Selatan.

Namun, bagi para analis pasar yang berpengalaman, kenaikan di sesi pertama ini tercium seperti “dead cat bounce”—istilah kasar di pasar modal

untuk menggambarkan kenaikan sementara setelah penurunan tajam, yang biasanya diikuti oleh kejatuhan yang lebih dalam.

Dan benar saja, meski sempat meroket, IHSG menunjukkan volatilitas ekstrem dengan menyentuh level terendah di angka 5.677,97 pada hari yang sama. Rentang pergerakan yang lebar (dari 5.677 hingga 5.939) mengindikasikan bahwa terjadi perang saraf antara investor yang ingin keluar (sell off) dan investor yang mencoba membeli di harga murah (bottom fishing).

Menjelang penutupan, IHSG akhirnya ditutup menguat 155,73 poin atau 2,71 persen ke level 5.902,38. Namun, jangan biarkan angka penutupan yang hijau itu menipu Anda. Yang lebih penting daripada harga penutupan adalah siapa yang membeli dan siapa yang menjual.

Data mendalam mengungkapkan bahwa di balik penguatan tipis tersebut, terjadi aksi jual bersih (net sell) oleh investor asing yang sangat masif. Hingga sesi pertama saja, asing



tercatat melepas saham hingga Rp 2,75 triliun. Ini adalah angka yang sangat besar, bahkan jika dibandingkan dengan rata-rata harian selama krisis 2020.

Laporan dari berbagai platform perdagangan mengonfirmasi bahwa bank-bank besar pelat merah dan swasta menjadi “korbannya”.

Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) misalnya, digerogeti aksi jual asing hingga Rp 461,46 miliar. Disusul oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sebesar Rp 279,71 miliar, dan PT Bank Mandiri Tbk (MRI) sebesar Rp 165,94 miliar.

Eksodus ini menandakan satu hal: investor global sedang *risk-off* secara total terhadap Indonesia. Mereka tidak peduli dengan valuasi murah; mereka hanya ingin pulang ke dolar AS.

Eksodus modal asing ini bukannya tanpa alasan. Selain faktor eksternal

berupa konflik geopolitik AS vs Iran yang memicu penerbangan ke aset aman (safe haven), pasar domestik sedang kehilangan “jangkar” kepercayaan.

Pelemahan rupiah yang tidak terkendali membuat aset berbasis rupiah menjadi tidak menarik. Logikanya sederhana: jika seorang investor membeli saham di Rp 5.900 dan harga sahamnya naik 10%, namun dalam periode yang sama rupiah melemah 15% terhadap dolar, maka investor tersebut secara riil *menderita kerugian* sebesar 5% dalam mata uang asalnya. Tidak ada investor cerdas yang mau mengambil risiko itu.

Rupiah Tembus Rp 18.000: Antara Geopolitik dan Fundamental

Jika IHSG adalah cermin, maka nilai tukar Rupiah adalah barometer tekanan darah ekonomi Indonesia.

Dan saat ini, tekanan darah Indonesia sedang berada di level kritis, mengancam stroke fiskal.

Sumber data finansial global mencatat bahwa pada penutupan perdagangan 8 Juni 2026, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai level Rp 18.187 per dolar AS. Angka ini bukanlah rekor biasa. Ini adalah titik terendah dalam sejarah Indonesia, melampaui krisis moneter 1998 sekalipun jika dilihat dari angka nominal (meskipun inflasi saat itu jauh lebih tinggi).

Sebagai gambaran, pada awal Januari 2026, rupiah masih berada di level Rp 16.200 per dolar AS. Artinya, dalam waktu hanya lima bulan, rupiah telah kehilangan nilainya hingga 12,3 persen. Itu berarti, tabungan atau pendapatan masyarakat dalam bentuk rupiah tergerus lebih dari sepersepuluhnya hanya dalam hitungan bulan.

Fluktuasi sepanjang pekan ini sangat liar. Pada perdagangan Rabu (10/6) pagi, sempat terjadi penguatan teknis. Kurs rupiah pagi itu bergerak menguat 158 poin menjadi Rp 17.900 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 18.058.

Bahkan, kurs acuan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia juga bergerak menguat ke level Rp 18.141 dari sebelumnya Rp 18.171. Para analis menyebut penguatan ini sebagai respons “lega” sementara atas kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia (BI).

Namun, euforia itu hanya bertahan sebentar. Masih di hari yang sama, tepatnya sekitar pukul 10.39 WIB, rupiah kembali terperosok. USD/IDR naik 65,7 poin atau 0,37% ke 17.982,4, bahkan sempat menembus level psikologis 18.007,5 sebelum sedikit membaik.

Pergerakan ini menunjukkan bahwa meskipun bank sentral telah mengeluarkan “jurus pamungkas” berupa kenaikan suku bunga, tekanan spekulasi terhadap rupiah masih sangat tinggi. Pasar sedang menguji nyali BI: seberapa besar daya tahan devisa untuk terus diintervensi?

Mengapa rupiah begitu lemah? Ada dua faktor besar yang saling terkait: Faktor Global (Eksternal) dan Faktor Domestik (Internal).

Global: Konflik Timur Tengah yang memanas antara Iran dan Israel (serta libatan AS) belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Jeda serangan yang terjadi belum cukup untuk menghapus risiko balasan, sementara titik-titik konflik di Gaza, Lebanon, dan Laut Merah masih menjadi pemicu.

Akibatnya, harga minyak dunia melambung tinggi. Data Rabu (10/6) menunjukkan WTI kontrak Juli 2026 menguat 0,75% ke US 88,86 perbarell dan Brent kontrak Agustus 2026 naik 0,78 persen atau US 92,16 per barell.

Sebagai negara importir minyak bersih, harga minyak yang tinggi adalah kutukan bagi rupiah. Indonesia membutuhkan lebih banyak dolar untuk membayar impor energi, meningkatkan permintaan dolar dan melemahkan rupiah.

Internal: Bank Indonesia mencatat bahwa aliran modal keluar (capital outflow) pada Mei 2026 saja mencapai US\$ 4,2 miliar. Angka ini fantastis. Penyebabnya adalah aksi jual asing di pasar saham dan obligasi (SUN). Investor asing menarik dananya karena imbal hasil (yield) obligasi Indonesia dianggap tidak cukup kompensatif terhadap risiko pelemahan rupiah.

Selain itu, korporasi besar Indonesia yang memiliki utang luar negeri (dolar)



sedang berbondong-bondong membeli dolar untuk membayar cicilan jatuh tempo, menambah permintaan di pasar spot.

Dalam pernyataan resminya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengakui bahwa “pelemahan rupiah berlangsung lebih dalam dibandingkan perkiraan sebelumnya”. Pengakuan jujur dari seorang bank sentralis ini justru terkadang menakutkan pasar, karena mengindikasikan bahwa model prediksi BI pun tidak mampu mengakomodasi tingkat volatilitas yang terjadi saat ini.

Kebijakan Fiskal yang Kontroversial: Pertamina Naik dan Sinyal “Nasionalisme”

Gejolak pasar semakin hangat dengan kebijakan di sektor riil. Mulai 1 Juni 2026, PT Pertamina resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi. Kini, masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam untuk Pertamina yang naik menjadi Rp 14.000 per liter (dari sebelumnya Rp 12.800) dan Pertamina Turbo menjadi Rp 15.200 per liter.

Kenaikan ini secara logis disebabkan oleh harga minyak mentah dunia yang tinggi. Namun, waktu pelaksanaannya dianggap “salah kaprah” oleh para ekonom.

Di saat daya beli tergerus inflasi dan PHK mulai terjadi di sektor padat karya, pemerintah justru menambah beban biaya transportasi dan logistik. Efek berantai sudah terlihat; harga beras medium naik 8% dan tarif angkutan umum di Jabodetabek merangkak naik rata-rata 15%.

Di tengah suasana hati publik yang panas, pidato Presiden Prabowo Subianto di Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Bandar Lampung pada 10 Juni 2026 menuai beragam reaksi.

Dalam pidatonya yang berapi-api, Presiden Prabowo justru mengangkat tema Nasionalisme. Ia mengutip sejarawan Liah Greenfeld yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi modern tidak bisa bertahan tanpa nasionalisme. Ia bertanya retorik kepada para pengusaha: “Apakah sistem ekonomi kita sudah benar-benar berdasarkan nasionalisme?”

Bagi kalangan akademisi dan pelaku pasar, pidato ini dianggap “nyeleneh” atau tidak pada tempatnya. Ketika rupiah sedang sekarat dan investor asing sedang lari terbirit-birit, pasar ingin mendengar tentang kepastian kebijakan, stabilitas hukum, dan paket stimulus—bukan kuliah ideologi tentang nasionalisme. Bahkan, beberapa pengamat menilai retorika seperti ini mengingatkan pada era “ekonomi terpimpin” yang cenderung tertutup terhadap investasi asing.

Sosok Purbaya: Antara Teknokrat dan Pelaksana

Salah satu narasi besar di balik layar krisis ini adalah dinamika di Kementerian Keuangan. Pada



September 2025, Presiden Prabowo melakukan perombakan besar (reshuffle) yang mengejutkan, mengganti Menteri Keuangan legendaris Sri Mulyani Indrawati dengan sosok yang relatif kurang dikenal publik: Purbaya Yudhi Sadewa.

Langkah ini dibaca sebagai upaya Prabowo untuk mengonsolidasikan kekuasaan ekonomi sepenuhnya di tangan “orang kepercayaan” setelah masa transisi dari era Jokowi berakhir.

Purbaya, meskipun berlatarbelakang teknokrat, dianggap memiliki ruang gerak yang terbatas karena ia harus mengimplementasikan arahan presiden secara ketat.

Kini, beban Purbaya sangat berat. Ia harus meramu APBN di tengah ancaman defisit yang melebar karena meningkatnya kebutuhan subsidi energi (meski harga BBM naik, subsidi untuk jenis tertentu tetap membebani) dan menurunnya penerimaan pajak

akibat kontraksi ekonomi.

Di satu sisi, ia harus mengeluarkan kebijakan fiskal yang ekspansif untuk menyelamatkan ekonomi riil dari krisis (bansos, stimulus). Di sisi lain, ia harus menjaga kredibilitas fiskal agar tidak di “downgrade” oleh lembaga rating internasional.

Para ekonom dari Bank Permata dan BCA pun menyebutkan bahwa keberhasilan stabilisasi tidak bisa hanya dari BI, tetapi harus didukung oleh fiskal yang disiplin dari Kementerian Keuangan. Jika Purbaya gagal menciptakan “kepercayaan,” rupiah akan semakin terperosok.

Ancaman “Triple Crisis”: Deindustrialisasi, PHK, dan Daya Beli

Namun, analisis jangka pendek tentang IHSG dan kurs tidak boleh mengaburkan ancaman jangka panjang yang lebih serius. Mantan

Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo baru-baru ini mengeluarkan peringatan keras tentang potensi “Triple Crisis” yang dihadapi Indonesia.

Menurut Gatot, Indonesia sedang mengalami deindustrialisasi dini yang telah terjadi konsisten selama 10 tahun terakhir. Artinya, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB menurun drastis sebelum Indonesia sempat menjadi negara maju.

Akibatnya, lapangan kerja formal sulit tumbuh. Saat krisis seperti sekarang, sektor informal (ojol, PKL, buruh harian) menjadi katup penyelamat, namun overcapacity di sektor informal menyebabkan pendapatan di sana juga tergerus. Ancaman PHK massal mulai terlihat, terutama di perusahaan padat karya yang bergantung pada bahan baku impor yang harganya kini melonjak akibat kurs dollar tinggi.



Inilah lingkaran setan: Rupiah lemah -> Harga impor mahal -> Biaya produksi naik -> Perusahaan efisiensi (PHK) -> Daya beli turun -> Ekonomi melambat -> Investor keluar -> Rupiah makin lemah.

Analisis: Apakah Ini Krisis 1998?

Masyarakat awam bertanya-tanya, apakah ini krisis seperti tahun 1998? Jawaban jujurnya: Berbeda secara fundamental, namun sama-sama berbahaya.

Secara fundamental, ada perbedaan utama yang menjadi penyelamat sementara. Pada Mei 2026, inflasi tahunan masih terkendali di kisaran 3,08% , sangat jauh dari 77% di tahun 1998. Rasio kredit macet (NPL) perbankan juga masih terkendali berkat regulasi yang ketat pasca 1998. Artinya, meskipun harga saham jatuh, sistem perbankan belum kolaps seperti 1998.

Namun, bahaya laten justru terletak pada struktural. Krisis 1998 terjadi secara tiba-tiba. Krisis 2026 terjadi secara perlahan namun pasti (slow moving disaster). Daya beli masyarakat kelas menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi sudah tergerus selama bertahun-tahun.

Survei Indikator Politik menunjukkan bahwa meskipun approval rating Prabowo masih tinggi (sekitar 78%) , kepuasan tersebut tidak didorong oleh faktor ekonomi, melainkan faktor keamanan dan pemberantasan korupsi. Artinya, jika krisis ekonomi memburuk, dukungan publik bisa runtuh dengan cepat.

Selain itu, pidato nasionalisme Prabowo justru mengingatkan pada kebijakan substitusi impor yang gagal di masa lalu. Pasar ingin mendengar tentang reformasi struktural, kemudahan berbisnis, dan kepastian hukum—bukan retorika anti asing di

saat Indonesia sangat membutuhkan modal asing.

Kesimpulan dan Hitungan Hari

Jalan keluar dari persimpangan ini tidak mudah. Pemerintah saat ini sedang menjalankan strategi “Defensif Total” : BI mengerahkan seluruh amunisi moneter (suku bunga, stabilisasi, insentif hedging), dan pemerintah berusaha memangkas belanja yang tidak perlu. Namun, itu hanya untuk membeli waktu.

Yang diperlukan adalah Terapi Kejut Pro-Growth. Indonesia perlu kembali fokus pada hilirisasi yang “selesai” (bukan hanya nikel), memangkas biaya logistik yang mahal, dan yang terpenting, melakukan komunikasi publik yang menenangkan (calming communication) yang tidak hanya berisi pidato nasionalisme, tetapi rencana aksi konkret untuk mengisi dapur rakyat.

Untuk Menteri Keuangan Purbaya, detik-detik ini adalah masa tersulit dalam karirnya. Semua mata tertuju padanya. Ia harus menunjukkan bahwa ia bukan hanya “pengawal” perintah presiden, melainkan seorang “juru selamat” fiskal. Sejarah mencatat, menteri keuangan yang baik lahir dari krisis. Mampukah ia?

Untuk Presiden Prabowo, saatnya kita bedah ucapan beliau: Apakah sistem ekonomi kita sudah berdasarkan nasionalisme? Tentu iya, karena nasionalisme sejati adalah memastikan rakyat kecil tidak kelaparan ketika dollar naik. Bukan hanya membela kepentingan korporasi yang punya utang dolar.

Jika langkah-langkah terukur ini tidak segera terlihat, prediksi buruk tentang badai sempurna di Indonesia bukan hanya akan menjadi judul majalah, tetapi akan menjadi fakta sejarah yang kelam.



JANGAN BUANG IBU: CINTA YANG TAK PERNAH USAI

Film *Jangan Buang Ibu* yang tayang di bioskop mulai 25 Juni 2026 hadir sebagai salah satu drama keluarga paling menyentuh tahun ini. Dibintangi oleh Nirina Zubir dan Dwi Sasono, film ini menyoroti perjuangan seorang ibu tunggal yang membesarkan tiga anaknya di tengah keterbatasan hidup. Dengan narasi yang mengalir, film ini bukan hanya hiburan, tetapi juga refleksi sosial yang kuat tentang cinta, pengorbanan, dan luka keluarga.

Cerita berpusat pada Ibu Ristiana, sosok perempuan tangguh yang harus menghadapi kenyataan ditinggalkan suaminya. Ia berjuang sendirian, bekerja keras, dan tetap menjaga kehangatan rumah meski penuh keterbatasan.

Konflik muncul ketika anak-anaknya mulai tumbuh dewasa dan menghadapi pilihan hidup masing-masing. Ada yang tergoda meninggalkan rumah demi ambisi pribadi, ada yang terjebak dalam pergaulan salah, dan ada pula yang merasa putus asa dengan kondisi keluarga mereka. Di tengah semua itu, Ibu Ristiana tetap menjadi pusat kekuatan, meski hatinya sering terluka oleh sikap anak-anaknya.

Film ini menampilkan dilema universal: cinta seorang ibu yang tak pernah habis, meski sering kali tidak dihargai. Dalam salah satu adegan penuh emosi, Dwi Sasono yang berperan sebagai figur ayah berkata, “Dia punya harapan yang terbaik untuk anaknya. Dia tidak mau anaknya gagal seperti dia.” Kalimat

itu menjadi inti dari pesan film: seorang ibu selalu ingin anaknya melampaui keterbatasan yang pernah ia alami.

Secara sinematis, *Jangan Buang Ibu* menggunakan gaya realis dengan pencahayaan natural dan setting rumah sederhana yang memperkuat atmosfer keseharian. Kamera sering menyorot wajah Nirina Zubir dengan close-up, menegaskan ekspresi lelah sekaligus penuh kasih. Musik latar yang minimalis memberi ruang bagi dialog emosional untuk berbicara lebih lantang.

Dari sisi sosial, film ini relevan dengan realitas banyak keluarga Indonesia. Data BPS menunjukkan peningkatan jumlah keluarga dengan orang tua tunggal, dan film ini menjadi cermin bagi mereka yang berjuang dalam sunyi. Penonton diajak merenungkan kembali arti kehadiran seorang ibu, pentingnya keluarga, dan bagaimana cinta tanpa syarat mampu menjadi cahaya di tengah kegelapan hidup.

Secara geopolitik dan ekonomi, film ini mungkin tidak langsung berbicara tentang

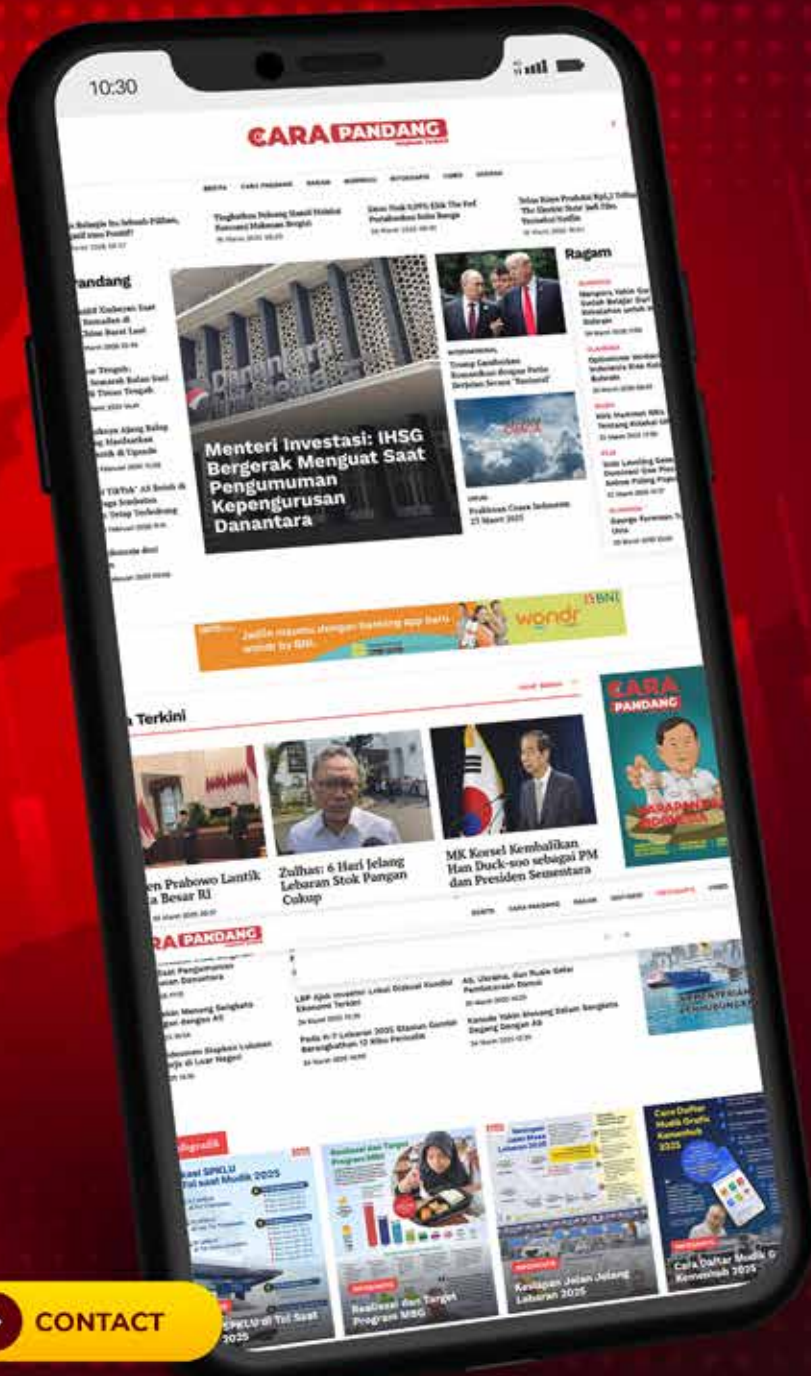
isu global, tetapi pesan universalnya tentang pengorbanan dan keteguhan hati resonan dengan konteks lebih luas. Di tengah dunia yang sering menekankan produktivitas dan pencapaian, *Jangan Buang Ibu* mengingatkan bahwa fondasi masyarakat tetaplah keluarga dan cinta yang tulus.

Film ini juga menginspirasi karena menyoroti keberanian seorang ibu menghadapi stigma sosial. Dalam masyarakat yang sering menilai perempuan dari status pernikahan, Ibu Ristiana berdiri tegak sebagai simbol keteguhan. “Saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya anak-anak saya,” ucapnya dalam salah satu adegan yang membuat penonton terdiam.

Kekuatan film ini terletak pada kejujuran narasinya. Tidak ada romantisasi berlebihan, tidak ada penyelesaian instan. Yang ada hanyalah perjalanan panjang seorang ibu dan anak-anaknya menuju pemahaman bahwa cinta, meski sering diabaikan, tetap menjadi fondasi yang menyelamatkan.



Infografis



Majalah



→ CONTACT

0812 1037 9124

carapandangcom@gmail.com

WWW.CARAPANDANG.COM